

**Produk Domestik Regional
Bruto
Propinsi Jawa Timur
1975 - 1982**

KANTOR STATISTIK **bps** PROP. JAWA TIMUR

0604/35/PPDP/R/84-C1



<https://jatim.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Informasi yang lebih lengkap dalam pembangunan regional maupun nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi selalu diharapkan oleh semua pihak khususnya para perencana dan analis. Sebagai sumbangan kecil untuk kepentingan dimaksud, Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur berupaya menyajikan data Statistik Pendapatan Regional Tahun 1975-1982. Walaupun keterangan ini sifatnya global, namun diharapkan mempunyai makna yang cukup untuk memberi gambaran mengenai masalah pembangunan dewasa ini.

Publikasi buku Produk Domestik Regional Bruto (P.D.R.B) Propinsi Jawa Timur 1975-1982 merupakan kelanjutan publikasi-publikasi sebelumnya. Koreksi serta perbaikan selalu dilakukan tahun demi tahun, oleh sebab itu dianjurkan kepada para pengguna data memperhatikan perbaikan yang ada atau seyogyanya data terakhirlah yang dipergunakan untuk berbagai keperluan.

P.D.R.B Jawa Timur selain dihitung berdasarkan sektor-sektor lapangan usaha, juga dihitung menurut pola pengeluaran. Penyusunan yang lengkap dan ringkas tersebut diharapkan mampu memenuhi berbagai pemakai. Potensi daerah beserta hasil-hasil pembangunan Jawa Timur ini baik kuantitatif maupun kualitatif telah menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan. Kami percaya bahwa dalam menyusun rencana mendatangpun, P.D.R.B. Jawa Timur mempunyai peranan yang tidak kecil.

Akhirnya, kepada semua pihak baik Instansi Pemerintah, Pihak Swasta dan masyarakat luas yang telah membantu dimungkinkannya penerbitan ini kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya.

Saran dan koreksi untuk penyempurnaan perhitungan P D R B selalu kami harapkan.

Surabaya, Pebruari 1984

KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR

KEPALA,



SOETOPO MARTOWARDOJO, M.Sc.

NIP. 340000541

PELAYANAN STATISTIK TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR	
NO. PRIMA	:
NO. INDUK	123. 0315. 0360
PROVINSI	Bps PROV. JAWA TIMUR
EXEMPLAR NE	

<https://jatim.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I	1
II	2
III	6
IV	12
4.1. Nilai absolut PDRB	12
4.2. Distribusi Sektoral	13
4.3. Indeks Harga Implisit	17
4.4. Pertumbuhan & laju perkembangan PDRB Jawa Timur	19
4.5. PDRB dan Pendapatan per Kapita	28
V	35
5.1. Komposisi PDRB	35
5.2. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan	36
5.3. Distribusi Penggunaan PDRB	39
5.4. Indeks Harga Implisit PDRB menurut penggunaannya	42
VI	45
6.1. Tabel-Tabel pokok PDRB Sektoral	47
6.2. Tabel-Tabel menurut penggunaan PDRB	71
6.3. Tabel-Tabel Perbandingan antar Propinsi	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 6.1.1 : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1975—1982	48
Tabel 6.1.2 : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 1975 tahun 1975—1982	50
Tabel 6.1.3 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas dasar harga berlaku	52
Tabel 6.1.4 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 1975	54
Tabel 6.1.5 : Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku	56
Tabel 6.1.6 : Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975	58
Tabel 6.1.7 : Pendapatan Regional dan Angka-Angka Per Kapita Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku	60
Tabel 6.1.8 : Pendapatan Regional dan Angka-Angka Per Kapita Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975	62
Tabel 6.1.9 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku	64
Tabel 6.1.10 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975	66
Tabel 6.1.11 : Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur	68
Tabel 6.2.1 : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1975	72
Tabel 6.2.2 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1975	74
Tabel 6.2.3 : Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1975	76
Tabel 6.2.4 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1975	78
Tabel 6.2.5 : Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan	80

Tabel 6.3.1	:	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1975-1982	84
Tabel 6.3.2	:	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975 tahun 1975-1982	86
Tabel 6.3.3	:	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga yang berlaku Tahun 1976-1982	88
Tabel 6.3.4	:	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975 tahun 1976-1982	90
Tabel 6.3.5	:	Indeks Berantai dari Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku tahun 1976-1982	92
Tabel 6.3.6	:	Indeks Berantai dari Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975 tahun 1976-1982	94
Tabel 6.3.7	:	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku 1976-1982	96
Tabel 6.3.8	:	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975 tahun 1976-1982	98
Tabel 6.3.9	:	Indeks Implisit dan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia	100
Tabel 6.3.10	:	Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975 tahun 1975-1982 (%)	102

<https://jatim.bps.go.id>

BAB I : PENDAHULUAN

Pelita III hampir berakhir dan Pembangunan Nasional masih harus berlanjut dengan Repelita-Repelita berikutnya. Garis-garis Besar Haluan Negara menugaskan kita semua untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Proses pembangunan memerlukan kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Pelita demi Pelita ditempuh dengan maksud semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun landasan yang kokoh pada Pelita berikutnya serta meningkatkan keseimbangan keselarasan dan keserasian pertumbuhan pembangunan antar daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

Pembangunan regional Jawa Timur berpedoman pada trilogi pembangunan, utamanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena pembangunan Jawa Timur menyebar ke seluruh pelosok daerah, juga tidak meninggalkan pembangunan Sektoral yang merupakan tulang punggung ekonomi.

Untuk melihat sampai berapa jauh hasil-hasil yang telah dicapai dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut, para pembuat kebijaksanaan dan analis perlu mengamati apa yang terjadi dan apa pula yang akan terjadi untuk masa mendatang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu kunci dan alat untuk analisa dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Penyajian dan evaluasi secara mendalam perlu ditempuh oleh semua pihak agar arah pembangunan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan masyarakat.

Penyusunan dan penyajian PDRB yang dibuat oleh Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur dianggap sangat besar manfaatnya, karena dari data tersebut sekaligus dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi baik global maupun sektoral. Penggeseran-penggeseran struktur ekonomi, gejolak inflasi/deflasi dan yang lebih penting lagi yaitu untuk apa saja hasil-hasil pembangunan tersebut dipergunakan. Data ini diungkapkan oleh PDRB yang disusun menurut pengeluarannya.

BAB II : KONSEP YANG DIPAKAI DAN PERMASALAHANNYA

1. Umum

Konsep yang dipakai untuk pendapatan masyarakat ini, masih dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah seluruh nilai tambah (Produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Jadi PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut, oleh karenanya merupakan gambaran "Production Originated"

Beberapa konsep dan definisi yang penting untuk diketahui didalam penghitungan Pendapatan Regional adalah :

a. Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product)

Ada tiga konsep mengenai hal ini bila ditinjau dari segi yang berlainan :

(i) Dari segi Produksi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

(ii) Dari segi Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh Faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses di suatu propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

(iii) Dari segi Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto, didalam suatu propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (Gross Regional Domestic Product at current market prices) adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

c. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan suatu tahun (Gross Regional Domestic product at constant market prices) adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun.

d. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (Gross Regional Domestic Product at market prices) merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari lapangan usaha, meliputi balas jasa faktor produksi (upah dan gaji, surplus usaha), penyusutan dan pajak tak langsung neto.

e. Produk Regional Bruto (Gross Regional Product) adalah produk domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar daerah (region).

- f. Produk Regional neto (net Regional product) adalah produk regional Bruto dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal.
- g. Produk Regional neto atas dasar harga biaya faktor produksi (Net Regional Product at factor cost) adalah produk Regional neto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Produk Regional neto atas dasar biaya faktor produksi merupakan pendapatan Regional.
- h. Pendapatan per kapita (per capita income) adalah produk Regional neto atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- i. Pajak tak langsung neto (Net indirect taxes) adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada Produsen.
- j. Angka indeks implisit adalah angka indeks yang diperoleh sebagai hasil bagi antara nilai atas dasar harga yang berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, angka ini menunjukkan indeks harga secara menyeluruh.

2. PDRB menurut penggunaan :

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri dan impor. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan maka total supply dari barang dan jasa itu digunakan untuk :

- (a). Konsumsi rumah tangga
- (b). Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak mencari untung
- (c). Konsumsi Pemerintah
- (d). Pembentukan modal tetap domestik Bruto
- (e). Perubahan stock, dan
- (f). Ekspor Neto

Dipakainya istilah ekspor neto disini adalah karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam daerah (region) saja, maka dari jumlah penyediaan diatas perlu dikeluarkan kembali nilai impornya baik dari luar daerah maupun dari luar negeri.

Secara definisi akan sulit menyusun Pendapatan Regional menurut penggunaannya karena data mengenai arus (barang dan jasa) yang keluar/masuk daerah masih sukar diperoleh.

3. Pendapatan orang seorang (Personal Income) Dan Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan (Disposable Income)

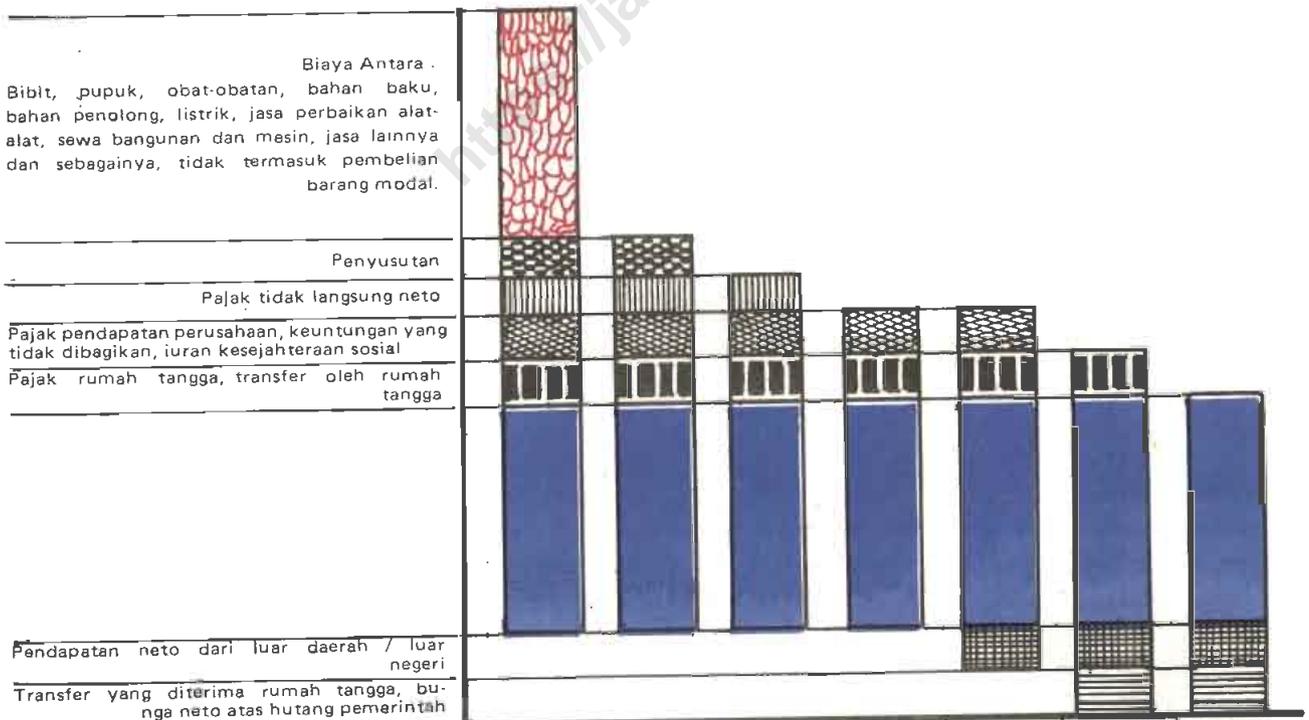
Dari uraian sederhana diatas maka konsep yang dipakai dalam Regional Income dapat diurutkan sebagai berikut :

- (a). Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar (Gross Regional Domestic Product at market prices).
minus : penyusutan akan sama dengan
- (b). Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (Net Regional Domestic Product at market prices).
minus : pajak tak langsung neto, akan sama dengan :

- (c). Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (Net Regional Domestic Product at factor cost).
- plus : pendapatan yang masuk dari luar daerah/luar negeri
- minus : pendapatan yang mengalir keluar daerah/luar negeri
- akan sama dengan :
- (d). Pendapatan Regional (Regional Income)
- minus : - pajak pendapatan perusahaan (corporate income taxes)
- keuntungan yang tidak dibagikan (undistributed profit)
- iuran kesejahteraan sosial (social security contribution)
- plus : transfer yang diterima oleh rumah tangga dan bunga neto atas hutang pemerintah,
- akan sama dengan :
- (e). Pendapatan orang seorang (personal income).
- minus : pajak rumah tangga, transfer yang dibayarkan rumah tangga
- akan sama dengan :
- (f). Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income)

Untuk lebih jelasnya, lihat susunan agregat Pendapatan Regional pada halaman berikut.

SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL



Keterangan :

- *) Terdiri dari :
- a. Upah dan gaji
 - b. Sewa tanah, royalti
 - c. Bunga modal
 - d. Keuntungan (deviden dan laba ditahan)
 - e. Penyusutan
 - f. Pajak tak langsung neto

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
 PDRN = Produk Domestik Regional Neto
 PRN = Produk Regional Neto

4. Permasalahan yang dihadapi :

Publikasi Pendapatan Regional ini diterbitkan belum dapat menyajikan angka-angka pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena arus pendapatan yang mengalir antar daerah (region) masih sulit untuk diperhitungkan. Dalam pengertian ini, pendapatan dari faktor produksi yang berada di wilayah lain, tetapi dimiliki penduduk wilayah itu harus diperhitungkan sebagai bagian pendapatan wilayah itu, sebaliknya apabila faktor produksi yang berada di wilayah ini dimiliki oleh penduduk wilayah lain harus diperhitungkan sebagai bagian pendapatan wilayah lain. Namun demikian sebagai pendekatan (proxy) terhadap konsep Pendapatan Regional yang sebenarnya, telah dihitung Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor yaitu PDRB yang dijelaskan diatas dikurangi dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Dari Publikasi Pendapatan Regional ini masih dijumpai beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan lagi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

a. Beberapa data dasar yang digunakan dalam penghitungan ini masih lemah. Umumnya data tersebut merupakan angka-angka yang belum sempurna baik mutu maupun ruang lingkupnya. Banyak data tersedia, tetapi belum sesuai dengan apa yang diperlukan, sehingga untuk pelaksanaan Penghitungannya kadang-kadang perlu dilakukan secara perkiraan dan penyesuaian berdasarkan indikator-indikator yang ada.

Data dasar yang diperlukan antara lain tentang produksi, harga, struktur biaya dan sebagainya.

b. Data yang dipakai dalam penghitungan Pendapatan Regional tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensus dan survei, ataupun catatan hasil aktivitas administrasi baik yang berasal dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, karena keaneka ragaman sumber data tersebut menyebabkan adanya angka yang kurang Konsisten antar daerah dan waktu.

c. Kelangkaan data yang tersedia dapat mempengaruhi penggunaan konsep, definisi dan metode estimasi, sehingga di dalam usaha penyeragamannya dijumpai banyak kesulitan.

Akibat lemahnya beberapa data dasar yang dipakai baik mutu maupun ruang lingkupnya, keanekaragaman sumber data, ketergantungan penghitungan terhadap data yang tersedia serta pelaksanaan oleh berbagai instansi yang berbeda; menyebabkan angka-angka hasil akhir belumlah dapat dikatakan sempurna. Namun demikian usaha perbaikan penyempurnaan penghitungan Pendapatan Regional terus dilakukan.

Akhirnya walaupun masih terdapat beberapa kelemahan seperti disebutkan diatas, publikasi ini berguna sekali sebagai bahan studi perbandingan dan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan baik tingkat Nasional maupun Regional.

BAB III : URAIAN SINGKAT ANGKA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur tidak akan terlepas dengan situasi ekonomi nasional dan internasional. Semuanya saling berkaitan dan isi mengisi. Sejauh mungkin akan selalu dihindari dampak negatif dari luar dengan berbagai kebijaksanaan regional. Pembangunan Nasional yang merupakan rangkuman dari berbagai pembangunan sektoral dan regional tersebar diseluruh Wilayah Nusantara. Pembangunan Regional yang satu langsung atau tidak langsung hasilnya berpengaruh terhadap region yang berdekatan, karena pada dasarnya penduduk yang berada di daerah perbatasan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang ada di sekitarnya.

Cakupan bidang pembangunan sangat luas meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankamrata dan lain-lain. Khusus hasil-hasil pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah Propinsi Jawa Timur secara sepintas dapat diketahui dan dianalisa dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Gross Domestic Regional Bruto), walaupun secara global perkembangan ekonomi inilay yang relatif lebih mudah untuk diamati, karena indikatornya dapat dituangkan dalam bentuk kuantitatif.

Usaha-usaha penyajian data dan tabel-tabel PDRB yang teliti sangat membantu untuk menyusun suatu analisa tentang keberhasilan pembangunan daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi baik menyangkut produksi sektoral, perkembangan tahunan, pertumbuhan ekonomi, penggeseran struktur ekonomi dan lain-lain baik yang diamati dengan menggunakan harga berlaku ataupun harga konstan tahun 1975 dan dapat menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai. Metode penyusunan PDRB menurut sudut penggunaannya akan bisa memberikan informasi kepada para pengguna data tingkat perkembangan konsumsi rumah tangga, posisi perdagangan antar Propinsi dan atau antar negara, besarnya pembentukan modal tetap bruto yang terjadi selama kurun waktu tertentu dan sampai sejauh mana investasi tersebut dapat meningkatkan PDRB tahun-tahun berikutnya.

Penyajian PDRB Jawa Timur 1975—1982 baik menurut sektoral maupun posisi pengeluarannya diharapkan akan mampu memberikan hasil pembangunan dikawasan ini.

Pembangunan yang secara nyata dimulai sejak Orde Baru dengan Pelita-pelitanya, ternyata bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sejak Pelita I, Pelita II dan 4 tahun dalam Pelita III mempunyai pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing 5,0%; 7,71% dan 8,09%; suatu data yang menggembirakan yang ternyata makin lama semakin membesar. Sementara itu apabila dilihat dari pendapatan perkapita setahun juga menunjukkan adanya perkembangan yang sangat memuaskan. Pada awal Pelita I sekitar Rp. 18.804,— maka pada akhir Pelita I menjadi sekitar Rp. 44.698,— akhir Pelita II Rp. 137.433,— dan tahun ke empat Pelita III telah mencapai Rp. 257.448 (1982).

Kalau diperhatikan selama 7 (tujuh) tahun terakhir rata-rata kenaikan PDRB Jawa Timur tahun 1975—1982 menurut harga berlaku mencapai 24,13%. Kenaikan tersebut sejak berakhirnya KNOP 15 — 1978 menggambarkan perubahan yang menurun. Tahun 1978—1979 kenaikan PDRB 34,51% tahun 1979—1980 sebesar 39,01%, tahun 1980—1981 sebesar 25,82% dan tahun 1981—1982 agak rendah 12,15%. Rata-rata kenaikan menurut lapangan usaha selama 1975—1982 ternyata mempunyai range 20,24% — 33,31%, dimana terendah untuk lapangan usaha pertanian dan tertinggi untuk Pertambangan dan Penggalan. Pengamatan lebih lanjut

tentang hasil-hasil pembangunan juga dapat diikuti dari rata-rata kenaikan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 1975. Dengan cara ini, maka kita akan melihat rata-rata pertumbuhan riil yang tidak dipengaruhi inflasi dan sebagainya.

Tertuang pada GBHN bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan rata-rata sekitar 6,5% pada akhir Pelita III, ternyata realisasi pertumbuhan Jawa Timur tahun 1975-1982 mencapai 8,13% atau 4 tahun Pelita III sebesar 8,09% dan bahkan diatas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,82%.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1979-1980 12,72% dan diikuti tahun 1980-1981, 10,96%. Kenaikan terkecil terjadi untuk 1981-1982 ialah hanya 1,89%. Resesi ekonomi yang melanda dunia telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan Jawa Timur khususnya pada tahun 1982. Walaupun demikian secara umum pertumbuhan tersebut sangat menggembirakan karena berada diatas rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang berkisar 1,49% per tahun. Dengan demikian pendapatan per kapita Jawa Timur selalu naik dari tahun ke tahun selama kurun waktu 1975-1982 yang semula Rp. 64.210,- menjadi Rp. 257.448,- PDRB perkapita setahun tahun 1975 s/d 1982 berturut-turut Rp.69.891,71,-; Rp.83.111,-; Rp. 98.427,-; Rp. 113.001,-; Rp.149.769,-; Rp.205.128,-; Rp.254.302,- dan tahun 1982 Rp. 281.020,- dibandingkan pendapatan perkapita Nasional untuk periode tersebut rupa-rupanya Jawa Timur baru sekitar 67-71% nya rata-rata pendapatan Nasional.

TABEL I : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
JAWA TIMUR ATAS HARGA BERLAKU
DAN HARGA KONSTAN TAHUN 1975-1982
(JUTA RUPIAH)

Tahun	Harga berlaku		Harga konstan	
	P D R B	Indeks	P D R B	Indeks
1	2	3	4	5
1975	1.885.249,92	100,00	1.885.249,92	100,00
1976	2.275.262,53	120,69	1.984.154,28	105,25
1977	2.734.761,04	145,06	2.188.643,16	116,09
1978	3.186.515,46	169,02	2.385.661,46	126,54
1979	4.286.333,59	227,36	2.547.572,02	135,13
1980	5.958.262,92	316,05	2.871.536,49	152,32
1981	7.496.796,64	397,66	3.186.314,30	169,01
1982	8.407.993,17	445,99	3.246.439,42	172,20

PDRB Jawa Timur menurut harga berlaku yang pada tahun 1975 bernilai Rp. 1.855,3 milyar untuk tahun 1982 sudah menjadi Rp. 8.408,0 milyar, sehingga indeks perkembangannya menunjukkan 445,99 (1975 = 100). Apabila dihitung dengan harga konstannya maka indeks tersebut menunjukkan 172,20. Walaupun PDRB celihatannya makin membesar, tetapi dengan pesatnya pembangunan diseluruh wilayah tanah air dengan berbagai

bidang pembangunan, maka bila dibanding angka Produk Domestik Bruto Nasional andil Jawa Timur hanya sekitar 14% saja. Alangkah bahagiannya rakyat Jawa Timur seandainya persentase tersebut sesuai dengan perbandingan Penduduk Jawa Timur dan Indonesia tersedia yaitu sebesar 20% yang berarti sepadan dengan kepadatannya. Karena PDB Indonesia tahun 1975 dan 1982 masing-masing Rp. 12.642,5 Milyard dan Rp. 59.632,6 Milyard.

TABEL 2 : PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN
PDB INDONESIA MENURUT HARGA BERLAKU
1975 - 1982

Tahun	PDRB Jawa Timur (Milyar Rp)	PDB Indonesia (Milyar Rp)	% Jawa Timur terhadap Indonesia
1	2	3	4
1975	1.885,3	12.642,5	14,91
1976	2.275,3	15.466,7	14,71
1977	2.734,8	19.010,7	14,39
1978	3.186,5	22.458,3	14,19
1979	4.286,3	32.025,4	13,38
1980	5.958,3	45.445,7	13,11
1981	7.496,8	54.027,0	13,88
1982	8.408,0	59.632,6	14,10

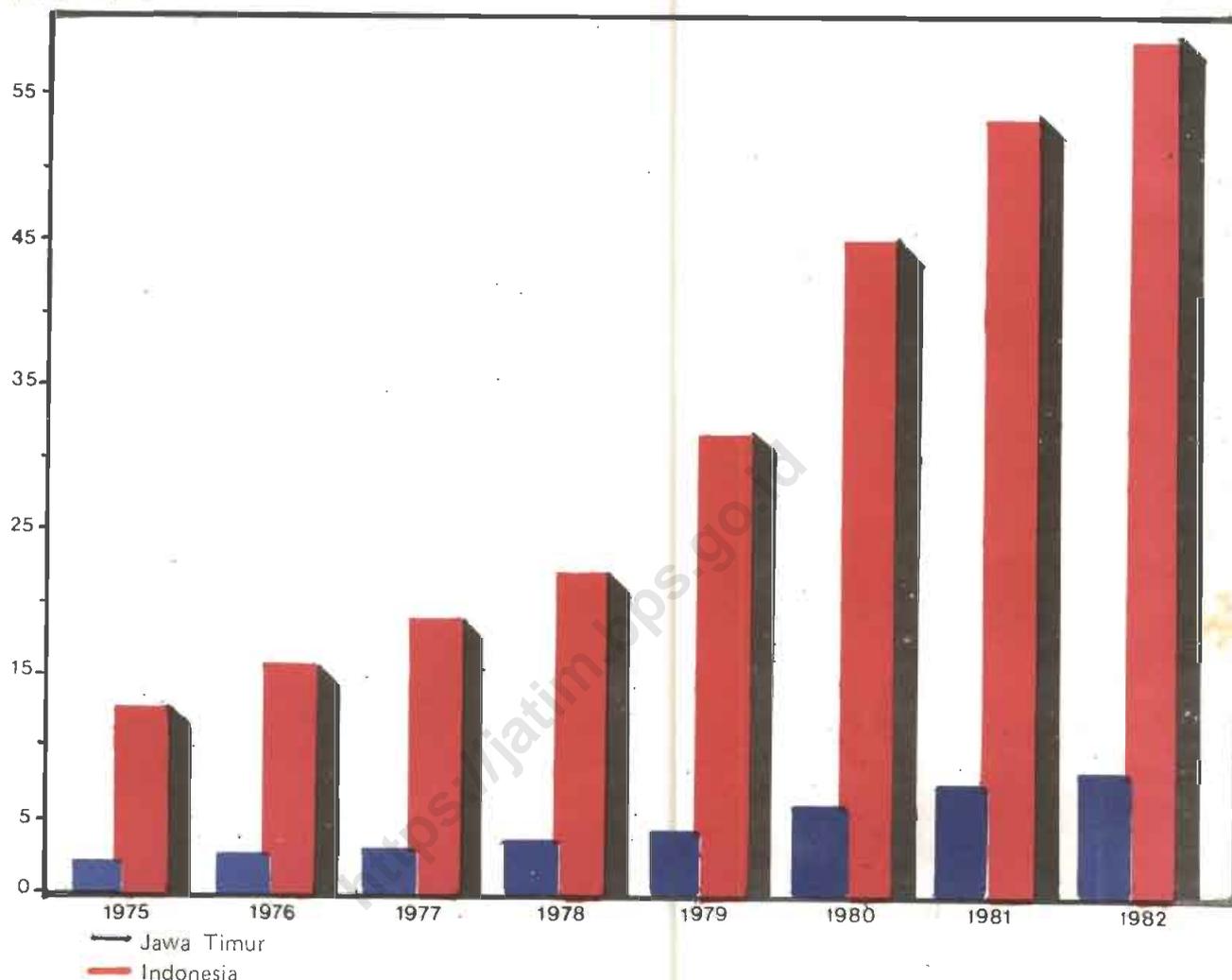
PDRB yang disusun selama inipun dapat dipergunakan sebagai indikator gejala harga yang bergelombang naik turun di Jawa Timur. Alat pengukur inflasi lainnya ialah Indeks Harga Konsumen (IHK) dimana sementara ini hanya diperhitungkan IHK Surabaya yang dianggap cukup mewakili Propinsi Jawa Timur.

Inflasi yang berhasil dihitung melalui indeks implisit ataupun yang lazim dari IHK di Jawa Timur ternyata tidak jauh berbeda. Kedua indeks memperlihatkan gerakan yang searah. Dengan mengambil tahun 1975 sebagai dasar, maka tahun 1982 IHK menjadi 243 dan Indeks Implisit 259. Demikian pula inflasi tahunannya hanya berbeda sekitar 1-2 point saja.

Ini membuktikan bahwa kedua indikator yang dihitung secara terpisah, inflasi yang terjadi relatif sama. Menurut pengamatan tersebut inflasi tertinggi pada tahun 1979 dan 1980 masing-masing sekitar 23-26% sedang tahun terendah pada tahun 1978 yaitu 4-7%.

GRAFIK 1 : PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN
PDB INDONESIA MENURUT HARGA BERLAKU

(1000 milyar)



Tujuan dan sasaran Pembangunan pada dasarnya sudah digariskan oleh Pemerintah sesuai dengan GBHN. Maka peningkatan berbagai sektor dengan arah tetap berlandaskan pada sektor agraris menuju industrialisasi. Yang menjadi masalah bagaimana mempercepat proses penggeseran tersebut dan mengatur strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Dari hasil pembangunan periode 5 tahunan ini ternyata telah menunjukkan hasil yang konkrit. Dalam kurun waktu 7 tahun dapat disajikan dan terbukti adanya penggeseran pola atau struktur perekonomian baik ditinjau menurut harga berlaku atau konstan. Menurut perhitungan harga berlaku sektor Pertanian mempunyai peranan 42,87% (1975) turun menjadi 33,99% (1982), sedangkan Industri Pengolahan dari 11,73% naik menjadi 15,28%. Apabila dihitung pada harga konstan masing-masing berubah dari 42,87% ke 32,72% dan 11,73% ke 15,41%.

Komposisi PDRB yang dilihat dari kelompok sektoral yang disusun atas 3 kelompok yaitu :

- Sektor Primair yang terdiri dari Sektor-sektor Pertanian, Penggalian dan Pertambangan.
- Sektor Sekundair yang terdiri dari Sektor-sektor Industri, Listrik, Gas dan Air Minum serta Bangunan dan
- Sektor Tertiar yang mencakup berbagai sektor Jasa-jasa lainnya.

Sektor Primair, Sekundair, Tertiar pada tahun 1975 mempunyai andil 43,07%; 12,89%; 44,04% menjadi 34,20%; 16,89% dan 48,91% pada tahun 1982. Dalam kurun waktu tersebut pola perekonomian telah terjadi penggeseran-penggeseran yang cukup berarti.

Sedang menurut harga konstan tahun 1982 masing-masing sektor menjadi 32,97%; 17,39% dan 49,64%.

Data tersebut mengungkapkan terciptanya peningkatan usaha pengolahan komoditi dan makin meluasnya sektor tertiar yang merupakan sektor penunjang dan pendukung kedua sektor terdahulu dan struktur tadi membuktikan adanya geseran pola perekonomian.

Seperti disebutkan terdahulu rata-rata pertumbuhan periode 1975-1982 Propinsi Jawa Timur mencapai 8,13% per tahunnya, dan lebih tinggi apabila diperbandingkan rata-rata tahunan pertumbuhan Nasional untuk periode yang sama sebesar 7,10%. Dari sektor-sektor yang dihitung ternyata yang melebihi angka pertumbuhan tersebut yaitu sektor Pertambangan, Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Perdagangan, Pengangkutan dan Komunikasi, Perbankan, Sewa Rumah dan Pemerintahan, sedangkan Sektor-sektor lain rata-rata laju pertumbuhannya di bawah 8,13%.

Sebagai contoh akhir-akhir ini sangat terasa dampak positif program listrik masuk desa yang merupakan pendobrak peningkatan ekonomi di daerah Pedesaan, Program air bersih tidak saja dilakukan oleh PDAM tetapi lebih jauh lagi terus diusahakan dalam rangka menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Sektor yang mempunyai rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian (19,70%), dan terendah Pertanian (4,08%). Untuk perbandingan kedua sektor terakhir ini untuk PDB Indonesia (nasional) masing-masing hanya 2,18% dan 3,89% sedangkan rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi pada sektor Listrik, Gas dan Air Minum (14,46%) dan terendah sektor Pertambangan dan Penggalian (2,18%).

Produk Domestik Regional Bruto selain dihitung menurut lapangan usaha/sektoral untuk mengetahui peranan dan perubahan-perubahan struktur perekonomian, juga dihitung berdasarkan sudut penggunaan atau pengeluarannya. Disadari menghitung secara bebas kedua metode tersebut belum mampu, mengingat keterbatasan kemampuan dewasa ini disamping sulitnya data yang dibutuhkan. Dengan menghitung PDRB dari sisi penggunaan ini akan dapat diketahui sejauh mana penggunaan dari pada nilai tambah dari semua produk-produk yang dihasilkan di kawasan ini. Pola penggunaannya juga sangat membantu berbagai analisa dan perencanaan pembangunan mendatang. Selain itu sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan di masa yang lalu. PDRB dari sisi penggunaan, sementara ini dikelompokkan menjadi 4 hal yaitu untuk Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan Net Ekspor termasuk keluar masuk barang antar daerah. Baik lewat Darat, Laut maupun Udara. Karena langkanya data yang tersedia maka perubahan stok dan Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung dimasukkan sebagai residual dan digabung dengan Konsumsi Rumah Tangga.

Selama periode 1975-1982 pengeluaran Penduduk Jawa Timur untuk Konsumsi Rumah Tangga telah banyak memperlihatkan perubahan-perubahan tahun 1975 persentase konsumsi rumah tangga menurut harga berlaku dan harga konstan 1975 yaitu 64,98%. Pada tahun 1982 data tersebut telah menjadi 59,20% untuk harga berlaku dan 59,68% untuk harga konstan. Angka tersebut membuktikan kalau pola pengeluaran relatif sudah tidak berorientasi pada konsumsi rumah tangga saja tetapi sebagai digunakan keperluan lain.

Dari tabel terlampir rata-rata konsumsi rumah tangga sekitar 63% dari PDRB Jawa Timur baik untuk harga berlaku ataupun harga konstan. Untuk hal yang sama angka nasional/Indonesia untuk harga berlaku rata-rata 65% dan harga konstan hampir 80%.

Untuk kurun waktu yang sama konsumsi pemerintah terjadi peningkatan persentasenya. Pada tahun 1975 baik harga berlaku ataupun konstan sebesar 17,57% tetapi dalam tahun 1982 masing-masing menjadi 17,88% dan 18,41%. Hal ini diduga disebabkan semakin meningkatnya peranan Pemerintah dalam Pembangunan, bertambahnya jumlah pegawai Negeri dalam tahun-tahun terakhir yang mengakibatkan membesarnya pengeluaran-pengeluaran rutin dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran Pemerintah tadi merupakan indikator besarnya produksi Pemerintah dan sekaligus indikator besarnya konsumsi Pemerintah.

Penggunaan lain PDRB yaitu untuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. Pembentukan Modal ini akan sangat menentukan terhadap perubahan-perubahan PDRB tahun-tahun selanjutnya. Pada lazimnya pembentukan modal baru dapat dipetik hasilnya pada masa-masa berikutnya. Akan sangat mengkhawatirkan seandainya sebagian PDRB tidak digunakan pembentukan modal, artinya hasil upaya yang dilakukan hanya untuk keperluan yang bersifat konsumtif saja. Kondisi tersebut membuat masa yang suram dan akan banyak ketergantungan kepada pihak lain dan akhirnya daerah ini sulit berkembang. Peranan Pembentukan Modal semakin meningkat, semula pada tahun 1975 menunjukkan peranan 18,32%, tetapi untuk tahun 1982 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan menjadi masing-masing 26,67% dan 29,67%. Kelihatan dari penggunaan ini bahwa selama Pelita-Pelita yang lalu arah pembangunan mulai menggeser menuju hal yang tidak bersifat konsumtif. Dan memang terasa selama ini makin membesar usaha Pemerintah dalam menggalakkan penanaman modal/investasi berbagai bidang yang merupakan landasan, untuk melakukan lepas landas pembangunan-pembangunan lebih lanjut.

Perdagangan antar Propinsi maupun antar Negara didalam penghitungan PDRB menurut penggunaannya menggambarkan adanya kondisi yang masih memerlukan pengamatan lebih dalam pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan peranan ekspor terus berkembang dari 31% menjadi 43%, demikian import dari 32% menjadi 47% sejak tahun 1975 hingga 1982 menurut perhitungan harga berlaku. Sedang bila atas dasar harga konstan 1975 ekspor dari 31% menjadi 39% dan impor dari 32% ke 47%. Memang umumnya impor lebih tinggi dari ekspor, karena kita maklumi fasilitas dan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya khususnya merupakan pintu masuk dari luar Negeri untuk Indonesia bagian Tengah dan Timur lainnya. Sementara arus barang via darat masih mempunyai kelemahan-kelemahan walaupun telah dicoba berbagai usaha untuk memperkirakan nilainya.

BAB IV : PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL DI JAWA TIMUR

4.1. Nilai Absolut PDRB

Produk Domestik Regional Jawa Timur Tahun 1975—1982 menunjukkan adanya perkembangan pembangunan di wilayah ini. PDRB Jawa Timur tahun 1975 s/d 1982 berturut-turut sebagai berikut : Rp. 1.885,2 milyar, Rp. 2.275,3 milyar, Rp. 2.734,8 milyar, Rp. 3.186,5 milyar, Rp. 4.286,3 milyar, Rp. 5.958,3 milyar, Rp. 7.496,8 milyar dan Rp. 8.408,00 milyar. Apabila nilai tahun 1975 indeksinya : 100 maka indeks tahun 1982 menunjukkan 446 atau telah menjadi 4 kali lipat lebih. Nilai tersebut masih mencakup adanya inflasi, apabila pengaruh inflasi dihilangkan maka dapat disajikan dalam bentuk PDRB atas dasar harga konstan. Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 1975 s/d 1982 sebagai berikut :

Rp. 1.885,2 milyar, Rp. 1.984,2 milyar, Rp. 2.188,6 milyar, Rp. 2.385,7 milyar, Rp. 2.547,6 milyar, Rp. 2.871,5 milyar, Rp. 3.186,3 milyar dan Rp. 3.246,4 milyar. Indeks perkembangan riil tahun 1982 menunjukkan 172,20 sehingga selama 7 tahun terakhir menunjukkan kenaikan sebesar : 72,20%. Apabila diperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan rata-rata pertumbuhan riil untuk setiap tahun yaitu sebesar : 8,13%.

Pertumbuhan dari setiap sektor yang menonjol dalam PDRB Propinsi Jawa Timur tahun 1975 dan 1982 pada harga berlaku yaitu : Pertanian dari Rp. 808 milyar menjadi 2.858 milyar, peranan yang terbesar yaitu Sub sektor Tanaman Bahan Makanan dari Rp. 659 milyar menjadi Rp. 2.177 milyar dan Peternakan dari Rp. 50 milyar menjadi Rp. 267 milyar. Sektor lain yang cukup besar peranannya yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran dari 389 milyar menjadi Rp. 2.078 milyar dan sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga data tahun 1975 sebesar Rp. 221 milyar dan tahun 1982 menunjukkan Rp. 1.285 milyar.

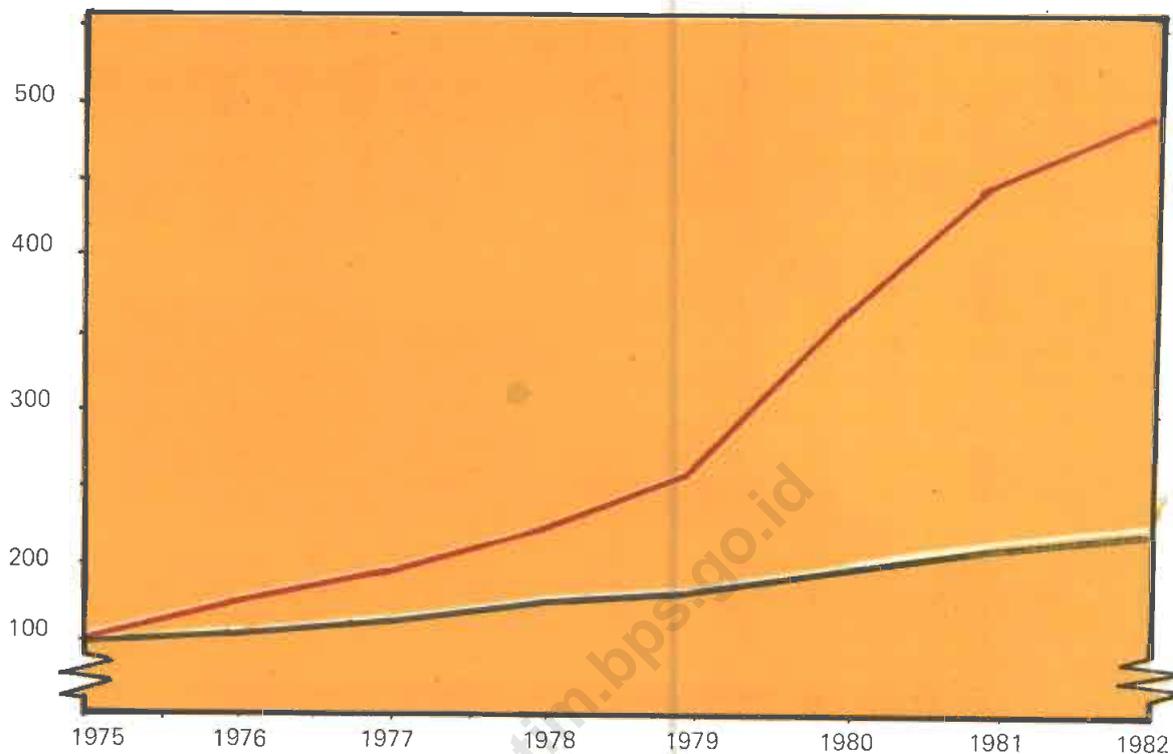
Sektor Pemerintahan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 209 milyar pada tahun 1975 menjadi Rp. 910 milyar untuk tahun 1982, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari Rp. 120 milyar pada tahun 1975 menjadi Rp. 633 milyar. Adanya perkembangan PDRB Jawa Timur dari tahun ketahun menunjukkan adanya kemajuan dari hasil-hasil Pembangunan selama ini sedangkan PDRB per kapita dapat mencerminkan adanya kemakmuran masyarakat dari suatu daerah.

Pada perhitungan harga berlaku PDRB perkapita setiap tahun dari tahun 1975 s/d 1982 menunjukkan sebagai berikut : Rp. 69.892; Rp. 83.111; Rp. 98.427; Rp. 113.001; Rp. 149.769; Rp. 205.128; Rp. 254.302 dan Rp. 281.020. Bila dinyatakan dalam pendapatan per kapitanya masing-masing menjadi Rp. 64.210; Rp. 75.969; Rp. 89.969; Rp. 103.142; Rp. 137.433; Rp. 188.951; Rp. 234.926 dan Rp. 257.448. Dari data tersebut menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun.

Diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 1,49% sedangkan pertumbuhan PDRB pertahun sebesar 8,13%, sehingga pertumbuhan PDRB lebih pesat bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian diharapkan kenaikan pendapatan perkapita dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh penduduk wilayah Jawa Timur.

Pendapatan riil per kapita penduduk Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 1975—1982 masing-masing sebagai berikut : Rp. 64.210; Rp. 66.544; Rp. 72.314; Rp. 77.678; Rp. 81.714; Rp. 90.681; Rp. 98.934 dan Rp. 98.977, dengan demikian pendapatan riil penduduk tahun 1982 telah meningkat hampir 54% dari pendapatan tahun 1975. Secara rata-rata kenaikan riil pendapatan perkapita sekitar 6,4%

GRAFIK 2 : INDEK PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975



Keterangan :

- : Indeks Perkembangan atas dasar harga berlaku
- : Indeks Perkembangan atas dasar harga konstan 1975

4.2. Distribusi sektoral

Untuk melihat peranan dan struktur ekonomi yang diharapkan menurut kondisi ekonomi suatu daerah, PDRB disajikan dalam bentuk distribusi persentase baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dari pengamatan peranan masing-masing sektor akan mudah diketahui antara lain keberhasilan arah pembangunan daerah, penggeseran struktur ekonomi, kegiatan yang perlu diprioritaskan, rencana pembangunan antar sektor pada waktu yang akan datang.

Distribusi PDRB Jawa Timur baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan khusus untuk sektor-sektor Primer yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian cenderung semakin menurun.

Peranan sektor Primer pada tahun 1975 atas dasar harga berlaku sebesar 43,07% tahun-tahun berikutnya menunjukkan 41,59%; 40,17%; 39,58%; 38,72%; 37,04%; 37,72% dan 34,20% sedangkan peranan sektor tersebut atas dasar harga konstan berturut-turut 1976 s/d 1982 yaitu sebesar : 42,58%, 41,21%, 40,73%, 40,42%, 38,58%, 35,51% dan 32,97%.

TABEL 3 : DISTRIBUSI PDRB JATIM MENURUT HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN '75 SERTA KELOMPOK LAPANGAN USAHA TAHUN 1975 - 1982 (%)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan '75		
	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tertiar	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tertiar
1	2	3	4	5	6	7
1975	43,07	12,89	44,04	43,07	12,89	44,04
1976	41,59	13,13	45,28	42,58	12,87	44,55
1977	40,17	13,59	46,24	41,21	13,08	45,71
1978	39,58	14,68	45,74	40,73	13,63	45,64
1979	38,72	15,52	45,76	40,42	14,01	45,57
1980	37,04	16,79	46,17	38,58	15,44	45,98
1981	37,72	16,59	45,69	35,51	17,05	47,44
1982	34,20	16,89	48,91	32,97	17,39	49,64

Sebaliknya sektor sekunder (Industri, Listrik, Gas & Air Minum dan Bangunan) semakin lama semakin menunjukkan persentase yang membesar.

Atas dasar harga berlaku berturut-turut dari tahun 1975 yaitu 12,89%, 13,13%, 13,59%, 14,68%, 15,52%, 16,79%, 16,59% dan 16,89%. Sedangkan persentase atas dasar harga konstan berturut-turut dari tahun 1976 yaitu : 12,87%, 13,08%, 13,63%, 14,01%, 15,44%, 17,05% dan 17,39%. Apabila diperhatikan distribusi persentase secara sektoral (tabel 2).

Sektor Pertanian semakin lama semakin menurun walaupun perannya tetap yang yang paling besar. Peranan tahun 1975 berturut-turut sampai tahun 1982 atas dasar harga berlaku yaitu : 42,87%, 41,17%, 39,80%, 39,31%, 38,45%, 36,78%, 37,54% dan 33,99%. Sedangkan persentase atas dasar harga konstan dan tahun 1976 berturut-turut yaitu : 42,12%, 40,79%, 40,44%, 40,15%, 38,34%, 35,30% dan 32,72%.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami penggeseran peranan yang semula: 20,65% (1975) telah berubah menjadi 24,72% (1982) pada harga berlaku sedang atas dasar harga konstan yang semula perannya sebesar : 20,65% (1975) menjadi 25,27% (1982). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran erat hubungannya dengan Sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Sektor Industri karena sebagian besar dari Produksi yang dihasilkan bertujuan untuk dipasarkan sehingga disalurkan melalui saluran-saluran perdagangan sehingga apabila sektor yang diproduksi mengalami kenaikan maka dengan serta merta akan menaikkan sektor Perdagangan. Sektor Perdagangan mencakup kegiatan Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Perusahaan Restoran, Perhotelan dan Perusahaan Akomodasi lainnya.

Sektor Industri Pengolahan mempunyai peranan nomor tiga setelah sektor Pertanian dan Perdagangan. Peranan sektor Industri atas dasar harga berlaku pada tahun 1975 sebesar : 11,73% menjadi 15,28% pada tahun 1982, sedang atas dasar harga konstan tahun 1982 sebesar 15,41%. Dari hasil perhitungan ternyata sub sektor Industri Besar dan Sedang memegang sumbangan yang besar dalam sektor Industri bila dibandingkan dengan Sub sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga.

Searah dengan kebijaksanaan Pemerintah yang tercantum dalam GBHN dimana Pembangunan pada Repelita III bertujuan meningkatkan sektor Industri yang ditunjang oleh sektor Pertanian, dalam hal ini trend peranan sektor Industri dan Perdagangan sudah menunjukkan kenaikan. Maka hasil-hasil Pembangunan selama ini sudah terlihat dari gambaran hasil-hasil penghitungan PDRB.

Sektor Pemerintahan perannya relatif tidak banyak berubah yaitu hanya sekitar 10—12%, namun sumbangan sektor ini terhadap PDRB tidak dapat dikatakan kecil.

Rata-rata kenaikan per tahun pada sektor Pemerintahan atas dasar harga berlaku sebesar 24% dan atas dasar harga konstan sebesar 8,1%.

Apabila diperhatikan dengan rata-rata kenaikan PDRB secara keseluruhan tidak banyak berbeda, dengan kata lain rata-rata kenaikan pada sektor Pemerintahan sejalan dengan rata-rata kenaikan PDRB.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi selama periode 1975—1982 perannya relatif stabil yaitu antara 6—7,5% menurut harga berlaku dan antara 5,9—7,4% menurut harga konstan.

Indeks perkembangan tahun 1982 menurut harga berlaku menunjukkan sebesar 530% dan menurut harga konstan sebesar : 200%. Rata-rata kenaikan sejak 1975—1982 sebesar 10,6%.

Sektor jasa-jasa di Propinsi Jawa Timur perannya berkisar antara 2—2,46% sedikit dibawah peranan jasa-jasa dalam PDRB Indonesia yang terletak antara 2,5—3,0%.

Walaupun perannya kecil apabila dilihat nilai PDRB sektor jasa mengalami perubahan yang cukup besar dimana pada tahun 1975 menunjukkan sebesar 43 milyar rupiah maka pada tahun 1982 menjadi 184 milyar rupiah menurut harga berlaku, sedangkan menurut harga konstan tahun 1982 menunjukkan sebesar 68 milyar rupiah.

Sektor sewa rumah perannya sedikit menurun pada harga berlaku yaitu 2,33% menjadi 1,96%, sedangkan menurut harga konstan pada tahun 1982 menunjukkan relatif sama.

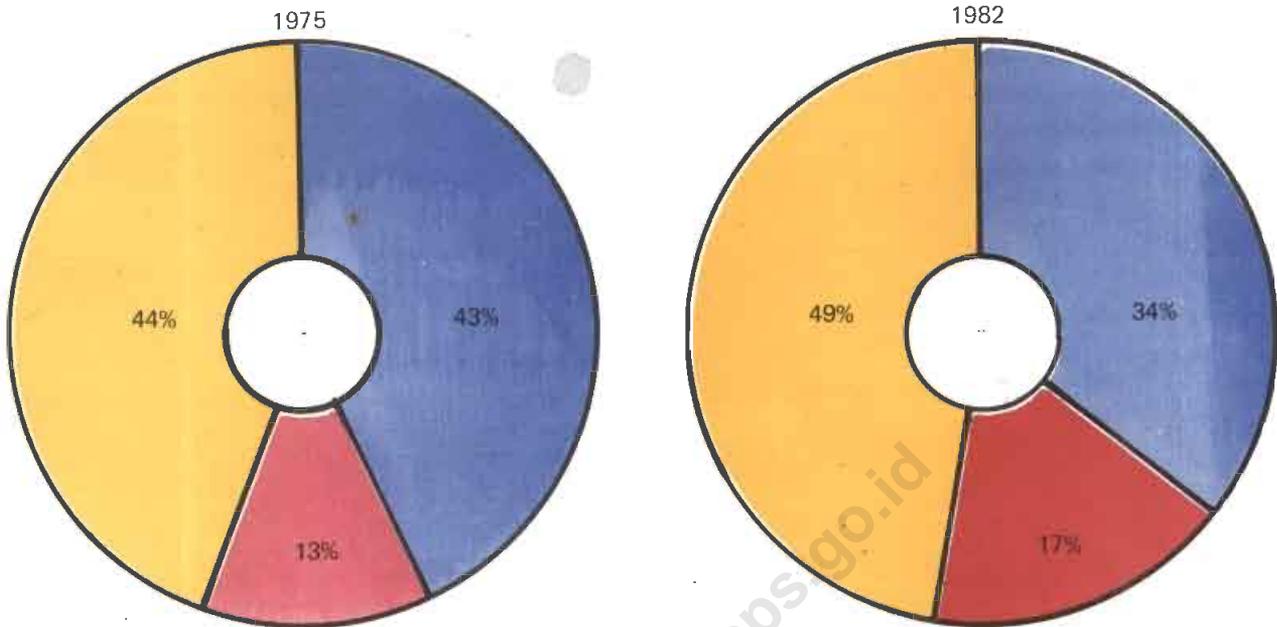
Nilai absolut sewa rumah atas dasar harga berlaku tahun 1975 s/d 1982 naik cukup tinggi yaitu sekitar 44 milyar rupiah pada tahun 1975 menjadi 165 milyar rupiah pada tahun 1982. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya selama periode 1975 s/d 1982 perannya tetap yaitu sekitar 1,3 menjadi 1,7%.

Sektor Bangunan dalam PDRB Jawa Timur mempunyai peranan relatif kecil, tahun 1975 sebesar 0,72% dan tahun 1982 menjadi 0,94% menurut perhitungan atas dasar harga berlaku dan menjadi 1,14% menurut harga konstan.

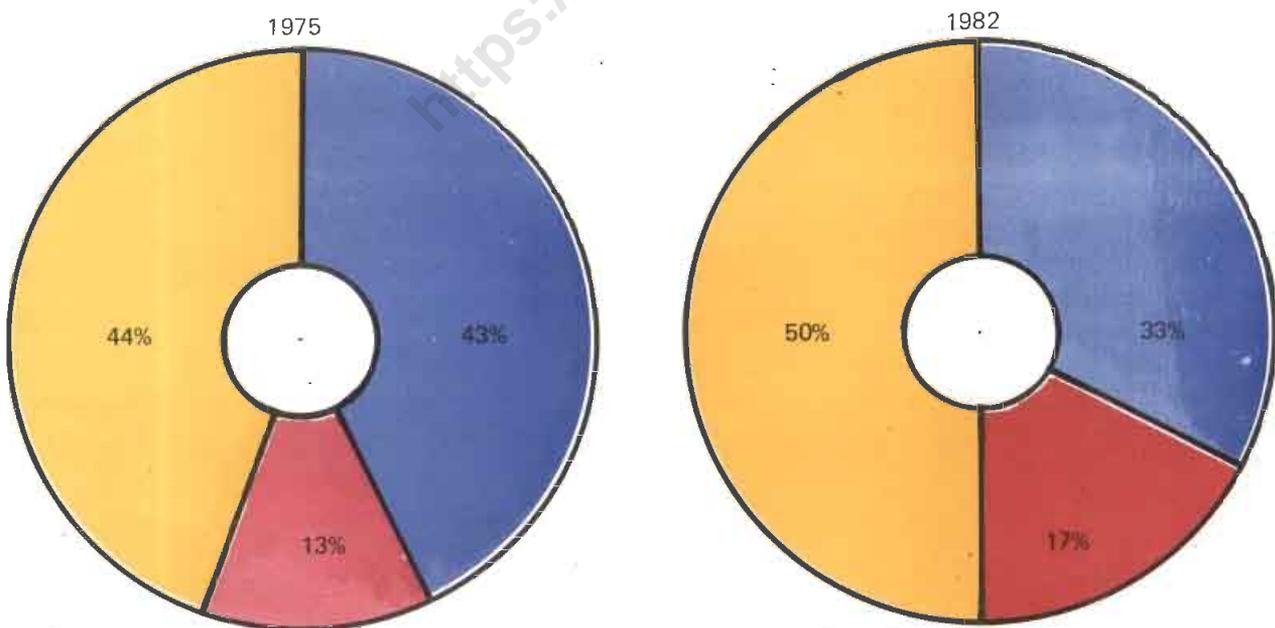
Nilai tambah sektor Bangunan mencakup bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal seperti jalan, jembatan, pembuatan saluran irigasi dan sebagainya.

Sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai distribusi persentase yang berubah-ubah sesuai dengan kegiatan sektor ini yang meliputi Pertambangan, Penggalian, Pembuatan garam rakyat. Sektor ini mempunyai peranan yang juga relatif kecil karena kegiatan eksplorasi minyak bumi yang sudah tidak ekonomis bahkan akhir-akhir ini sudah tidak berproduksi lagi. Nilai tambah penggaraman rakyat juga cukup rendah karena usaha penggaraman yang dikelola oleh PN Garam dan perusahaan lainnya dimasukkan ke sektor Industri. Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian sekitar 0,20—0,27% kecuali untuk tahun 1976 dan tahun 1977 masing-masing mencapai 0,42% dan 0,37% menurut harga berlaku sedangkan menurut harga konstan masing-masing mencapai 0,46% dan 0,42%.

GRAFIK 3 : PERBANDINGAN SEKTORAL TAHUN 1975 DAN 1982
ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU



GRAFIK 4 : PERBANDINGAN SEKTORAL TAHUN 1975 DAN 1982
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975



Keterangan Grafik 3 dan Grafik 4 :

-  : Sektor Primer
-  : Sektor Sekunder
-  : Sektor Tertiar

4.3. Indeks Harga Implisit

Perbandingan nilai produk atas dasar harga berlaku dan produk atas dasar harga konstan dinamakan indeks implisit.

Indeks implisit dapat menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi selama satu periode.

Dalam penghitungan PDRB yang dihitung setiap tahun, gambaran inflasi tersebut menunjukkan kenaikan tingkat harga selama periode satu tahun. Maka inflasi yang terjadi adalah inflasi tahunan berbeda dengan inflasi yang biasa digunakan Pemerintah yaitu indikator Indeks 9 Bahan Pokok, Indeks Biaya Hidup / Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar dan bermacam-macam Indeks harga lainnya, yang biasanya disajikan dalam periode yang relatif singkat kurang dari satu tahun.

Penghitungan PDRB secara sektoral sudah merangkum semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Berbagai tingkat harga telah dipergunakan dalam menilai produk setiap sektor. Dengan demikian indeks harga implisit secara keseluruhan yang didasarkan pada PDRB lebih mencerminkan gabungan berbagai harga dari seluruh sektor kegiatan perekonomian.

TABEL 4 : IHK DI SURABAYA (JATIM) DAN INDEKS IMPLISIT PDRB JATIM TAHUN 1975 — 1982

Tahun	I H K	I H I	Inflasi menurut	
			I H K	I H I
1	2	3	4	5
1975	100	100	—	—
1976	116,44	114,67	16,44	14,67
1977	127,63	124,95	9,61	8,96
1978	132,88	133,57	4,11	6,90
1979	164,16	168,25	23,54	25,96
1980	202,43	207,49	23,31	23,32
1981	221,13	235,28	9,24	13,39
1982	242,89	258,99	9,84	10,08

Apabila diamati lebih lanjut antara Indeks Harga Implisit (IHI) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Surabaya yang mewakili inflasi Jawa Timur keduanya menunjukkan perbedaan yang tidak berarti bahkan indeks tahun 1980 menunjukkan sama yaitu sekitar 23,31. Dengan penggunaan tahun dasar yang sama Indeks Harga Konsumen maupun Indeks Harga Implisit dapat diperbandingkan.

IHK berturut-turut dari tahun 1975 s/d 1982 yaitu : 100, 116, 128, 132, 164, 202, 221 dan 243 sedangkan IHI tahun 1975 s/d 1982 yaitu : 100, 115, 125, 134, 168, 207, 235 dan 259.

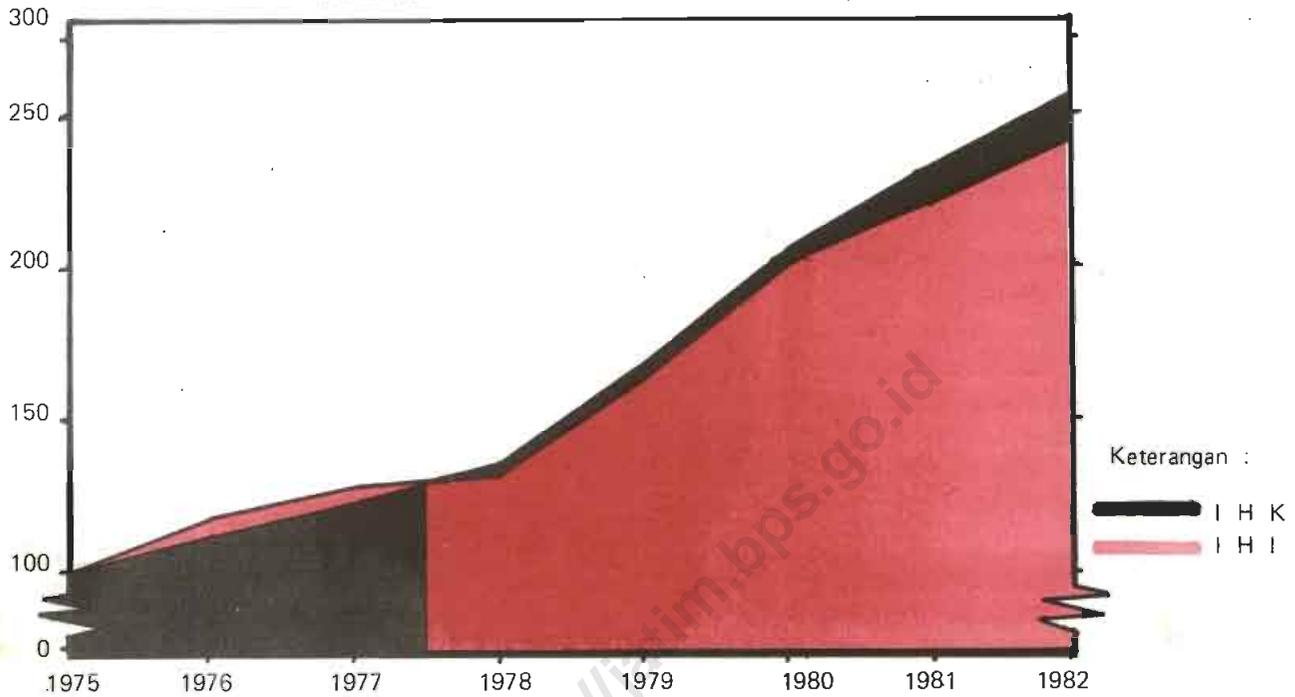
Rata-rata tingkat inflasi per tahun sejak 1975 s/d 1982, IHK menunjukkan 13,73% dan IHI sebesar 14,75% IHI sedikit lebih tinggi dari IHK.

Perhitungan inflasi untuk IHK tahun 1976 s/d 1982 menunjukkan sebesar 16,44%, 9,61%, 4,11%, 23,54%, 23,31%, 9,24% dan 9,84% sedangkan IHI berturut-turut sebesar 14,67%, 8,96%, 6,90%, 25,96%, 23,32%, 13,39% dan 10,08%.

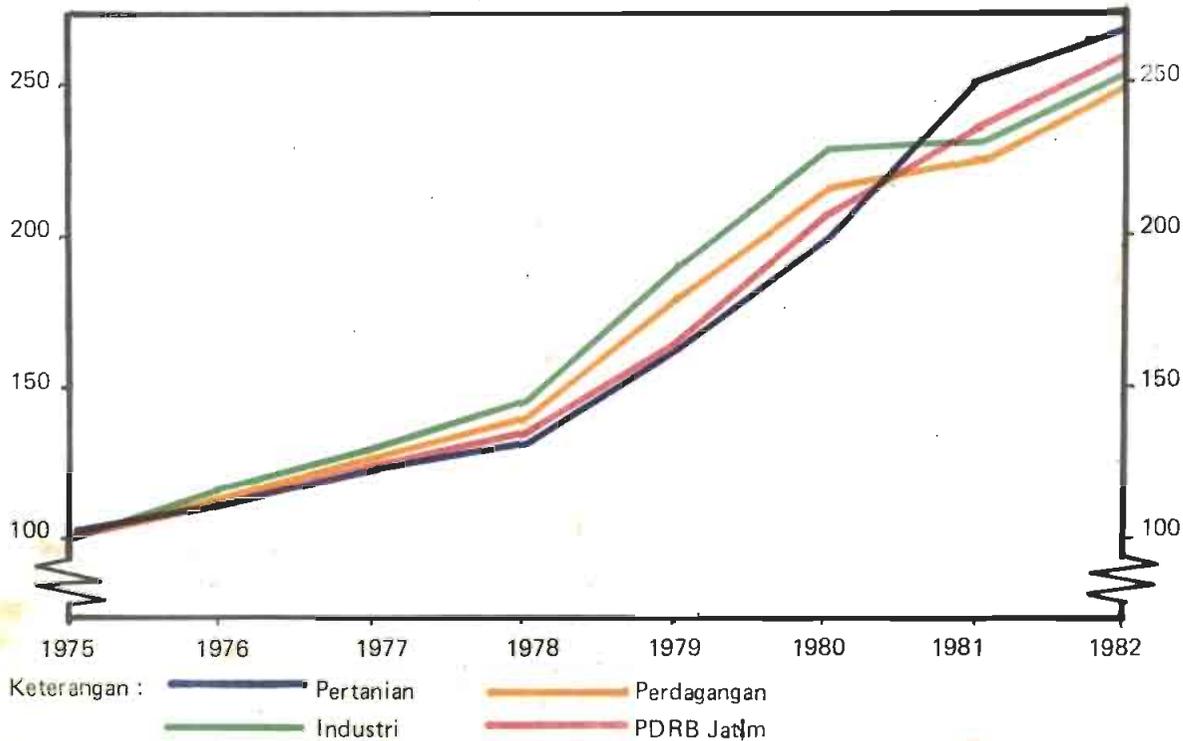
Apabila diamati lebih lanjut IHI tahun 1982 dari setiap sektor mempunyai indeks yang beraneka ragam, sektor-sektor yang menunjukkan berurutan dari IHI tertinggi hingga terendah yaitu : Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 284,55, Jasa-jasa 270,47, Pertanian 269,11, Pengangkutan dan Komunikasi 265,31, Industri

Pengolahan 256,79, Pemerintah 253,78, Perdagangan, Hotel dan Restoran 253,31, Pertambangan dan Peggalian 219,71, Sewa rumah 217,03, Bangunan 212,00, Listrik, Gas dan Air 206,58.

GRAFIK 5 : INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DAN INDEKS HARGA IMPLISIT (IHI) PDRB JAWA TIMUR



GRAFIK 6 : INDEKS IMPLISIT SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PDRB



4.4. Pertumbuhan dan laju perkembangan PDRB Jawa Timur

4.4.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan perekonomian Jawa Timur hasil perhitungan PDRB 1975—1982 atas dasar harga konstan '75 menunjukkan rata-rata 8,13% per tahun. Apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional 7,10%, pembangunan di Jawa Timur ternyata lebih pesat. Dibandingkan pembangunan secara Nasional, maka pembangunan di Jawa Timur telah diatas harapan Nasional dimana dalam Repelita III pertumbuhan perekonomian ancer-ancer sekitar 6,5% per tahun. Kalau diperhitungkan rata-rata pertumbuhan selama 1975—1981 terdapat beberapa sektor yang kenaikannya diatas 10% yaitu untuk sektor-sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,70%, Listrik, Gas dan Air 18,69%, Bangunan 16,23%, Industri Pengolahan 12,66%, Perdagangan, Hotel dan Restoran 11,31%, Pengangkutan dan Komunikasi 10,61%, Perbankan 10,53% sedangkan sektor-sektor yang pertumbuhannya dibawah 10% yaitu Pemerintahan sebesar 8,23%, Sewa rumah 8,18%, Jasa-jasa 6,62% dan Pertanian 4,08%.

Diamati lebih lanjut ternyata sektor yang tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dan terendah sektor Pertanian. Walaupun pertumbuhan pada sektor Pertanian tidak sepesat sektor sektor lainnya, tetapi nilai absolut sektor Pertanian tetap tinggi karena peranan sektor Pertanian di Jawa Timur merupakan yang terbesar. Sangat beruntung karena pertumbuhan sektor Pertanian masih diatas pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan riil Jawa Timur secara keseluruhan dapat dilihat dari kenaikan riil PDRB pertahun. Adapun kenaikan riil per tahun dari tahun 1976 s/d 1982 berturut-turut yaitu sebesar 5,25%, 10,31%, 9%, 6,79%, 12,72%, 10,96% dan 1,89%, ternyata kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 1980.

Apabila diperhatikan kenaikan PDRB Jawa Timur persektor atas dasar harga konstan sebagai berikut : Pertumbuhan sektor Pertanian selama periode 75—81 sebesar 5,69%, pada tahun 1982 ternyata menurun sehingga mempengaruhi pertumbuhan rata-rata tahun 1975 s/d 1982, ini diakibatkan adanya penurunan produksi tanaman hortikultura dan produksi tanaman perkebunan besar.

Sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai kenaikan riil tertinggi yaitu sebesar 19,70%, ini disebabkan adanya kenaikan produksi pada tahun 1976, tahun-tahun sesudahnya cenderung stabil.

Sektor Industri tumbuh dengan mantap secara rata-rata sebesar 12,66%. Dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan rata-rata diatas 16% kecuali tahun 1976 dan tahun 1982 kenaikan rata-rata hanya sekitar 3%.

Pertumbuhan yang tinggi tersebut diakibatkan adanya perusahaan yang menanamkan modal di Jawa Timur baik dana PMA maupun PMDN. Peningkatan dibidang Industri Kecil dan Kerajinan yang ditunjang dengan modal KIK dan KMKP di Jawa Timur mendapat perhatian khusus pemerintah daerah maupun dunia perbankan di Jawa Timur. Demikian juga sektor Listrik, Gas dan Air Minum mendapat perhatian dari Pemerintah sehingga sektor inipun tumbuh dengan baik.

Adanya kenaikan pada sektor Listrik, Gas dan Air Minum ini akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya terutama sektor Industri besar dan sedang karena untuk mencapai produktifitas yang tinggi perlu menggunakan teknologi yang tinggi pula.

Pengaruh adanya pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air Minum tidak hanya dirasakan oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan bidang ekonomi saja, Dampak positif terasa pula pada masalah sosial, budaya, kesehatan, keamanan dan aspek sosial lainnya.

Sektor Bangunan rata-rata kenaikan riil per tahun sebesar 16,23%, kenaikan tertinggi sebesar 41,40% dicapai pada tahun 1976 dan sebesar 22,31% dicapai pada tahun 1980. Kenaikan pada sektor bangunan akan meningkatkan sektor-sektor lainnya seperti prasarana jalan, Jembatan dan lain-lainnya, sehingga akan memper-lancar arus perekonomian secara umum.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran rata-rata kenaikan menurut harga berlaku tahun 1975—1982 sebesar 27,42%. Kenaikan tertinggi pada tahun 1978—1979 dan 1979—1980. Sistem ini sudah barang tentu pengaruh adanya gejolak harga masih terkandung didalamnya. Oleh karena itu dengan melihat pertumbuhan riil rata-rata tahun 1975—1982 sebesar 11,31%, yang terbesar pada tahun 1979—1980 dan 1980—1981 yaitu masing-masing sebesar 17,47% dan 14,98%, akan mampu memberikan gambaran perkembangan sektor ini secara nyata.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi rata-rata pertumbuhan riilnya diatas 10% yaitu 10,61%. Kenaikan riil setiap tahun berkisar antara 6—10% kecuali untuk tahun 1980—1981 sangat tinggi sebesar 27,92%. Kenaikan pada sektor Pengangkutan dapat terjadi karena adanya pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya seperti sektor Pertanian dan Industri yang menggunakan jasa angkutan dalam memasarkan hasil produksinya, disamping jasa angkutan yang dibutuhkan oleh penduduk baik dalam rangka kelancaran kegiatan ekonomi maupun kegiatan non-ekonomis lainnya oleh rumah tangga.

TABEL 5 : RATA-RATA KENAIKAN PDRB TAHUN 1975—1982
MENURUT HARGA KONSTAN 1975 (%)

Lapangan Usaha	1975— 1976	1976— 1977	1977— 1978	1978— 1979	1979— 1980	1980— 1981	1981— 1982	Ratarata '75—'82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Pertanian	3,40	6,81	8,07	6,03	7,63	2,18	-5,58	4,08
2 Pertambangan dan Peng- galian	146,98	0,87	-25,94	-1,56	3,82	-4,70	18,45	19,70
3 Industri	2,85	12,72	14,39	8,62	24,64	22,83	2,69	12,66
4 Listrik, Gas dan Air Minum	6,18	9,34	21,80	31,45	18,03	24,17	19,86	18,69
5 Bangunan	41,40	6,77	0,23	12,39	22,31	17,24	13,24	16,23
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,08	14,29	5,87	10,22	17,47	14,98	7,24	11,31
7 Pengangkutan dan Ko- munikasi	6,94	6,09	10,76	6,01	3,19	27,92	10,37	10,61
8 Perbankan	7,30	7,82	14,00	2,25	5,68	11,81	24,85	10,53
9 Sewa Rumah	8,10	8,13	8,15	8,18	8,20	8,23	8,24	8,18
10 Pemerintahan	0,67	18,62	13,66	1,22	13,63	9,08	0,72	8,23
11 Jasa-jasa	7,26	6,07	5,81	3,86	8,29	8,78	6,29	6,62
P D R B	5,25	10,31	9,00	6,79	12,72	10,96	1,89	8,13

Sektor Perbankan mempunyai peranan kurang lebih 1,3% dalam PDRB Jawa Timur berdasarkan harga konstan 1975. Rata-rata pertumbuhan riil sebesar 10,53% dengan selang 2,25%—24,85%. Pertumbuhan riil 1978—1979 terendah yaitu sebesar 2,25%. Rata-rata pertumbuhan yang masih dipengaruhi inflasi setinggi 28,91% dengan selang 2,37%—45,61%.

Sektor Sewa rumah tahun 1975—1982 mempunyai pertumbuhan riil relatif stabil yaitu sebesar 8,18%, rata-rata pertumbuhan berdasar harga berlaku cukup besar yaitu 21,01%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan yang cukup besar pada tahun 1979—1980 dan 1980—1981 masing-masing sebesar 30,71% dan 26,30%.

Perkembangan dan pertumbuhan sektor Pemerintahan sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk diketahui bahwa dalam rangka usaha peningkatan pemberian pelayanan Pemerintah kepada seluruh warga Jawa Timur tercermin adanya peningkatan riil sektor Pemerintahan. Pada periode 1975—1982 sektor ini menunjukkan rata-rata kenaikan riil sebesar 8,23%.

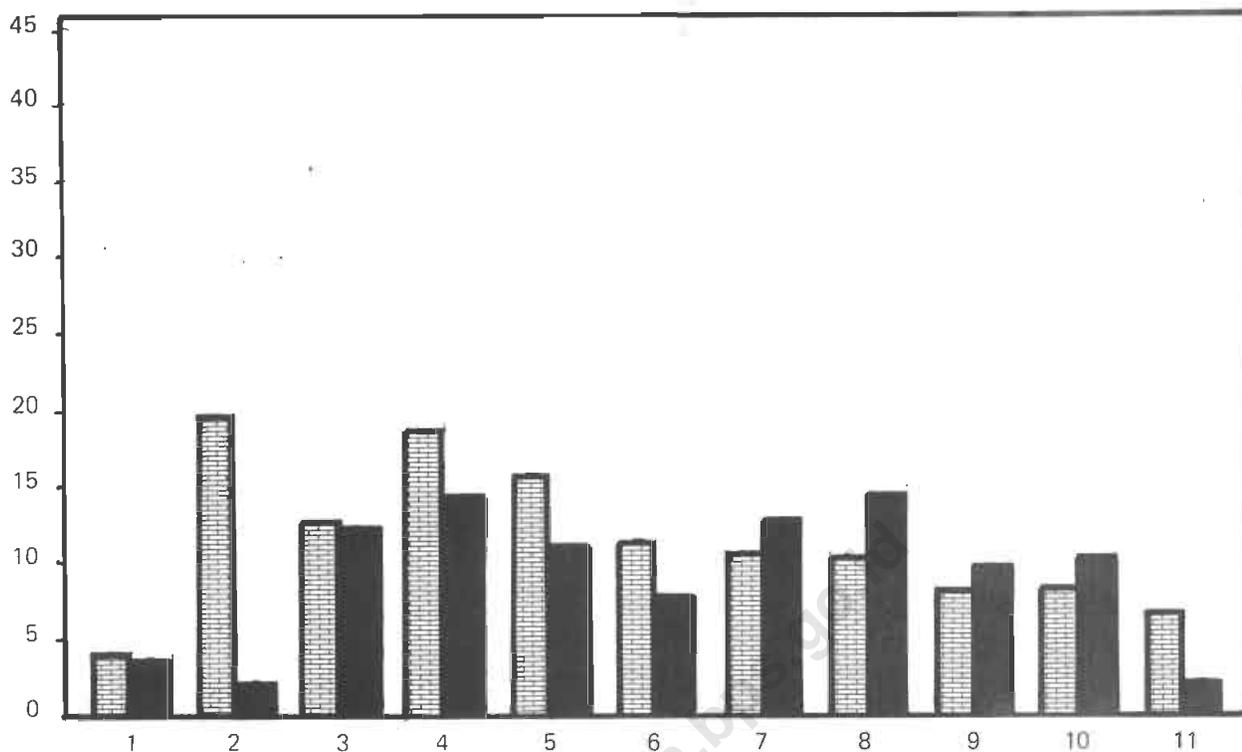
TABEL 6 : RATA-RATA KENAIKAN PDRB TAHUN 1975—1982
MENURUT HARGA BERLAKU (%)

Lapangan Usaha	1975— 1976	1976— 1977	1977— 1978	1978— 1979	1979— 1980	1980— 1981	1981— 1982	Ratarata '75—'82
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Pertanian	15,91	16,21	15,08	31,54	32,98	28,43	1,56	20,24
2 Pertambangan dan Peng- galian	156,08	5,68	-14,40	34,83	34,56	-15,88	32,28	33,31
3 Industri	21,18	25,52	26,90	43,34	50,42	24,11	12,48	29,14
4 Listrik, Gas dan Air Minum	30,34	20,04	27,23	7,97	53,62	37,92	48,12	32,18
5 Bangunan	46,67	12,75	8,96	47,24	48,65	19,94	23,75	29,71
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	25,35	26,96	15,21	43,47	41,32	19,76	19,89	27,42
7 Pengangkutan dan Komunikasi	28,12	10,16	13,87	33,00	40,31	33,13	32,72	27,33
8 Perbankan	45,61	17,74	2,37	28,42	44,72	31,04	32,44	28,91
9 Sewa Rumah	17,44	12,96	12,10	22,66	30,71	26,30	24,91	21,01
10 Pemerintahan	17,22	27,73	19,70	22,14	39,64	28,61	10,72	23,68
11 Jasa - jasa	29,03	10,32	9,15	29,48	36,06	29,11	19,82	23,28
P D R B	20,69	20,20	16,52	34,51	39,01	25,82	12,15	24,13

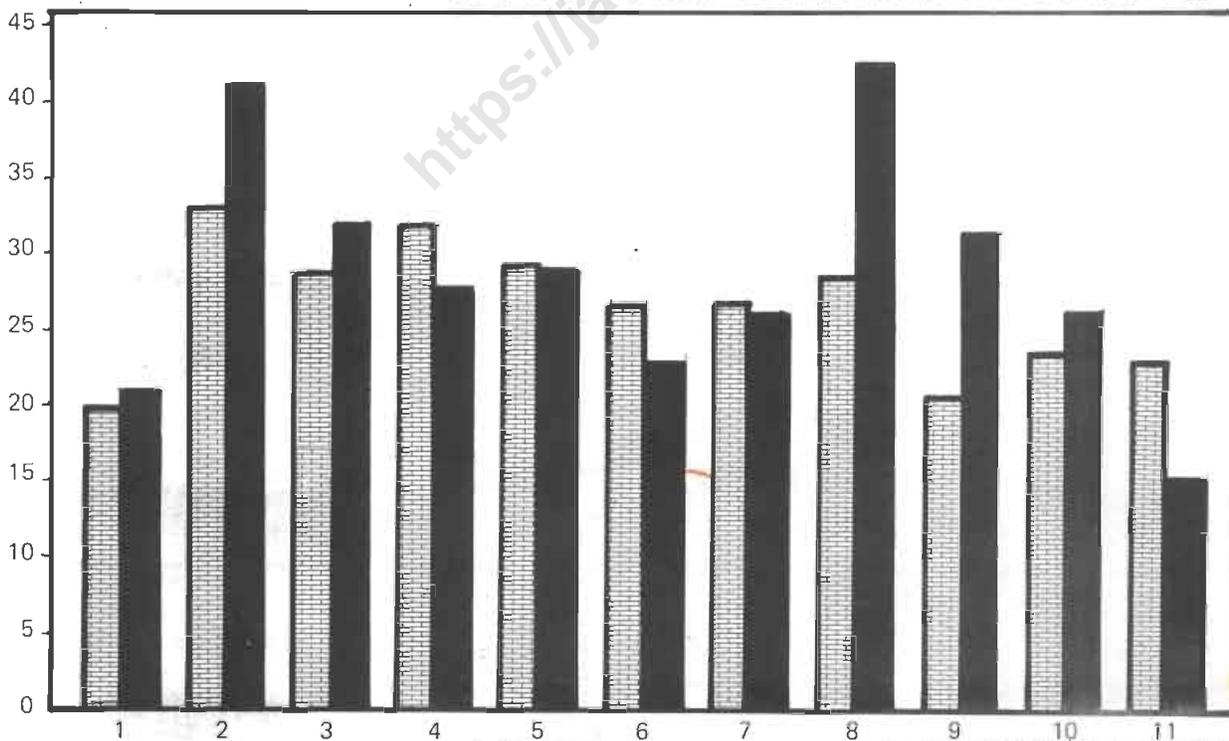
Sektor Jasa-jasa di Jawa Timur walaupun mempunyai peranan kecil terhadap PDRB Jawa Timur, akan tetapi pertumbuhannya cukup mantap rata-rata sebesar 6,62% pada periode 1975—1982.

Dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang hanya 1,49%, pertumbuhan pada sektor ini jauh di atasnya. Pertumbuhan sektor Jasa di Jawa Timur cukup tinggi apabila dibandingkan dengan angka Nasional yang hanya sekitar 2,31%. Dengan demikian adanya pertumbuhan yang tinggi pada sektor jasa dapat dikatakan adanya kemajuan pada taraf hidup masyarakatnya baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya.

GRAFIK 7 : PERBANDINGAN RATA-RATA LAJU PERKEMBANGAN JAWA TIMUR DAN INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN SELAMA TAHUN 1975-1982



GRAFIK 8 : PERBANDINGAN RATA-RATA LAJU PERKEMBANGAN JAWA TIMUR DAN INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU SELAMA TAHUN 1975-1982

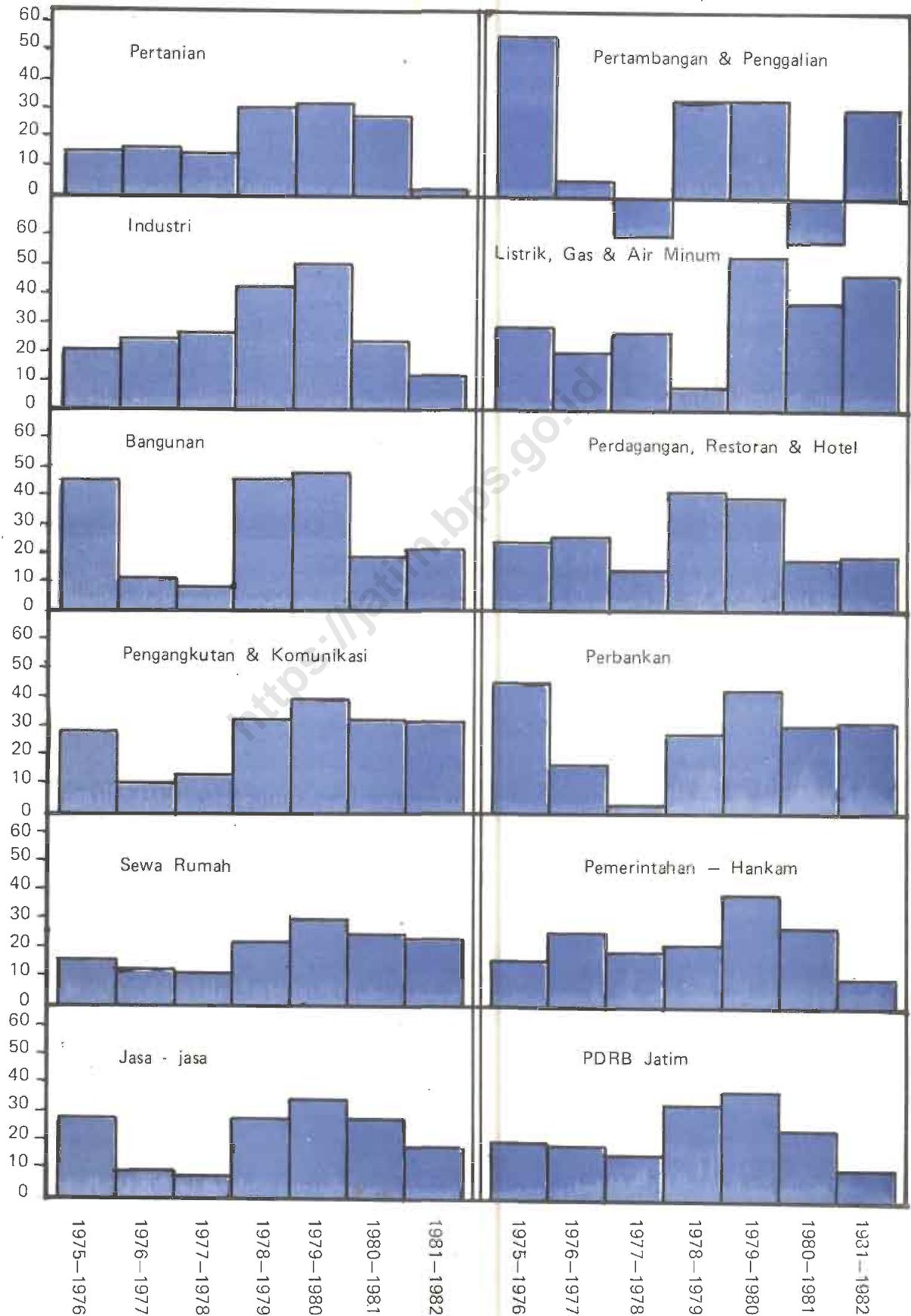


Keterangan Grafik 7 dan 8 :

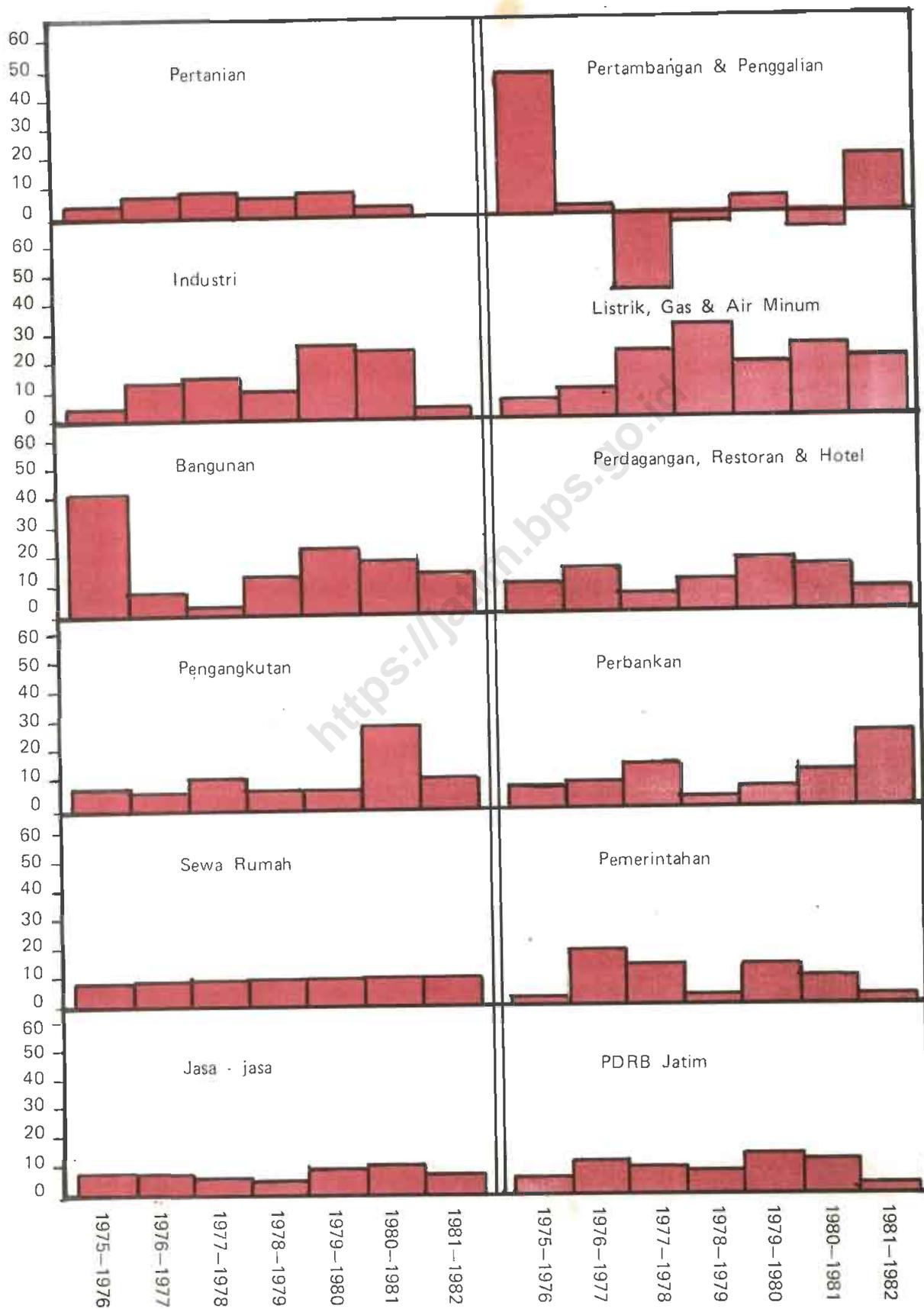
 - Jawa Timur
 - Indonesia

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Pertanian | 7. Pengangkutan & Komunikasi |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 8. Perbankan |
| 3. Industri | 9. Sewa Rumah |
| 4. Listrik, Gas & Air Minum | 10. Pemerintahan |
| 5. Bangunan | 11. Jasa - jasa |
| 6. Perdagangan, Hotel, Restoran | |

GRAFIK 9 : PERBANDINGAN KENAIKAN PDRB PER SEKTOR SETIAP TAHUN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1975-1982



GRAFIK 10 : PERBANDINGAN KENAIKAN PDRB PER SEKTOR SETIAP TAHUN ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75 TAHUN 1975-1982



4.4.2. Laju Perkembangan PDRB

PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan dapat mencerminkan adanya kenaikan tingkat produksi dari setiap sektor.

Hasil-hasil pembangunan selama ini dapat diukur secara kuantitatif dengan angka-angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Indeks Perkembangan PDRB Jawa Timur menurut:	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Harga Berlaku	100,00	120,69	145,06	169,02	227,36	316,05	397,66	445,99
Harga Konstan	100,00	105,25	116,09	126,54	135,13	152,32	169,01	172,20
Selisih Angka *)	—	15,44	28,97	42,48	92,23	163,73	228,65	273,79

*) Selisih angka ini menunjukkan area gejolaknya, harga pada tahun yang bersangkutan, dimana terbukti makin lama semakin melebar.

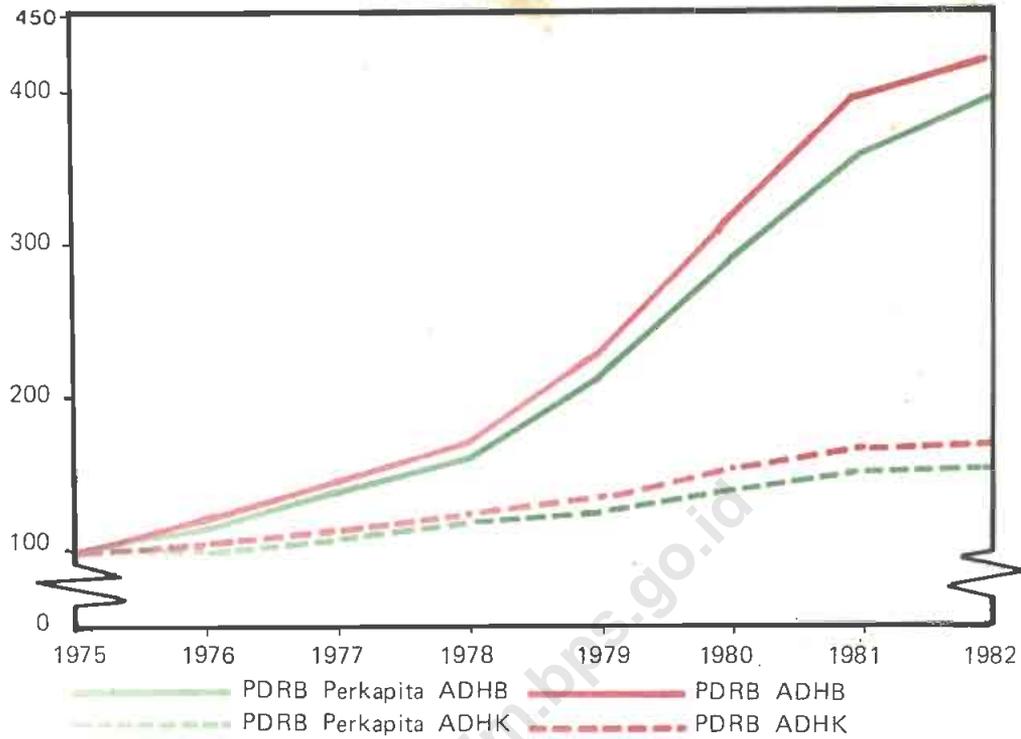
TABEL 7 : PDRB PERKAPITA DI JAWA TIMUR
TAHUN 1975 - 1982 (RUPIAH)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB Perkapita	Indeks	PDRB Perkapita	Indeks
1	2	3	4	5
1975	69.892	100,00	69.892	100,00
1976	83.111	118,91	72.477	103,70
1977	98.427	140,83	78.772	112,71
1978	113.001	161,68	84.601	121,05
1979	149.769	214,29	89.015	127,36
1980	205.128	293,49	98.860	141,45
1981	254.302	363,85	108.085	154,65
1982	281.020	402,08	108.506	155,25

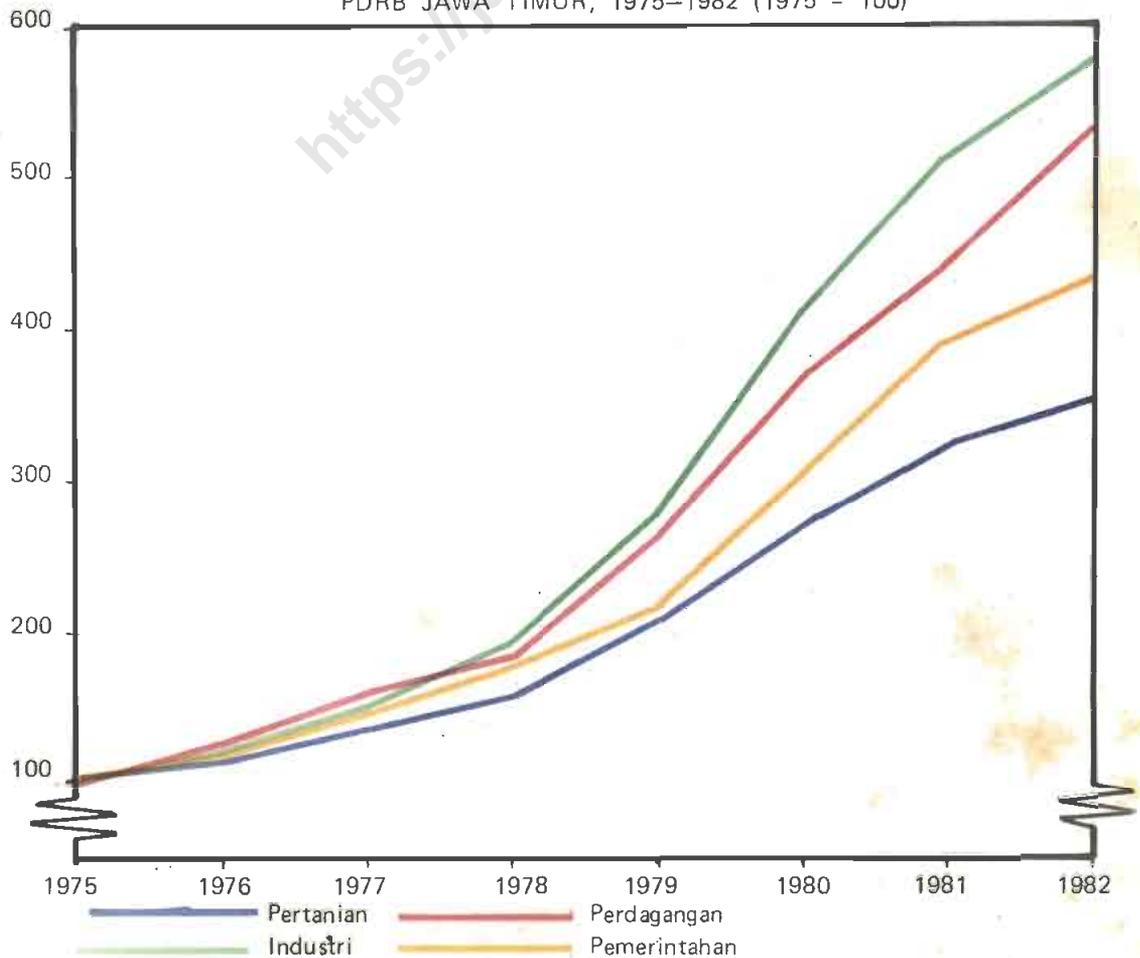
Dengan melihat indeks perkembangan setiap tahun menggambarkan adanya kenaikan riil secara sektoral maupun menyeluruh yang mantap.

Ditinjau dari kenaikan sektoral atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi karena masih dipengaruhi adanya kenaikan harga. Secara agregatif PDRB Jawa Timur tahun 1982 telah menunjukkan kenaikan 1,7 kali tahun 1975 dengan demikian produksi pada tahun 1982 naik 1,7 kali produksi tahun 1975, bila dibandingkan dengan perkembangan penduduk yang hanya naik 11,11% maka jelas pembangunan memberikan hasil yang nyata terhadap tingkat kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Jawa Timur.

GRAFIK 11 : INDEKS PERKEMBANGAN PDRB DAN PDRB PER KAPITA JAWA TIMUR MENURUT HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 1975. TAHUN 1975 - 1982



GRAFIK 12 : INDEKS PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR UTAMA PDRB JAWA TIMUR, 1975-1982 (1975 = 100)



PDRB Jawa Timur yang mencakup sebelas sektor terdapat beberapa sektor yang memiliki peranan besar seperti sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pemerintahan. Mengingat sifat dan andilnya dalam bidang ekonomi berlainan sesuai dengan fungsinya, maka perkembangan dan pertumbuhannya pada umumnya tidak mutlak setingkat dengan peranannya. Sebagai contoh periode 1975—1982 Sektor Pertanian yang memiliki peranan sekitar 33% produksinya naik 31%, peranan sektor Perdagangan sekitar 25% produksinya naik 110%, peranan sektor Industri sekitar 15% produksinya naik 121%, peranan sektor Pemerintahan sekitar 11% produksinya sekitar 72%.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan produksi dibawah kenaikan PDRB Jawa Timur ada 2 sektor yaitu sektor Pertanian dan Jasa-jasa.

Khusus sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman bahan Makanan, Perkebunan Besar dan Kehutanan masing-masing memiliki kenaikan per tahun kurang dari 4%, bahkan sub sektor Perkebunan Besar justru terjadi penurunan dari tahun-ketahun kecuali pada tahun 1977 naik hanya sekitar 3%.

Indeks Perkembangan Total PDRB Jawa Timur perkapita menunjukkan perbedaan/selisih yang semakin lama semakin besar, dapat diambil kesimpulan bahwa makin tinggi selisih kedua indeks makin besar pula gejala-gejala harga yang terjadi pada sektor-sektor yang bersangkutan, perhatikan tabel 8. Selain itu tingkah laku harga tersebut juga dapat terbaca pada indeks implisit (Tabel 4) khususnya apabila diperhatikan selama tahun 1975 ke tahun 1982.

Sektor-sektor yang mengalami inflasi yang tinggi selama 7 tahun yang lalu terjadi pada sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Pengangkutan, Jasa-jasa, Pertanian, Perbankan dan sektor Industri Pengolahan

TABEL 8 : INDEKS PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL
MENURUT HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 1975
TAHUN 1982

S e k t o r	Indeks Perkembangan		Selisih Angka
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
1 Pertanian	353,63	131,41	222,22
2 Pertambangan dan Penggalian	467,66	212,86	254,80
3 Industri	580,99	226,25	354,74
4 Listrik, Gas dan Air Minum	674,53	326,52	348,01
5 Bangunan	585,41	276,14	309,27
6 Perdagangan	533,75	210,71	323,04
7 Pengangkutan	529,84	199,71	330,13
8 Perbankan	566,06	198,94	367,12
9 Sewa Rumah	376,17	173,32	202,85
10 Pemerintahan	435,28	171,52	263,76
11 Jasa - jasa	423,47	156,57	266,90
P. D R B Jawa Timur	445,99	172,20	273,79

Keterangan : Selisih angka ini menunjukkan perbedaan nilai/harga atau perubahan harga pada tahun dasar dan tahun berlaku 1982.

4.5. PDRB dan Pendapatan Per-Kapita

Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh mencerminkan adanya perkembangan dan pertumbuhan yang tidak mengecewakan untuk periode tahun 1975—1982 di Jawa Timur. Pertumbuhan riil yang mencapai 8—13% per tahun, relatif menggembirakan dibandingkan laju pertumbuhan penduduk yang masih berkisar 1—5% per tahun. Sementara itu pula pendapatan perkapita pun menunjukkan adanya gejala meningkat selama 7 tahun tersebut. Untuk tahun 1975 PDRB perkapita dan pendapatan per-kapita sebesar Rp 69.892,— dan Rp 64.210,—, sementara tahun 1982 meningkat menjadi masing-masing Rp. 281.448,— dan Rp. 257.448,—. Pendapatan selama itu telah menjadi 4 kali lipat menurut harga berlaku 1982 dan naik 50% nya terhadap hitungan harga konstan 1975.

4.5.1. Perbandingan sederhana dengan angka Nasional

Angka-angka PDRB Jawa Timur apabila dibandingkan dengan PDB Indonesia ternyata PDRB Jawa Timur secara keseluruhan untuk tahun 1975 dan tahun 1982 pada harga berlaku menunjukkan peranan yang tetap yaitu sekitar 14,00% terhadap PDB Indonesia. Sementara perbandingan penduduk Jawa Timur masih tetap sebesar 20% terhadap penduduk Indonesia. Dari ratio tersebut terbukti bahwa wilayah Jawa Timur yang hanya 2,5% nya Indonesia, memiliki potensi yang besar baik dilihat dari segi ekonomi maupun manusianya. Diharapkan pada masa yang akan datang PDRB Jawa Timur dapat menjadi 20% PDB Nasional yang berarti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

TABEL 9 : PERANAN SEKTOR-SEKTOR TERTENTU
TERHADAP PDB INDONESIA

S e k t o r	Peranan sektor ini terhadap PDB Indonesia (%)		
	1975	1982	Keterangan
1	2	3	4
— Pertanian	21,01	18,24	Turun
— Industri	19,68	16,73	Turun
— Perdagangan	16,78	23,44	Naik
— Jasa-jasa	6,45	14,23	Naik

Tabel di atas menyatakan potensi beberapa sektor di Jawa Timur, walaupun hanya memiliki wilayah yang sangat kecil (2,5%). Peranan sektor tersebut terus berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan dinamika pembangunan regional yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Perdagangan terus meningkat, demikian pula Jasa-jasa. Disini jelas bahwa tidak mutlak perbandingan penduduk selalu sejalan dengan perbandingan PDRB, karena pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diatas pertumbuhan Nasional dan secara umum kemampuan Jawa Timur sangat tinggi.

TABEL 10 : PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN PDB INDONESIA
MENURUT LAPANGAN USAHA DAN HARGA BERLAKU
TAHUN 1975 & 1982

S e k t o r	1975			1982		
	PDRB Jatim (milyard)	PDB Indonesia (milyard)	% Jatim / Indonesia	PDRB Jatim (milyard)	PDB Indonesia (milyard)	% Jatim / Indonesia
1	2	3	4	5	6	7
1 Pertanian	808,23	4.003,4	20,19	2.858,17	15.668,30	18,24
2 Pertambangan/Penggalian	3,73	2.484,8	0,15	17,44	707,8	0,11
3 Industri	221,14	1.123,7	19,68	1.284,80	7.680,7	16,73
4 Listrik, Gas dan Air Minum	8,34	69,8	11,95	56,27	380,3	14,80
5 Bangunan	13,45	589,6	2,28	78,74	3.507,2	2,25
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	389,36	2.103,7	18,51	2.078,20	8.865,1	23,44
7 Pengangkutan dan Komunikasi	119,56	521,2	22,94	633,48	2.795,2	22,66
8 Perbankan	25,06	151,4	16,55	141,86	1.603,9	8,84
9 Sewa Rumah	43,87	257,8	17,02	165,03	1.702,6	9,69
10 Pemerintahan & Hankam	209,08	864,3	24,19	910,10	4.428,7	20,55
11 Jasa - jasa	43,43	672,8	6,46	183,93	1.292,8	14,23
Jumlah	1.885,25	12.642,5	14,91	8.407,99	59.632,6	14,10

Adanya penemuan baru sumber-sumber kekayaan alam di Propinsi-Propinsi lain yang besar manfaatnya antara lain sebagai pembangkit tenaga listrik, pemboran sumber-sumber minyak yang merupakan sumber devisa negara dan penyebab-penyebab lain naiknya PDB Indonesia sementara Jawa Timur dengan luas 2,5% nya Indonesia yang kemungkinan untuk dikembangkan sudah terbatas. Kecuali sumber-sumber tenaga yang tersedia di Jawa Timur, dengan sendirinya produktifitas dari tenaga kerja di Jawa Timur akan lebih kecil dibandingkan produktifitas Propinsi-Propinsi lain yang mengembangkan sumber-sumber daya alam.

Walaupun dari tabel 9 PDRB Jawa Timur mengecil dibanding PDB Indonesia khususnya sektor Pertanian, tetapi potensi Jawa Timur masih cukup tangguh terbukti hingga saat ini daerah ini tetap merupakan lumbung nasional, utamanya bagi wilayah Indonesia bagian timur.

TABEL 11 : PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN PDB INDONESIA
PER KAPITA HARGA BERLAKU
1975 - 1982

Tahun	Jawa Timur (Rp)	Indonesia (Rp.)	Jawa Timur/Indonesia (%)
1	2	3	4
1975	69.892	96.803	72,20
1976	83.111	115.683	71,84
1977	98.427	138.967	70,83
1978	113.001	160.416	70,44
1979	149.769	223.887	66,89
1980	205.128	310.502	66,06
1981	254.302	360.957	70,45
1982	281.020	389.786	72,10

Apabila diperhatikan tabel 10 dimana peranan sektor-sektor terbesar di Jawa Timur tahun 1975 dan tahun 1982 terhadap PDB Nasional, sektor yang sama terdapat penurunan dan kenaikan, tidak berarti produk sektor tersebut tidak ada perkembangannya diwilayah Jawa Timur. Untuk sektor Perdagangan dan Jasa-jasa peranannya terhadap PDB Indonesia meningkat cukup tinggi yang membuktikan betapa besarnya barang-barang yang diperdagangkan yang merupakan indikator besarnya produksi sektor primer di Jawa Timur selama 7 tahun terakhir ini.

Rata-rata PDRB Perkapita Jawa Timur menurut harga berlaku tahun 1975 s/d 1982 sebesar Rp. 156.831,— sedang Nasional sebesar Rp. 171.174,—

Perkembangan PDRB perkapita Jawa Timur tahun 1982 sebesar 402 dibanding tahun 1975 sedang PDB Nasional perkapita sebesar 403. Dengan demikian PDB Nasional perkapita sejalan dengan PDRB Jawa Timur perkapita. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Ekonomi secara riil di Jawa Timur dan Nasional tidak jauh berbeda, dapat dikatakan perkembangan ekonomi Jawa Timur sejalan dengan perkembangan Ekonomi Nasional, justru Jawa Timur mempunyai pertumbuhan yang lebih besar.

TABEL 12 : PERBANDINGAN RATA-RATA PERTUMBUHAN RIIL
PDRB JAWA TIMUR DAN PDB INDONESIA

T a h u n	Pertumbuhan riil (%)	
	Jawa Timur	Indonesia
1	2	3
1975-1976	5,25	6,89
1976-1977	10,31	8,76
1977-1978	9,00	7,71
1978-1979	6,79	6,26
1979-1980	12,72	9,88
1980-1981	10,96	7,93
1981-1982	1,89	2,25
1975-1982	8,13	7,10

TABEL 13 : PERBANDINGAN RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PDRB
JAWA TIMUR DAN PDB INDONESIA
1975 - 1982 (%)

S e k t o r	PDRB Jawa Timur		PDB Indonesia	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	2	3	4	5
1 Pertanian	20,24	4,08	21,69	3,89
2 Pertambangan/Penggalian	33,31	19,70	41,52	2,18
3 Industri	29,14	12,66	32,30	12,39
4 Listrik, Gas dan Air Minum	32,18	18,69	28,18	14,46
5 Bangunan	29,71	16,23	29,47	11,13
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	27,42	11,31	23,15	7,61
7 Pengangkutan dan Komunikasi	27,33	10,61	26,85	12,84
8 Perbankan	28,91	10,53	42,79	14,43
9 Sawa Rumah	21,01	8,18	31,89	9,74
10 Pemerintahan	23,68	8,23	26,57	10,37
11. Jasa - jasa	23,28	6,62	15,55	2,31
	24,13	8,13	25,27	7,10

4.5.2. Pendapatan Regional Per Kapita

Pengertian pendapatan per kapita selama setahun yaitu Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor Jawa Timur seharusnya dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar Jawa Timur dan ditambah dengan pendapatan yang masuk ke Jawa Timur akan menghasilkan Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor dan apabila dibagi dengan penduduk pertengahan tahun akan diperoleh Pendapatan Per kapita.

TABEL 14 : PERBANDINGAN PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI JAWA TIMUR DAN INDONESIA TAHUN 1969 - 1982

T a h u n	Jawa Timur		Indonesia	
	Rupiah	Indeks	Rupiah	Indeks
1	2	3	4	5
1969	18.804	100	20.880	100
1970	23.462	125	24.811	119
1971	23.949	127	26.411	126
1972	27.747	148	31.841	153
1973	34.840	185	46.073	221
1974	44.698	238	70.987	340
1975	64.210	341	82.286	394
1976	75.969	404	99.758	478
1977	89.969	478	118.793	569
1978	103.142	549	138.340	662
1979	137.433	731	189.781	909
1980	188.951	1.005	265.358	1.271
1981	234.926	1.249	312.928	1.499
1982	257.448	1.369	337.716	1.617

Selama ini data yang keluar maupun masuk Jawa Timur sukar diperoleh maka dalam penghitungannya diasumsikan bahwa pendapatan yang masuk sama dengan pendapatan keluar wilayah Jawa Timur sehingga akhirnya Produk Domestik Regional Neto atas dasar faktor sama dengan Produk Regional Neto.

Pendapatan perkapita Jawa Timur sejak awal Pelita I hingga Pelita III menunjukkan adanya kenaikan-kenaikan yang sangat menggembirakan.

Cuplikan dari tabel 14 disajikan sejak tahun dimulainya Pelita hingga menjelang akhir Pelita III sebagai berikut :

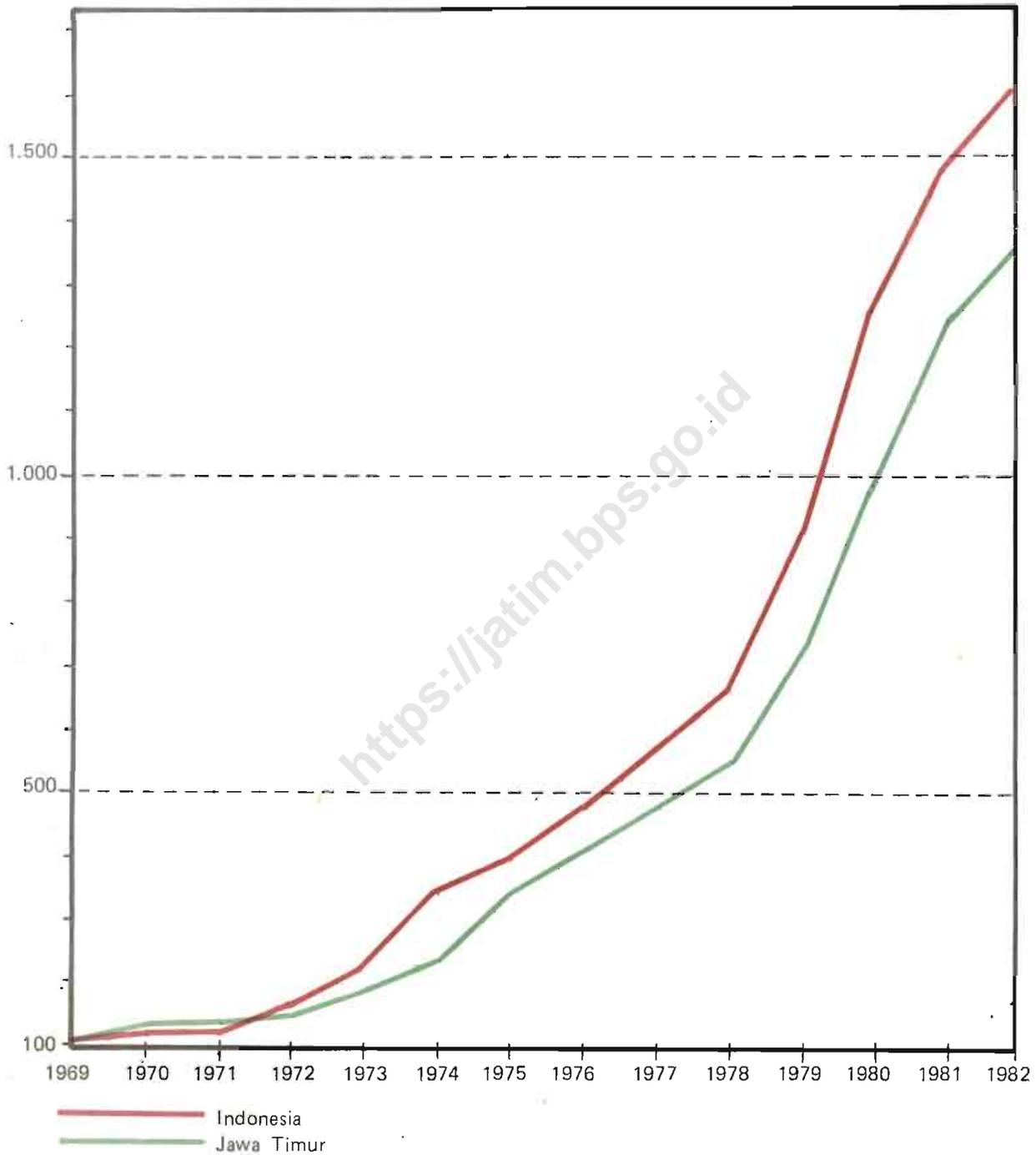
Tahun 1969 sebesar Rp.	18.804,—
Tahun 1974 sebesar Rp.	44.698,—
Tahun 1979 sebesar Rp.	137.433,—
Tahun 1980 sebesar Rp.	188.951,—
Tahun 1981 sebesar Rp.	234.926,—
Tahun 1982 sebesar Rp.	257.448,—

Apabila diamati dari tahun 1969 = 100 maka indeks tahun 1980, menjadi 1005 tahun 1981 menjadi 1249 dan tahun 1982 menjadi 1369.

Pendapatan perkapita sejak awal Pelita I hingga menjelang akhir Pelita III telah menunjukkan kenaikan yang pesat yaitu menjadi 10—14 kali lipat. Rata-rata pendapatan perkapita dalam Pelita I Rp 27.055,— Pelita II Rp 80.234,— dan akhir tahun ke empat Pelita III mencapai Rp 214.368,—

Penyajian data diatas perlu dikaitkan dengan periode pelita tahunan yang menggunakan masa waktu April—Maret (tahun anggaran), dikandung maksud untuk mendapatkan gambaran hasil kemajuan pendapatan perkapita masyarakat yang merupakan hasil bertahap pembangunan regional. Membandingkan pendapatan perkapita Jawa Timur dengan Indonesia, memang kelihatan Jawa Timur masih dibawahnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena PDRB Jawa Timur tidak lebih dari 14% nya, sementara penduduknya lebih dari 14% jumlah penduduk Indonesia. Grafik 13 memperlihatkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk baik Nasional maupun Jawa Timur yang menunjukkan adanya hasil pembangunan yang searah. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa seluruh pembangunan diwilayah Jawa Timur sejalan dengan pola Nasional.

GRAFIK 13 : INDEKS PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR MENURUT HARGA BERLAKU



BAB V : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR DARI SEGI PENGGUNAAN

Pada bab terdahulu telah dibahas PDRB Jawa Timur dari segi sektoral yang mana dari pembahasan tersebut dapat diketahui peranan sektoral, perkembangan sektoral, tingkat inflasi sektoral, pertumbuhan riil dari tahun ketahun dan perbandingan sektoral dengan PDB Indonesia.

Pada bab ini akan dibahas penggunaan PDRB Jawa Timur. PDRB Jawa Timur yang disajikan menurut penggunaannya dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa, untuk memenuhi permintaan akhir seperti konsumsi, pembentukan modal tetap/perubahan Stok dan ekspor. Untuk mencukupi penggunaan tersebut diatas PDRB Jawa Timur masih harus ditambah dengan impor (barang dan jasa yang masuk Jawa Timur baik dari luar Negeri maupun dari Wilayah lain).

PDRB Jawa Timur yang disajikan menurut penggunaannya terdiri atas komponen-komponen :

- a. Konsumsi Rumah Tangga
- b. Konsumsi Pemerintah
- c. Pembentukan Modal Tetap Bruto
- d. Ekspor
- e. Minus Impor

Selain komponen-komponen tersebut diatas, PDRB Jawa Timur juga digunakan untuk konsumsi lembaga-lembaga swasta yang tidak mencari untung dan untuk penambahan (perubahan) Stok. Kedua komponen ini masih agak sulit dihitung karena belum tersedianya data yang terpercaya (mantap). Karena itu maka kedua komponen tersebut masih merupakan gabungan dengan konsumsi rumah tangga dan sebagai residual.

5.1. Komposisi Penggunaan PDRB Jawa Timur

PDRB Jawa Timur atas dasar harga yang berlaku dan dasar harga konstan 1975 dari tahun 1975—1982 selalu mengalami kenaikan PDRB atas dasar harga yang berlaku pada tahun 1975 sebesar Rp. 1.885,— Milyard, tahun 1976 sampai dengan tahun 1982 masing-masing tahun sebesar Rp. 2.275,— Milyard; Rp. 2.735 Milyard, Rp. 3.187,— Milyard; Rp. 4.286 Milyard; Rp. 5.958 Milyard; Rp. 7.497,— Milyard dan Rp. 8.408,—Milyard. Rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar Rp. 932,— Milyard, konsumsi Rumah Tangga dari tahun 1975 sampai tahun 1982 selalu naik. Rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar Rp. 536,— Milyard, kurang lebih 57,51% dari rata-rata kenaikan PDRB. Konsumsi Pemerintah dari tahun 1975 sampai tahun 1982 selalu naik. Rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar Rp. 167 Milyard atau 17,92% dari rata-rata kenaikan PDRB.

Rata-rata kenaikan tiap tahun selama periode 1975—1982 untuk komponen pembentukan Modal Tetap, Bruto, Ekspor dan Impor masing-masing sebesar Rp. 271,— Milyard, Rp. 437 Milyard dan Rp. 479 Milyard atau 29,07% 46,89% dan 51,39% dari rata-rata kenaikan PDRB.

PDRB atas dasar harga konstan 1975 periode 1975—1980 dari tahun ke tahun selalu naik rata-rata kenaikan per tahun sebesar Rp. 194 Milyard. Untuk periode yang sama rata-rata kenaikan per tahun konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, Pembentukan modal tetap bruto, Ekspor dan Impor masing-masing sebesar Rp. 102 Milyard; Rp. 38 Milyard; Rp. 88 Milyard; Rp. 98 Milyard dan Rp. 132 Milyard atau 52,58%, 19,59%, 45,35%, 50,52% dan 68,04% dari rata-rata kenaikan PDRB selama periode 1975—1982, bila kita perhatikan rata-rata kenaik-

an per tahun sebesar Rp. 932 Milyard (atas dasar harga berlaku) maka penggunaan terbesar adalah untuk konsumsi sebesar Rp. 703 Milyard. Sisanya sebesar Rp. 229 Milyard digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan ekspor. Ternyata pembentukan modal tetap bruto dan ekspor masing-masing sebesar Rp. 271 Milyard dan Rp. 437 Milyard, melebihi sisa dari yang digunakan untuk konsumsi.

Kalau kita teliti lebih lanjut dan kita asumsikan ekspor seluruhnya berasal dari produk domestik maka sisa PDRB sebesar Rp. 495 Milyard. Untuk mencukupi penggunaan konsumsi dan pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp. 479 Milyard lagi, dilakukan penyediaan yang berasal dari luar domestik.

Bila kita melakukan penelitian dan dapat mengetahui besarnya konsumsi dan Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari luar domestik dan lebih jauh lagi kita dapat mengetahui per komoditi maka dapat kita usahakan menyediakan barang-barang (komoditi) tersebut melalui produk domestik. Kalau ini bisa terpenuhi sebagian atau seluruhnya berarti dapat memperkecil Impor yang berarti sekaligus dapat memperbesar PDRB.

5.2. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan

Perkembangan dan pertumbuhan PDRB secara total telah dijelaskan pada bab terdahulu yang mengulas tentang sektoral. Pada bab ini akan diulas perkembangan dan pertumbuhan menurut komponen penggunaan PDRB.

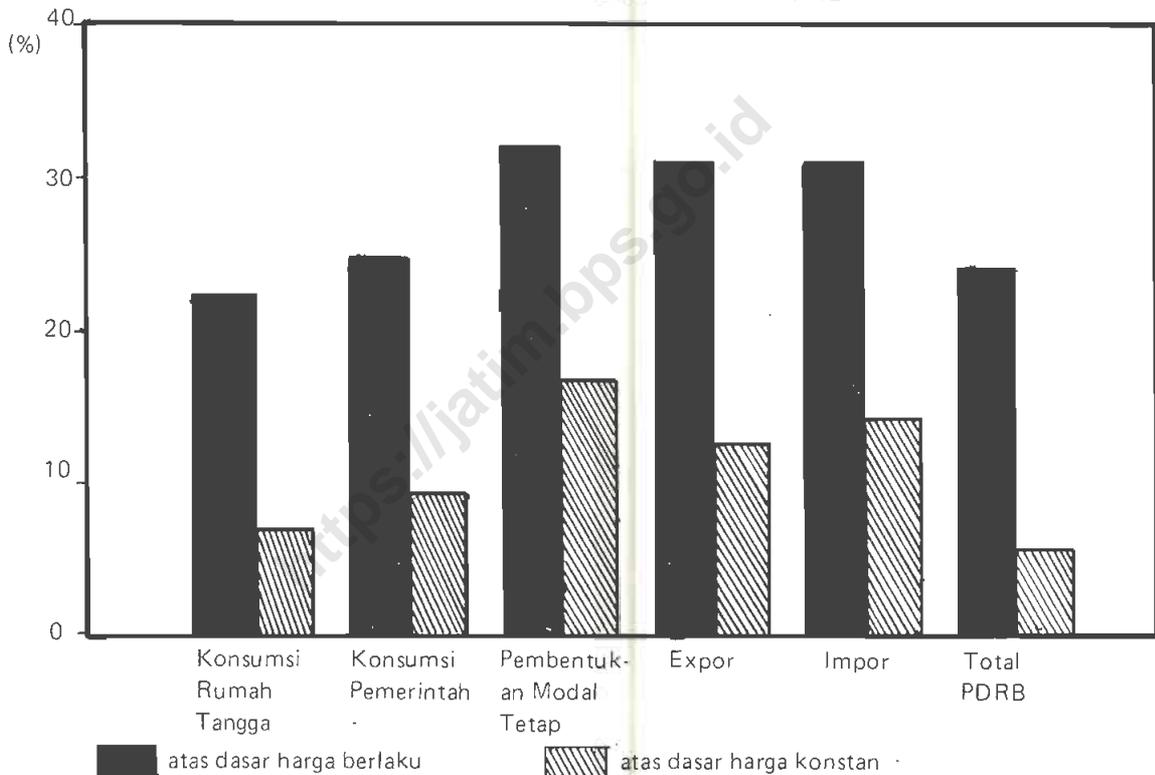
Komponen-komponen penggunaan PDRB atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan 1975 dari tahun ke tahun pada umumnya naik kalau kita perhatikan indeks perkembangan PDRB Jawa Timur menurut penggunaan akan terlihat bahwa perkembangan atas dasar harga berlaku dari tahun 1975 ketahun 1982 untuk konsumsi rumah tangga berkembang kurang lebih 4x lipat; konsumsi Pemerintah kurang lebih 4,5x lipat; pembentukan modal tetap bruto kurang lebih 6,5x lipat; Ekspor kurang lebih 6x lipat; Impor kurang lebih 6,5x lipat, sedang total PDRB nya berkembang kurang lebih 4,5x lipat. Perkembangan atas dasar harga konstan 1975 dari tahun 1975 ke tahun 1982 menunjukkan sebagai berikut, konsumsi rumah tangga berkembang kurang lebih menjadi 1,5x lipat, Konsumsi Pemerintah 1,8x lipat, Pembentuk modal tetap bruto 2,8x lipat; Ekspor 2,2x lipat; Impor 2,5x lipat, sedang total PDRB nya berkembang kurang lebih 1,7x lipat. Dari perkembangan-perkembangan tersebut diatas ternyata perkembangan konsumsi rumah tangga mendekati perkembangan total PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1975. Hal ini menunjukkan bahwa komponen konsumsi rumah tangga masih merupakan yang terbesar dari PDRB Jawa Timur. Kalau kita lihat pembentukan modal tetap bruto, maka perkembangannya sebesar 6,5x lipat untuk atas dasar harga yang berlaku dan 2,8x lipat untuk atas dasar harga konstan 1975 cukup memuaskan karena masih lebih pesat dari konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga.

Perdagangan Luar Negeri pun menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, tetapi impor perkembangannya masih lebih besar dari pada Ekspor. Bila sudah ada data yang menunjukkan bahwa Impor tidak digunakan untuk konsumsi akhir, tetapi digunakan sebagai pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi antara maka diharapkan beberapa tahun kemudian perkembangan ekspor akan lebih pesat dari perkembangan impor. Bila kita perhatikan pertumbuhan PDRB maka akan lebih tepat kalau kita lihat indeks berantai PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan 1975.

Komponen konsumsi rumah tangga secara riil mengalami kenaikan terbesar pada tahun 1981 yaitu 12,76% dan kenaikan terkecil pada tahun 1982 yaitu -2,04%. Pertumbuhan dari tahun ketahun kecuali tahun 1979 dan tahun 1982

diatas pertumbuhan penduduk yang hanya sebesar 1,49%, ini berarti bahwa konsumsi riil per kapita dalam volume ada kenaikan dibandingkan tahun 1975. Sebagai contoh tahun 1975 konsumsi perkapita X. Pertumbuhan konsumsi tahun 1975 ketahun 1976 menjadi 108,92. Pertumbuhan penduduk menjadi 101,49. Maka konsumsi perkapita naik menjadi = $\frac{108,92}{101,49} = 107,32$ atau naik 7,32%. Sehingga konsumsi perkapita tahun 1976 = $X + 7,32\% X = 1,07X$. Pada tahun 1979 dan tahun 1982 konsumsi perkapita lebih kecil dari X, hal ini kemungkinan penduduk Jawa Timur kehilangan selera konsumsinya karena kelesuan situasi ekonomi atau pengaruh struktur umum penduduk.

GRAFIK 14 : RATA-RATA KENAIKAN PERTAHUN PDRB
MENURUT PENGGUNAAN UNTUK SETIAP
KOMPONEN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DAN HARGA KONSTAN TAHUN 1975-1982



Komponen konsumsi Pemerintah mengalami kenaikan terbesar tahun 1980: 22,17% dan kenaikan terkecil tahun 1982 : -3,36%.

Komponen Pembentukan modal tetap bruto mengalami kenaikan terbesar tahun 1980 : 41,45% dan kenaikan terkecil tahun 1977 = -6,24%.

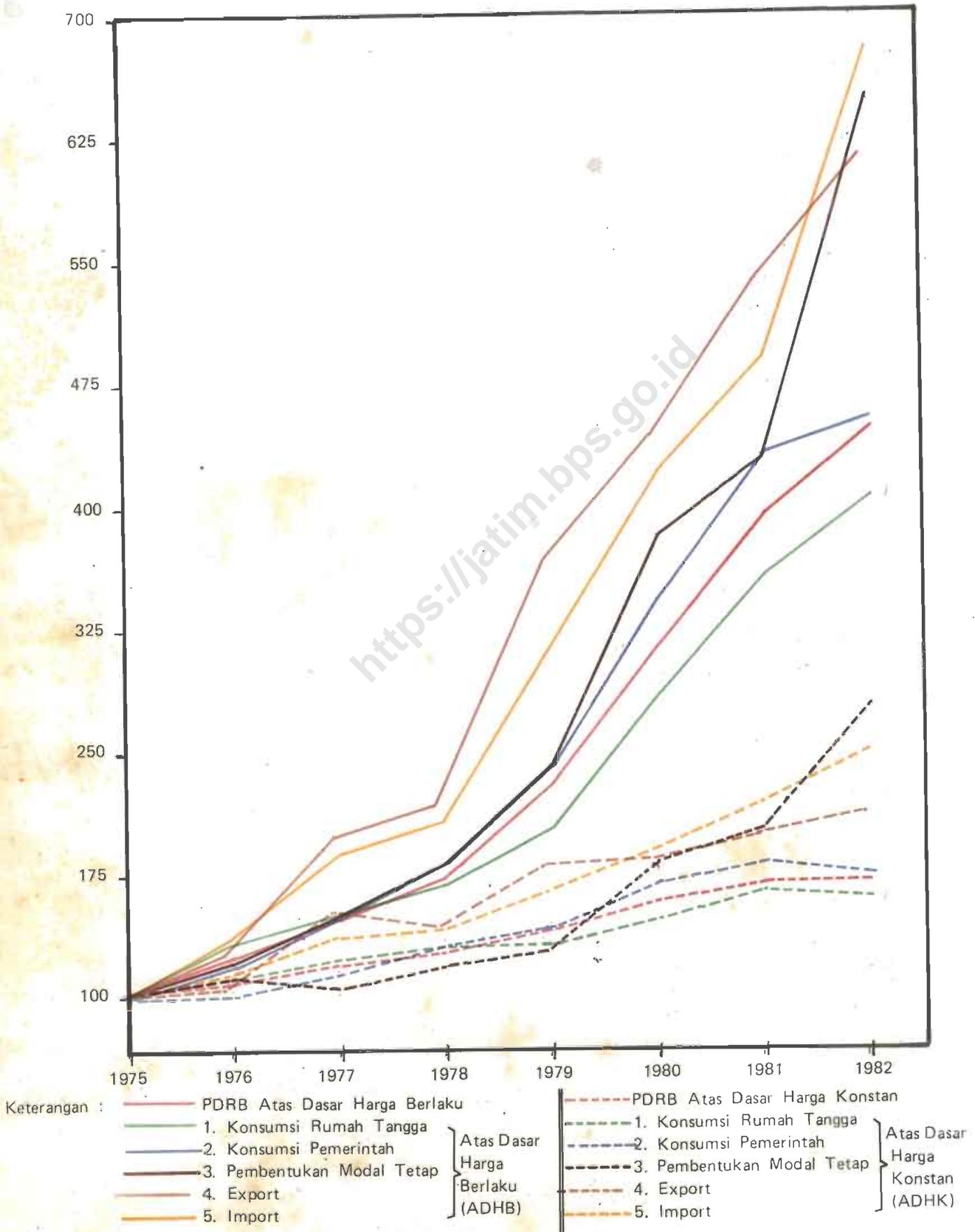
Komponen Ekspor mengalami kenaikan terbesar tahun 1977 = 42,56% dan kenaikan terkecil tahun 1978 : -1,46%.

Komponen Impor mengalami kenaikan terbesar tahun 1977 : 25,52% dan kenaikan terkecil tahun 1978 : 1,68%.

Selama periode 1975-1982 akan terlihat bahwa pada tahun 1982 merupakan tahun yang paling lesu karena PDRB riil hanya naik sebesar 1,89% dari tahun sebelumnya.

Untuk menaikkan pembentukan modal tetap bruto dan ekspor masing-masing sebesar 34,35% dan 4,93% diperlukan penambahan impor sebesar 13,76% dan masih harus menekan konsumsi bahkan mengencangkan ikat pinggang dengan menurunkan tingkat konsumsi. Diharapkan kenaikan pembentukan modal yang cukup besar pada tahun 1982 dapat memperbaiki kelesuan ekonomi dan dapat meningkatkan PDRB pada tahun mendatang.

GRAFIK 15 : INDEK PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN PDRB MENURUT PENGGUNAANNYA ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975 TAHUN 1975-1982



5.3. Distribusi Penggunaan PDRB

Pola PDRB Jawa Timur menurut sudut penggunaan sejak tahun 1975 terjadi penggeseran tingkat penyerapan baik menurut harga berlaku ataupun harga konstan. Masing-masing komponen dalam PDRB menurut penggunaan menunjukkan perubahan-perubahan tingkat penyerapan. Diharapkan perubahan tingkat penyerapan tersebut akan semakin memantapkan laju pembangunan dimasa mendatang.

Komponen konsumsi rumah tangga sampai dengan tahun 1978 menyerap lebih dari 60% PDRB atas dasar harga yang berlaku, menurun dibawah 60% pada tahun 1979 sampai tahun 1982. Untuk atas dasar harga konstan 1975, konsumsi rumah tangga menyerap lebih dari 60% sampai tahun 1981 dan baru turun dibawah 60% pada tahun 1982. Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1975 dari tahun 1975-1982 menyerap sekitar 17% sampai kurang dari 20%. Komponen pembentukan modal tetap bruto dari tahun 1975 sampai tahun 1979 menyerap sekitar 15% sampai 19% dari PDRB atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan 1975. Tahun 1980 sampai tahun 1982 menyerap sekitar 20%-29%.

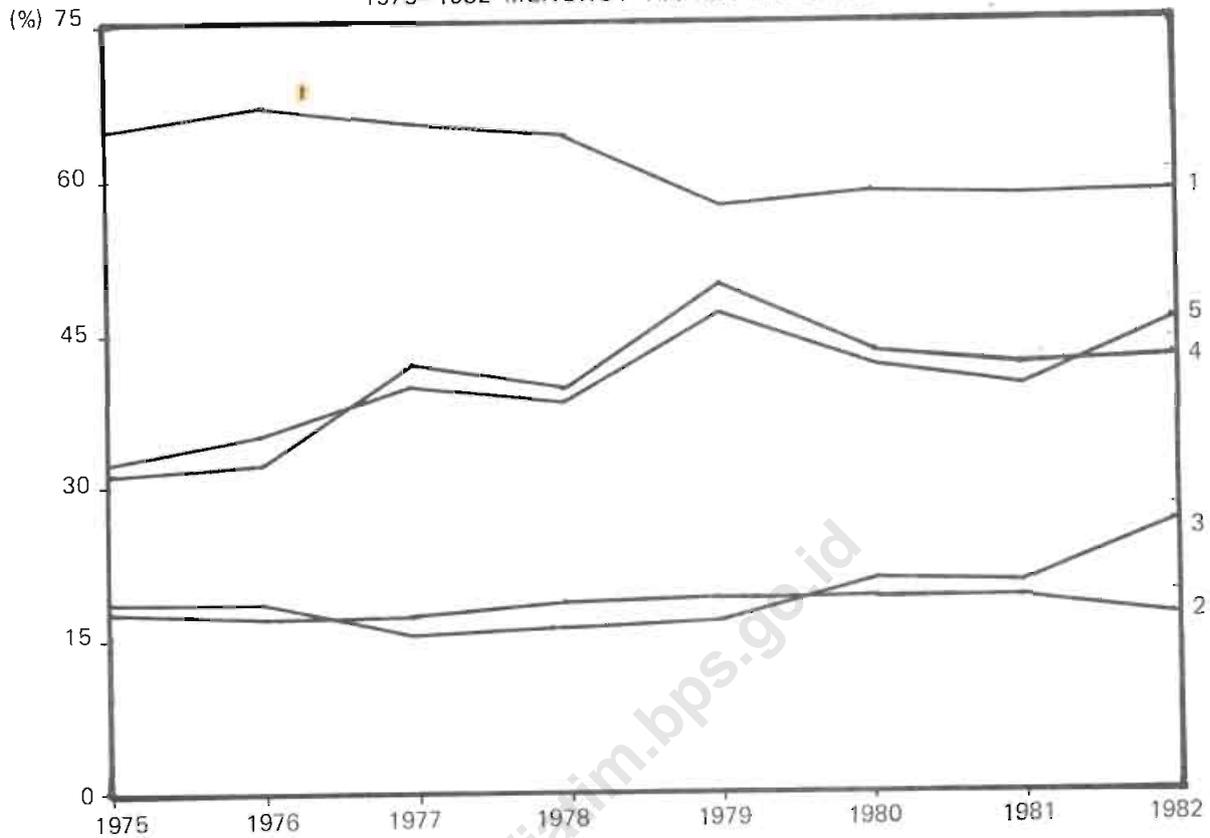
Tingkat penyerapan komponen ekspor dari tahun ke tahun cukup bervariasi. Tingkat penyerapan terendah atas dasar harga berlaku terjadi pada tahun 1975 sebesar 31,33%, atas dasar harga konstan 1975 terjadi pada tahun 1976 sebesar 31,26%. Tingkat penyerapan tertinggi atas dasar harga berlaku terjadi pada tahun 1979 sebesar 50,40% atas dasar harga konstan 1975 terjadi pada tahun 1979 sebesar 43,11%.

Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan penggunaan tersebut diatas yang tidak dapat dicukupi dengan produk domestik maka dilakukan Impor (berasal dari Luar Negeri dan Luar Wilayah Jawa Timur).

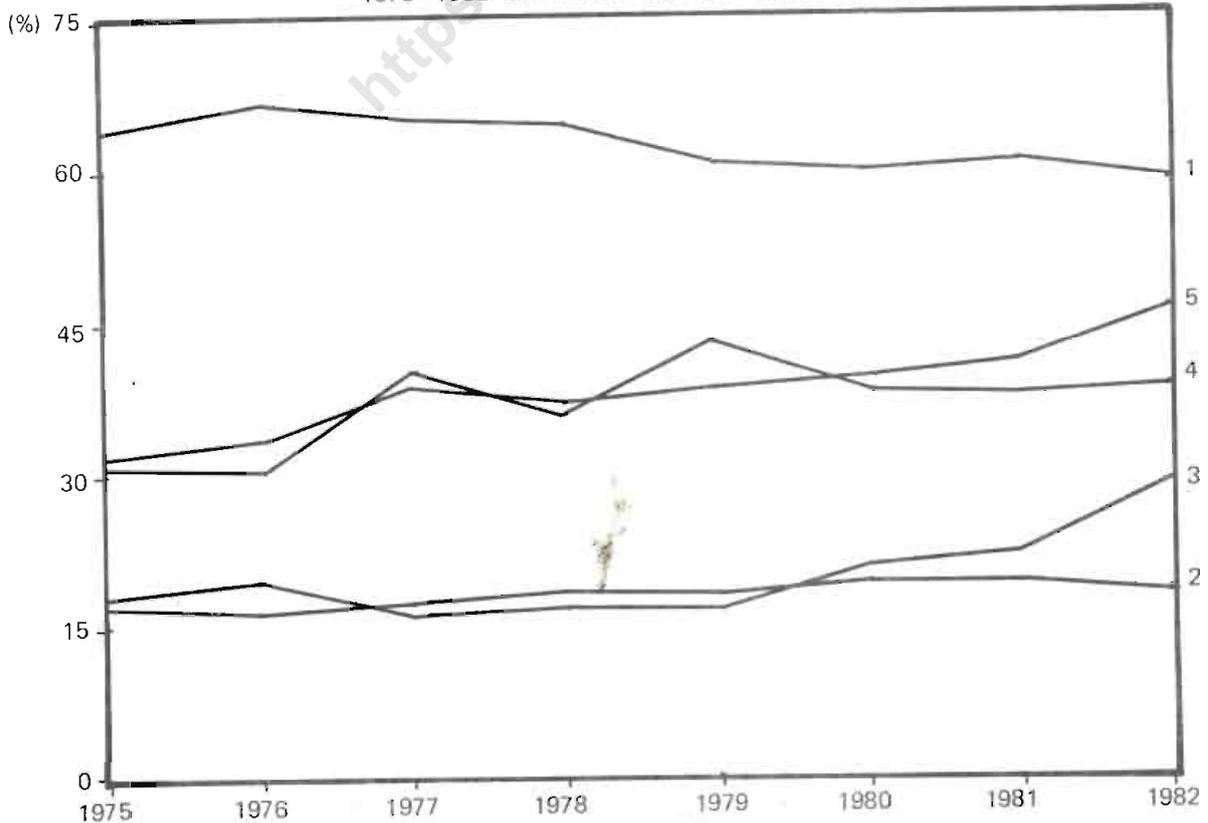
Impor yang dilakukan selama periode 1975-1982 berkisar antara 32% -47% lebih, untuk atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan 1975. Tingkat kebutuhan impor terendah terjadi pada tahun 1975 dan tingkat kebutuhan impor tertinggi terjadi pada tahun 1982.

Dua komponen penggunaan PDRB, yaitu konsumsi dan pembentukan modal adalah komponen yang tidak dapat dihindari dengan kata lain PDRB (Pendapatan) pasti digunakan untuk konsumsi dan Investasi bila pendapatan tersebut ingin berkembang (meningkat).

GRAFIK 16 : DISTRIBUSI PDRB MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
1975-1982 MENURUT HARGA BERLAKU



GRAFIK 17 : DISTRIBUSI PDRB MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
1975-1982 MENURUT HARGA KONSTAN 1975



Keterangan Grafik 16 dan 17 :
1. Konsumsi RT
2. Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap
4. Ekspor
5. Impor

Tabel dibawah ini ingin membandingkan tingkat penyerapan konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing terhadap PDRB Jawa Timur dan terhadap PDB Indonesia dari tahun 1975-1982.

Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai indikator apakah pola ekonomi masyarakat Jawa Timur identik (dapat mewakili) Indonesia.

**TABEL 15 : PERBANDINGAN TINGKAT PENYERAPAN
KONSUMSI RUMAH TANGGA JAWA TIMUR
DAN INDONESIA TAHUN 1975-1982 (%)**

Tahun	Harga berlaku		Harga konstan 1975	
	Jawa Timur	Indonesia	Jawa Timur	Indonesia
1	2	3	4	5
1975	64,98	69,17	64,98	69,17
1976	67,26	67,65	67,25	68,73
1977	65,76	65,63	65,62	67,40
1978	64,36	66,76	65,47	66,84
1979	57,59	60,93	61,35	71,92
1980	58,78	60,52	61,09	73,79
1981	58,22	65,82	62,07	79,79
1982	59,20	69,88	59,68	80,66

**TABEL 16 : PERBANDINGAN TINGKAT PENYERAPAN
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
JAWA TIMUR DAN INDONESIA TAHUN 1975-1982 (%)**

Tahun	Harga berlaku		Harga Konstan 1975	
	Jawa Timur	Indonesia	Jawa Timur	Indonesia
1	2	3	4	5
1975	18,32	20,34	18,32	20,34
1976	18,46	20,72	19,60	20,17
1977	15,28	20,13	16,66	21,50
1978	16,12	20,53	16,95	22,94
1979	16,83	20,93	17,02	22,54
1980	20,43	20,87	21,36	24,39
1981	19,84	21,39	22,50	25,11
1982	26,67	22,58	29,67	27,75

5.4. Indeks harga Implisit PDRB menurut penggunaannya

Harga Implisit adalah gambaran harga yang diperoleh dengan cara nilai atas dasar harga berlaku dibagi dengan nilai atas dasar harga konstan. Harga implisit yang disajikan dari tahun ketahun dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perilaku harga. Bila yang dihitung adalah harga Implisit dari PDRB yang berarti harga implisit dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi maka perkembangan harga tersebut dari tahun ketahun dapat dikatakan tingkat inflasi.

Pengertian inflasi pada uraian ini dapat pula dicari untuk masing-masing komponen PDRB menurut penggunaannya. Inflasi sesuai dengan keperluan analisa dapat dicari tahun demi tahun atau sekaligus untuk suatu kurun waktu tertentu.

Bila kita amati tabel Indeks harga implisit PDRB menurut penggunaan, akan diketahui bahwa komponen ekspor mempunyai tingkat perubahan yang paling tinggi untuk periode 1975–1982. Indeks implisit komponen ini untuk tahun 1982; 284,91, khusus untuk barang ekspor keluar Negeri naik cukup tinggi akibat keluarnya KNOP 15 – 1978 dalam rangka merangsang produsen dalam Negeri.

Komponen ini memang mengalami perubahan yang besar sejak tahun 1976 hingga saat ini.

Komponen Impor (dari luar Negeri dan dari Propinsi lain) mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, tetapi masih lebih rendah dibanding lajunya kenaikan harga-harga barang ekspor.

Perkembangan Indeks harga barang-barang konsumsi baik konsumsi rumah tangga atau konsumsi Pemerintah untuk tahun 1982 masing-masing 256,91 dan 251,51 dengan tahun dasar 1975. Khusus untuk konsumsi Pemerintah sejak tahun 1976 s/d 1981 selalu berada diatas indeks komponen konsumsi rumah tangga.

Indeks komponen pembentukan modal tetap bruto mempunyai gerak yang paling lambat, berarti gejolak harga lebih mudah dikendalikan dibanding komponen-komponen lainnya.

Sebagai salah satu indikator untuk memperoleh laju inflasi di Jawa Timur perubahan-perubahan indeks implisit setiap tahun dapat digunakan rata-rata inflasi di Jawa Timur periode 1975–1982 adalah 14,75% per tahun.

Inflasi untuk tahun 1976; 1979; 1980; 1981 dan 1982 diatas 10%, sedangkan untuk tahun 1977 dan 1978 dibawah 10%.

Rata-rata inflasi pertahun komponen penggunaan dari PDRB periode 1975–1982 adalah sebagai berikut :

– Komponen ekspor	16,45%
– Komponen impor	14,75%
– Komponen konsumsi rumah tangga	14,63%
– Komponen konsumsi Pemerintah	14,26%
– Komponen Pembentuk Modal	13,14%

Pada tahun 1976 inflasi Jawa Timur sebesar 14,67%, inflasi komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah dan komponen ekspor lebih dari 14,67%, sedang komponen pembentukan modal tetap bruto dan impor kurang dari 14,67%. Selanjutnya inflasi Jawa Timur pada tahun 1977 sebesar 8,96%, inflasi komponen pembentukan modal tetap bruto dibawah 8,96%, sedang komponen-komponen lainnya diatas 8,96%.

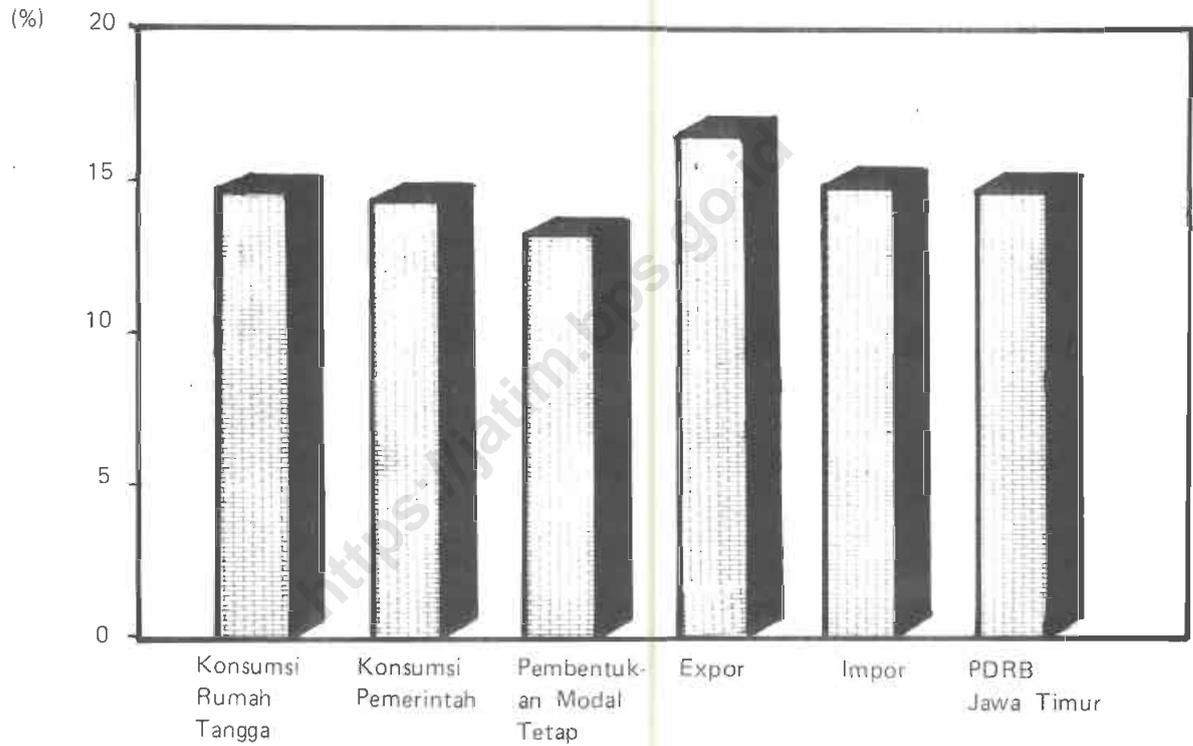
Inflasi pada tahun 1978 sebesar 6,90%, komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah dibawah 6,90%, sedang komponen lainnya diatas 6,90%.

Pada tahun 1979, inflasi sebesar 25,96%, ini disebabkan tingginya inflasi pada empat komponen diluar konsumsi rumah tangga, sebaliknya pada tahun 1980 dengan inflasi sebesar 23,32% disebabkan tingginya inflasi konsumsi rumah

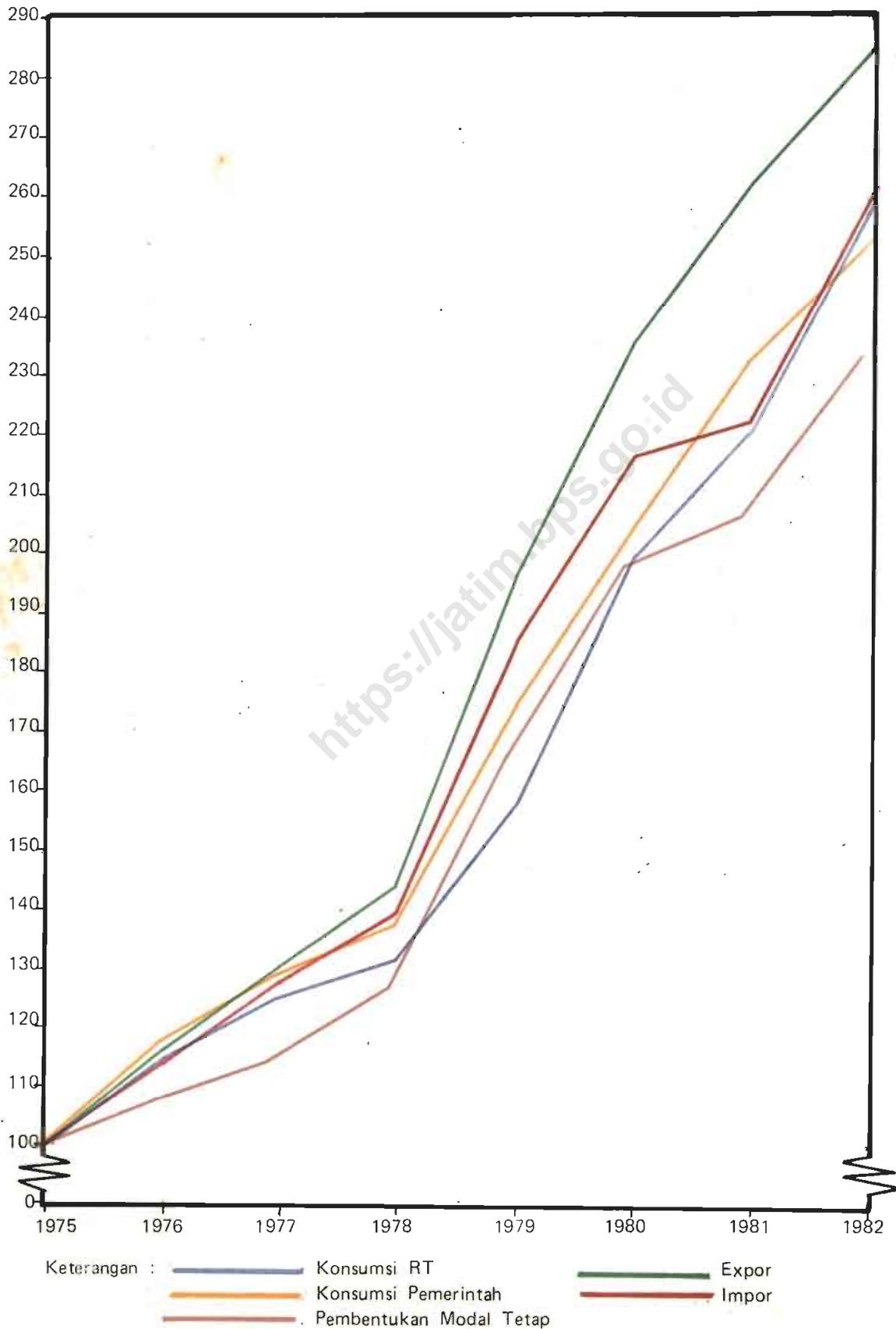
tangga. Tahun 1981 dengan tingkat inflasi sebesar 13,39%, komponen konsumsi Pemerintah diatas 13,39%, sedang empat komponen lainnya dibawah 13,39%.

Inflasi sebesar 10,08% pada tahun 1982 disebabkan inflasi komponen-komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor masing-masing sebesar 16,41%; 8,52%; 12,20%; 8,62% dan 16,55%.

GRAFIK 18 : RATA-RATA INFLASI MENURUT KOMPONEN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR 1975-1982 (%)



GRAFIK 19 : PERKEMBANGAN INDEKS IMPLISIT PDRB JAWA TIMUR
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN 1975-1982
(1975 = 100)



BAB VI
LAMPIRAN TABEL - TABEL

<https://jatim.bps.go.id>

<https://jatim.bps.go.id>

**6.1. TABEL - TABEL POKOK PDRB
SEKTORAL**

<https://jatim.bps.go.id>

TABEL 6.1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI JAWA TIMUR
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA Rp.)

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	808.227,37	936.784,09	1.088.607,06	1.252.764,94
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	658.969,87	752.845,94	843.745,49	957.634,68
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	44.036,09	53.897,56	80.236,46	101.832,90
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	33.498,23	37.905,03	49.579,17	50.494,19
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	50.275,65	69.463,25	81.903,70	103.117,26
1.5.	K e h u t a n a n	7.109,87	6.269,82	9.781,30	10.156,24
1.6.	P e r i k a n a n	14.337,66	16.402,49	23.360,94	29.529,67
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.729,88	9.551,65	10.094,51	8.640,97
3.	Industri Pengolahan	221.140,77	267.969,24	336.343,69	426.834,47
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8.341,37	10.872,46	13.051,54	16.606,12
5.	B a n g u n a n	13.450,62	19.728,58	22.243,62	24.237,34
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	389.355,06	488.049,24	619.647,30	713.879,19
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	119.560,18	153.175,89	168.733,60	192.130,16
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	25.060,28	36.489,49	42.961,33	43.980,08
9.	Sewa Rumah	43.870,61	51.521,41	58.200,82	65.241,98
10.	Pemerintahan	209.080,94	245.077,01	313.048,64	374.715,69
11.	Jasa - jasa	43.432,84	56.043,47	61.828,93	67.484,52
Produk Domestik Regional Bruto		1.885.249,92	2.275.262,53	2.734.761,04	3.186.515,48

— 49 —

PROP

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA Rp).

Lanjutan Tabel 6.1.1.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.647.932,43	2.191.375,65	2.814.322,08	2.858.166,93
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	1.293.999,20	1.718.932,39	2.224.318,70	2.177.014,33
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	122.527,17	172.580,78	228.136,81	257.057,90
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	53.820,30	56.271,00	45.432,57	47.721,29
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	118.042,06	164.753,32	221.738,50	266.812,13
1.5.	K e h u t a n a n	13.165,47	21.414,71	20.303,62	21.127,08
1.6.	P e r i k a n a n	46.378,23	57.423,45	74.391,88	88.434,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	11.650,35	15.677,01	13.187,05	17.443,30
3.	Industri Pengolahan	611.836,17	920.308,06	1.142.207,80	1.284.797,53
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	17.929,16	27.543,47	37.986,75	56.265,23
5.	B a n g u n a n	35.688,20	53.050,31	63.630,69	78.740,95
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.024.202,13	1.447.445,40	1.733.448,28	2.078.195,83
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	255.524,22	358.522,86	477.292,86	633.476,69
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	56.481,01	81.739,13	107.112,73	141.857,18
9.	Sewa Rumah	80.026,10	104.601,77	132.117,26	165.028,21
10.	Pemerintahan	457.688,22	639.114,03	821.995,31	910.095,08
11.	Jasa - Jasa	87.375,60	118.885,23	153.495,83	183.926,24
Produk Domestik Regional Bruto		4.286.333,59	5.958.262,92	7.496.796,64	8.407.993,17

TABEL 6.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI JAWA TIMUR
ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75 (JUTA Rp.)

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	808.227,37	835.702,31	892.604,02	964.679,91
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	658.969,87	683.679,84	727.430,46	786.735,21
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	44.036,09	43.006,57	52.223,86	61.710,01
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	33.498,23	30.228,45	31.025,84	29.344,80
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	50.275,65	56.200,56	57.254,48	63.386,27
1.5.	K e h u t a n a n	7.109,87	6.829,02	7.037,46	5.897,49
1.6.	P e r i k a n a n	14.337,66	15.757,87	17.631,92	17.606,13
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.729,88	9.211,92	9.292,40	6.881,55
3.	Industri Pengolahan	221.140,77	227.439,52	256.369,20	293.251,25
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8.341,37	8.856,69	9.683,82	11.794,95
5.	B a n g u n a n	13.450,62	19.019,17	20.306,39	20.352,12
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	389.355,06	424.690,62	485.393,41	513.895,76
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	119.560,18	127.859,86	135.647,64	150.239,38
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	25.060,28	26.888,53	28.991,52	33.051,04
9.	Sewa Rumah	43.870,61	47.423,98	51.279,92	55.459,15
10.	Pemerintahan	209.080,94	210.474,94	249.659,97	283.768,03
11.	Jasa - jasa	43.432,84	46.586,74	49.414,87	52.288,32
, Produk Domestik Regional Bruto		1.885.249,92	1.984.154,28	2.188.643,16	2.385.661,46

Lanjutan Tabel 6.1.2.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.022.867,54	1.100.871,01	1.124.817,04	1.062.095,99
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	839.038,82	908.924,85	911.214,39	822.681,40
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	71.244,00	81.621,36	94.867,01	112.542,89
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	27.194,47	19.713,68	18.890,62	18.540,19
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	59.383,52	63.596,14	71.182,29	77.382,74
1.5.	K e h u t a n a n	6.548,74	6.748,62	6.505,66	7.007,08
1.6.	P e r i k a n a n	19.457,99	20.266,36	22.157,07	23.941,69
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.774,27	7.033,10	6.702,84	7.939,32
3.	Industri Pengolahan	318.538,97	397.039,70	487.697,75	500.337,44
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	15.504,94	18.300,89	22.723,92	27.236,16
5.	B a n g u n a n	22.874,12	27.977,28	32.799,32	37.141,95
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	566.406,69	665.361,83	765.033,69	820.407,53
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	159.266,98	169.118,01	216.338,44	238.770,88
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	33.796,04	35.715,80	39.932,40	49.853,75
9.	Sewa Rumah	59.994,81	64.911,71	70.251,55	76.038,67
10.	Pemerintahan	287.240,01	326.394,99	356.042,49	358.615,76
11.	Jasa - jasa	54.307,65	58.812,17	63.974,86	68.001,97
Produk Domestik Regional Bruto		2.547.572,02	2.871.536,49	3.186.314,30	3.246.439,42

TABEL 6.1.3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	42,87	41,17	39,80	39,31
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	34,95	33,09	30,85	30,05
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,33	2,37	2,93	3,19
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	1,78	1,67	1,81	1,58
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,67	3,05	3,00	3,24
1.5.	K e h u t a n a n	0,38	0,27	0,36	0,32
1.6.	P e r i k a n a n	0,76	0,72	0,85	0,93
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,42	0,37	0,27
3.	Industri Pengolahan	11,73	11,78	12,30	13,40
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,44	0,48	0,48	0,52
5.	B a n g u n a n	0,72	0,87	0,81	0,76
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,65	21,45	22,66	22,40
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,34	6,73	6,17	6,03
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,33	1,60	1,57	1,38
9.	Sewa Rumah	2,33	2,27	2,13	2,05
10.	Pemerintahan	11,09	10,77	11,45	11,76
11.	Jasa - jasa	2,30	2,46	2,26	2,12
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Lanjutan Tabel 6.1.3.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	38,45	36,78	37,54	33,99
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	30,19	28,85	29,67	25,89
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,86	2,90	3,04	3,06
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	1,26	0,94	0,61	0,57
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,75	2,77	2,96	3,17
1.5.	K e h u t a n a n	0,31	0,36	0,27	0,25
1.6.	P e r i k a n a n	1,08	0,96	0,99	1,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,26	0,18	0,21
3.	Industri Pengolahan	14,27	15,44	15,23	15,28
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,42	0,46	0,51	0,67
5.	B a n g u n a n	0,83	0,89	0,85	0,94
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,89	24,29	23,12	24,72
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,96	6,02	6,37	7,53
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,32	1,37	1,43	1,69
9.-	Sewa Rumah	1,87	1,76	1,76	1,96
10.	Pemerintahan	10,68	10,73	10,96	10,82
11.	Jasa - jasa	2,04	2,00	2,05	2,19
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 6.1.4. DISTRIBUSI PERSENTASE DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	42,87	42,12	40,79	40,44
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	34,95	34,46	33,24	32,98
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,33	2,17	2,39	2,59
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	1,78	1,52	1,42	1,23
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,67	2,83	2,62	2,65
1.5.	Kehutanan	0,38	0,34	0,32	0,25
1.6.	Perikanan	0,76	0,80	0,80	0,74
2.	Pertambangan dan Penggalan	0,20	0,46	0,42	0,29
3.	Industri Pengolahan	11,73	11,46	11,71	12,29
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,44	0,45	0,44	0,49
5.	Bangunan	0,72	0,96	0,93	0,85
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,65	21,40	22,18	21,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,34	6,44	6,20	6,30
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,33	1,36	1,32	1,39
9.	Sewa Rumah	2,33	2,39	2,34	2,33
10.	Pemerintahan	11,09	10,61	11,41	11,89
11.	Jasa - jasa	2,30	2,35	2,26	2,19
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Lanjutan Tabel 6.1.4.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	40,15	38,34	35,30	32,72
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	32,93	31,65	28,60	25,34
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,80	2,84	2,98	3,47
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	1,07	0,69	0,59	0,57
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,33	2,21	2,23	2,38
1.5.	K e h u t a n a n	0,26	0,24	0,20	0,22
1.6.	P e r i k a n a n	0,78	0,71	0,70	0,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,24	0,21	0,25
3.	Industri Pengolahan	12,50	13,83	15,31	15,41
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,61	0,64	0,71	0,84
5.	B a n g u n a n	0,90	0,97	1,03	1,14
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,23	23,17	24,01	25,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,25	5,89	6,79	7,35
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,33	1,24	1,25	1,54
9.	Sewa Rumah	2,35	2,26	2,21	2,34
10.	Pemerintahan	11,28	11,37	11,17	11,05
11.	Jasa - jasa	2,13	2,05	2,01	2,09
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 6.1.5. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	115,91	134,69	155,00
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	114,25	128,04	145,32
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	122,39	182,21	231,25
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	113,16	148,01	150,74
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	100,00	138,16	162,91	205,10
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	88,18	137,57	142,85
1.6.	P e r i k a n a n	100,00	114,40	162,93	205,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	100,00	256,08	270,64	231,67
3.	Industri Pengolahan	100,00	121,18	152,09	193,01
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	130,34	156,47	199,08
5.	B a n g u n a n	100,00	146,67	165,37	180,20
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	125,35	159,15	183,35
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	100,00	128,12	141,13	160,70
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	145,61	171,43	175,50
9.	Sewa Rumah	100,00	117,44	132,66	148,71
10.	Pemerintahan	100,00	117,22	149,73	179,22
11.	Jasa - jasa	100,00	129,03	142,36	155,38
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	120,69	145,06	169,02

Lanjutan Tabel 6.1.5.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	203,89	271,13	348,21	353,63
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	196,37	260,85	337,54	330,37
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	278,24	391,91	518,07	583,74
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	160,67	167,98	135,63	142,46
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	234,79	327,70	441,05	530,70
1.5.	K e h u t a n a n	185,17	301,20	285,57	297,15
1.6.	P e r i k a n a n	323,47	400,51	518,86	616,80
2.	Pertambangan, dan Penggalian	312,35	420,31	353,55	467,66
3.	Industri Pengolahan	276,67	416,16	516,51	580,99
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	214,94	330,20	455,40	674,53
5.	B a n g u n a n	265,33	394,41	473,07	585,41
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	263,05	371,75	445,21	533,75
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	213,72	299,87	399,21	529,84
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	255,38	326,17	427,42	566,06
9.	Sewa Rumah	182,41	238,43	301,15	376,17
10.	Pemerintahan	218,90	305,68	393,15	435,28
11.	Jasa - jasa	201,17	273,72	353,41	423,47
Produk Domestik Regional Bruto		227,36	316,05	397,66	445,99

TABEL 6.1.6. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	103,40	110,44	119,36
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	103,75	110,39	119,39
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	97,66	118,59	140,14
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	90,24	92,62	87,60
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	100,00	111,78	113,88	126,08
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	96,05	98,98	82,95
1.6.	P e r i k a n a n	100,00	109,91	122,98	122,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	100,00	246,98	249,13	184,50
3.	Industri Pengolahan	100,00	102,85	115,93	132,61
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	106,18	116,09	141,40
5.	B a n g u n a n	100,00	141,40	150,97	151,31
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	109,08	124,67	131,99
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	100,00	106,94	113,46	125,66
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	107,30	115,69	131,89
9.	Sewa Rumah	100,00	108,10	116,89	126,42
10.	Pemerintahan	100,00	100,67	119,41	135,72
11.	Jasa - jasa	100,00	107,26	113,77	120,39
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	105,25	116,09	126,54

Lanjutan Tabel 6.1.6.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	126,56	136,21	139,17	131,41
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	127,33	137,93	138,29	124,84
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	161,79	185,35	215,43	255,57
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	81,18	58,85	56,39	55,35
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	118,12	126,49	141,58	153,92
1.5.	K e h u t a n a n	92,11	94,92	91,50	98,55
1.6.	P e r i k a n a n	135,71	141,35	154,54	166,98
2.	Pertambangan dan Penggalian	181,62	188,56	179,71	212,86
3.	Industri Pengolahan	144,04	179,54	220,54	226,25
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	185,88	219,40	272,42	326,52
5.	B n a g u n a n	170,06	208,00	243,85	276,14
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	145,47	170,89	196,49	210,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	133,21	141,45	180,95	199,71
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	134,86	142,52	159,35	198,94
9.	Sewa Rumah	136,75	147,96	160,13	173,32
10.	Pemerintahan	137,38	156,11	170,29	171,52
11.	Jasa - jasa	125,04	135,41	147,30	156,57
Produk Domestik Regional Bruto		135,13	152,32	169,01	172,20

TABEL 6.1.7. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA-ANGKA PERKAPITA
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	1.885.249,92	2.275.262,53	2.734.761,04	3.186.515,46
2.	Dikurangi Penyusutan Barang-Modal (juta rupiah)	75.838,77	93.934,32	113.363,91	132.032,80
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	1.809.411,15	2.181.328,21	2.621.397,13	3.054.482,66
4.	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto	77.423,12	101.577,50	121.642,76	145.986,37
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi (pendapatan regional)	1.731.988,03	2.079.750,71	2.499.754,37	2.908.496,29
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	26.973.872	27.376.226	27.784.585	28.199.032
7.	Pendapatan Regional Perkapita (Rp)	64.209,84	75.969,23	89.969,11	103.141,71
8.	Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rp)	69.891,71	83.110,89	98.427,28	113.000,88
9.	Indeks Berantai Pendapatan Regional Perkapita	—	118,31	118,43	114,64
10.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita 1975 = 100	100,00	118,31	140,12	160,63

Lanjutan Tabel 6.1.7.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	4.286.333,59	5.958.262,92	7.496.796,64	8.407.993,17
2.	Dikurangi Penyusutan Barang Modal (juta rupiah)	178.405,77	255.562,78	328.068,50	404.575,64
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	4.107.927,82	5.702.700,14	7.168.728,14	8.003.417,53
4.	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto	174.636,63	214.307,99	243.135,60	300.675,22
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi (pendapatan regional)	3.933.291,19	5.488.392,15	6.925.592,54	7.702.742,31
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	28.619.664	29.046.569	29.479.842	29.919.579
7.	Pendapatan Regional Perkapita (Rp)	137.433,17	188.951,48	234.926,38	257.448,22
8.	Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rp)	149.768,83	205.127,94	254.302,47	281.019,77
9.	Indeks Berantai Pendapatan Regional Perkapita	133,25	137,49	124,33	109,59
10.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita 1975 = 100	214,04	294,27	365,87	400,95

TABEL 6.1.8. PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA-ANGKA PERKAPITA
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	1.885.249,92	1.984.154,28	2.188.643,16	2.385.661,46
2.	Dikurangi Penyusutan Barang Modal (juta rupiah)	75.838,77	80.953,74	89.561,64	97.251,39
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	1.809.411,15	1.903.200,54	2.099.081,52	2.288.410,07
4.	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto	77.423,12	81.487,83	89.880,50	97.971,22
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi (pendapatan regional)	1.731.988,03	1.821.712,71	2.009.201,02	2.190.438,85
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	26.973.872	27.376.226	27.784.585	28.199.032
7.	Pendapatan Regional Perkapita (Rp)	64.209,84	66.543,60	72.313,52	77.677,80
8.	Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rp)	69.891,71	72.477,28	78.771,85	84.600,83
9.	Indeks Berantai Pendapatan Regional Perkapita	—	103,63	108,67	107,42
10.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita 175 = 100	100,00	103,63	112,62	120,97

Lanjutan Tabel 6.1.8.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	2.547.572,02	2.871.536,49	3.186.314,30	3.246.439,42
2.	Dikurangi Penyusutan Barang Modal (juta rupiah)	104.331,47	119.641,83	138.896,45	151.774,11
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar (juta rupiah)	2.443.240,55	2.751.894,66	3.047.417,85	3.094.665,31
4.	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto	104.621,86	117.930,90	130.852,82	133.322,61
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi (pendapatan regional)	2.338.618,69	2.633.963,76	2.916.565,03	2.961.342,70
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	28.619.664	29.046.569	29.479.842	29.919.579
7.	Pendapatan Regional Perkapita (Rp)	81.713,70	90.680,72	98.934,22	98.976,75
8.	Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Rp)	89.014,74	98.859,75	108.084,51	108.505,52
9.	Indeks Berantai Pendapatan Regional Perkapita	105,20	110,97	109,10	100,04
10.	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita 175 = 100	127,26	141,23	154,08	154,15

TABEL 6.1.9. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	—	115,91	116,21	115,08
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	—	114,25	112,07	113,50
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	—	122,39	148,87	126,92
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	—	113,16	130,80	101,85
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	—	138,16	117,91	125,90
1.5.	K e h u t a n a n	—	88,18	156,01	103,83
1.6.	P e r i k a n a n	—	114,40	142,42	126,41
2.	Pertambangan dan Penggalian	—	256,08	105,68	85,60
3.	Industri Pengolahan	—	121,18	125,52	126,90
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	—	130,34	120,04	127,23
5.	B a n g u n a n	—	146,67	112,75	108,96
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	—	125,35	126,96	115,21
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	—	128,12	110,16	113,87
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	—	145,61	117,74	102,37
9.	Sewa Rumah	—	117,44	112,96	112,10
10.	Pemerintahan	—	117,22	127,73	119,70
11.	Jasa - jasa	—	129,03	110,32	109,15
Produk Domestik Regional Bruto		—	120,69	120,20	116,52

Lanjutan Tabel 6.1.9.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	131,54	132,98	128,43	101,56
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	135,12	132,84	129,40	97,87
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	120,32	140,85	132,19	112,68
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	106,59	104,55	80,74	105,04
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	114,47	139,57	134,59	120,33
1.5.	K e h u t a n a n	129,63	162,66	94,81	104,06
1.6.	P e r i k a n a n	157,06	123,82	129,55	118,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	134,83	134,56	84,12	132,28
3.	Industri dan Pengolahan	143,34	150,42	124,11	112,48
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	107,97	153,62	137,92	148,12
5.	B a n g u n a n	147,24	148,65	119,94	123,75
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	143,47	141,32	119,76	119,89
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	133,00	140,31	133,13	132,72
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	128,42	144,72	131,04	132,44
9.	Sewa Rumah	122,66	130,71	126,30	124,91
10.	Pemerintahan	122,14	139,64	128,61	110,72
11.	Jasa - jasa	129,48	136,06	129,11	119,82
Produk Domestik Regional Bruto		134,51	139,01	125,82	112,15

TABEL 6.1.10

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	—	103,40	106,81	108,07
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	—	103,75	106,40	108,15
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	—	97,66	121,43	118,16
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	—	90,24	102,64	94,58
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	—	111,78	101,88	110,71
1.5.	K e h u t a n a n	—	96,05	103,05	83,80
1.6.	P e r i k a n a n	—	109,91	111,89	99,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	—	246,98	100,87	74,06
3.	Industri Pengolahan	—	102,85	112,72	114,39
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	—	106,18	109,34	121,80
5.	B a n g u n a n	—	141,40	106,77	100,23
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	—	109,08	114,29	105,87
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	—	106,94	106,09	110,76
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	—	107,30	107,82	114,00
9.	Sewa Rumah	—	108,10	108,13	108,15
10.	Pemerintahan	—	100,67	118,62	113,66
11.	Jasa - jasa	—	107,26	106,07	105,81
Produk Domestik Regional Bruto		—	105,25	110,31	109,00

Lanjutan Tabel 6.1.10

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	106,03	107,63	102,18	94,42
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	106,65	108,33	100,25	90,28
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	115,45	114,57	116,23	118,63
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	92,67	72,49	95,82	98,14
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	93,69	107,09	111,93	108,71
1.5.	K e h u t a n a n	111,04	103,05	96,40	107,71
1.6.	P e r i k a n a n	110,52	104,15	109,33	108,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	98,44	103,82	95,30	118,45
3.	Industri Pengolahan	108,62	124,64	122,83	102,59
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	131,45	118,03	124,17	119,86
5.	B a n g u n a n	112,39	122,31	117,24	113,24
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	110,22	117,47	114,98	107,24
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	106,01	106,19	127,92	110,37
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	102,25	105,68	111,81	124,85
9.	Sewa Rumah	108,18	108,20	108,23	108,24
10.	Pemerintahan	101,22	113,63	109,08	100,72
11.	Jasa - jasa	103,86	108,29	108,78	106,29
Produk Domestik Regional Bruto		106,79	112,72	110,96	101,89

TABEL 6.1.11 INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR

No.	Lapangan Usaha	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	112,10	121,96	129,86
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	110,12	115,99	121,72
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	125,32	153,64	165,02
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	125,40	159,80	172,07
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	100,00	123,60	143,05	162,68
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	91,81	138,99	172,21
1.6.	Perikanan	100,00	104,09	132,49	167,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	100,00	103,69	108,63	125,57
3.	Industri Pengolahan	100,00	117,82	131,20	145,55
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	122,76	134,78	140,79
5.	B a n g u n a n	100,00	103,73	109,54	119,09
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	114,92	127,66	138,92
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	100,00	119,80	124,39	127,88
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	135,71	148,19	133,07
9.	Sewa Rumah	100,00	108,64	113,50	117,64
10.	Pemerintahan	100,00	116,44	125,39	132,05
11.	Jasa - jasa	100,00	120,30	125,12	129,06
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	114,67	124,95	133,57

Lanjutan Tabel 6.1.11.

No.	Lapangan Usaha	1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	161,11	199,06	250,20	269,11
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	154,22	189,12	244,10	264,62
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	171,98	211,44	240,48	228,41
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	197,91	285,44	240,50	257,39
1.4.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	198,78	259,06	311,51	344,80
1.5.	K e h u t a n a n	201,04	317,32	312,09	301,51
1.6.	Perikanan	238,35	283,34	335,75	369,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	171,98	222,90	196,74	219,71
3.	Industri Pengolahan	192,08	231,79	234,20	256,79
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	115,64	150,50	167,17	206,58
5.	B a n g u n a n	156,02	189,62	194,00	212,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	180,82	217,54	226,58	253,31
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	160,44	212,00	220,62	265,31
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	167,12	228,86	268,24	284,55
9.	Sewa Rumah	133,39	161,14	188,06	217,03
10.	Pemerintahan	159,34	195,81	230,87	253,78
11.	Jasa - jasa	160,89	202,14	239,93	270,47
Produk Domestik Regional Bruto		168,25	207,49	235,28	258,99

<https://jatim.bps.go.id>

6.2. TABEL - TABEL MENURUT PENGUNAAN PDRB

<https://jatim.bps.go.id>

TABEL 6.2.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75 (JUTA Rp.)

No.	Perincian	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.225.147,34	1.530.268,46	1.798.515,39	2.050.729,12
2.	Konsumsi Pemerintah	331.219,90	391.912,63	481.811,06	596.330,06
3.	Pembentukan Modal Tetap	345.384,81	419.924,44	417.839,94	513.699,50
4.	E x p o r	591.583,86	725.144,13	1.153.831,25	1.259.187,52
5.	Impor (-)	608.085,99	791.987,13	1.117.236,60	1.233.430,74
Total Produk Domestik Regional Bruto		1.885.249,92	2.275.262,53	2.734.761,04	3.186.515,46
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.225.147,34	1.334.428,32	1.436.225,71	1.561.811,66
2.	Konsumsi Pemerintah	331.219,90	334.943,55	375.077,94	434.143,81
3.	Pembentuk Modal Tetap	345.384,81	388.805,13	364.542,78	404.375,33
4.	E x p o r	591.583,86	620.134,29	884.079,33	871.214,13
5.	Impor (-)	608.085,99	694.157,01	871.282,60	885.883,47
Total Produk Domestik Regional Bruto		1.885.249,92	1.984.154,28	2.188.643,16	2.385.661,46

Lanjutan Tabel 6.2.1.

No.	Perincian	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	2.468.652,64	3.501.981,67	4.364.895,78	4.977.662,87
2.	Konsumsi Pemerintah	804.277,59	1.151.495,30	1.433.403,29	1.503.257,74
3.	Pembentukan Modal Tetap	721.521,22	1.217.554,69	1.487.288,71	2.242.066,48
4.	E x p o r	2.160.083,85	2.614.692,96	3.197.395,45	3.644.087,69
5.	Impor (-)	1.868.201,71	2.527.461,70	2.986.186,59	3.959.081,61
	Total Produk Domestik Regional Bruto	4.286.333,59	5.958.262,92	7.496.796,64	8.407.993,17
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.562.995,51	1.754.064,68	1.977.799,79	1.937.519,08
2.	Konsumsi Rumah Tangga	462.143,81	564.623,22	618.449,35	597.697,34
3.	Pembentukan Modal Tetap	433.703,39	613.455,52	716.867,17	963.110,70
4.	E x p o r	1.098.222,28	1.108.426,06	1.218.968,51	1.279.013,21
5.	Impor (-)	1.009.492,97	1.169.032,99	1.345.770,52	1.530.900,91
	Total Produk Domestik Regional Bruto	2.547.572,02	2.871.536,49	3.186.314,30	3.246.439,42

TABEL 6.2.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975

No.	Perincian	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	64,98	67,26	65,76	64,36
2.	Konsumsi Pemerintah	17,57	17,22	17,62	18,71
3.	Pembentukan Modal Tetap	18,32	18,46	15,28	16,12
4.	E x p o r	31,38	31,87	42,19	39,52
5.	Impor (-)	32,25	34,81	40,85	38,71
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	64,98	67,25	65,62	65,47
2.	Konsumsi Pemerintah	17,57	16,88	17,14	18,20
3.	Pembentukan Modal Tetap	18,32	19,60	16,66	16,95
4.	E x p o r	31,38	31,26	40,40	36,52
5.	Impor (-)	32,25	34,99	39,81	37,13
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Lanjutan Tabel 6.2.2.

No.	Perincian	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,59	58,78	58,22	59,20
2.	Konsumsi Pemerintah	18,76	19,33	19,12	17,88
3.	Pembentukan Modal Tetap	16,83	20,43	19,84	26,67
4.	E x p o r	50,40	43,88	42,65	43,34
5.	Impor (-)	43,58	42,42	39,83	47,09
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	61,35	61,09	62,07	59,68
2.	Konsumsi Pemerintah	18,14	19,66	19,41	18,41
3.	Pembentukan Modal Tetap	17,02	21,36	22,50	29,67
4.	E x p o r	43,11	38,60	38,26	39,40
5.	Impor (-)	39,62	40,71	42,24	47,16
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 6.2.3. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75

No.	Perincian	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	100,00	124,90	146,80	167,39
2.	Konsumsi Pemerintah	100,00	118,32	145,47	180,04
3.	Pembentukan Modal Tetap	100,00	121,58	120,98	148,73
4.	E x p o r	100,00	122,58	195,04	212,85
5.	Impor (-)	100,00	130,24	183,73	202,84
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	120,69	145,06	169,02
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	100,00	108,92	117,23	127,48
2.	Konsumsi Pemerintah	100,00	101,12	113,24	131,07
3.	Pembentukan Modal Tetap	100,00	112,57	105,55	117,08
4.	E x p o r	100,00	104,83	149,44	147,27
5.	Impor (-)	100,00	114,15	143,28	145,68
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	105,25	116,09	126,54

Lanjutan Tabel 6.2.3.

No.	Perincian	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	201,50	285,84	356,28	406,29
2.	Konsumsi Pemerintah	242,82	347,65	432,76	453,85
3.	Pembentukan Modal Tetap	208,90	352,52	430,62	649,15
4.	E x p o r	365,14	441,98	540,48	615,99
5.	Impor (-)	307,23	415,64	491,08	651,07
Total Produk Domestik Regional Bruto		227,36	316,05	397,66	445,99
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	127,58	143,17	161,43	158,15
2.	Konsumsi Pemerintah	139,53	170,47	186,72	180,45
3.	Pembentukan Modal Tetap	125,57	177,62	207,56	278,85
4.	E x p o r	185,64	187,37	206,05	216,20
5.	Impor (-)	166,01	192,25	221,31	251,76
Total Produk Domestik Regional Bruto		135,13	152,32	169,01	172,20

TABEL 6.2.4. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975

No.	Perincian	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	—	124,90	117,53	114,02
2.	Konsumsi Pemerintah	—	118,32	122,94	123,77
3.	Pembentuk Modal Tetap	—	121,58	99,50	122,94
4.	E x p o r	—	122,58	159,12	109,13
5.	Impor (—)	—	130,24	141,07	110,40
Total Produk Domestik Regional Bruto		—	120,69	120,20	116,52
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	—	108,92	107,63	108,74
2.	Konsumsi Pemerintah	—	101,12	111,98	115,75
3.	Pembentukan Modal Tetap	—	112,57	93,76	110,93
4.	E x p o r	—	104,83	142,56	98,54
5.	Impor (—)	—	114,15	125,52	101,68
Total Produk Domestik Regional Bruto		—	105,25	110,31	109,00

Lanjutan Tabel 6.2.4.

No.	Perincian	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	120,38	141,86	124,64	114,04
2.	Konsumsi Pemerintah	134,87	143,17	124,48	104,87
3.	Pembentukan Modal Tetap	140,46	168,75	122,15	150,75
4.	E x p o r	171,55	121,05	122,29	113,97
5.	Impor (-)	151,46	135,29	118,15	132,58
Total Produk Domestik Regional Bruto		134,51	139,01	125,82	112,15
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	100,08	112,22	112,76	97,96
2.	Konsumsi Pemerintah	106,45	122,17	109,53	96,64
3.	Pembentukan Modal Tetap	107,25	141,45	116,86	134,35
4.	E x p o r	126,06	100,93	109,97	104,93
5.	Impor (-)	113,95	115,80	115,12	113,76
Total Produk Domestik Regional Bruto		106,79	112,72	110,96	101,89

TABEL 6.2.5. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

No.	Perincian	1975	1976	1977	1978
1	2	3	4	5	6
1.	Konsumsi Rumah Tangga	100,00	114,68	125,23	131,30
2.	Konsumsi Pemerintah	100,00	117,01	128,46	137,36
3.	Pembentukan Modal Tetap	100,00	108,00	114,62	127,04
4.	E x p o r	100,00	116,93	130,51	144,53
5.	Impor (-)	100,00	114,09	128,23	139,23
Total Produk Domestik Regional Bruto		100,00	114,67	124,95	133,57

<https://jatim.bps.go.id>

Lanjutan Tabel 6.2.5.

No.	Perincian	1979	1980	1981	1982
1	2	7	8	9	10
1.	Konsumsi Rumah Tangga	157,94	199,65	220,69	256,91
2.	Konsumsi Pemerintah	174,03	203,94	231,77	251,51
3.	Pembentukan Modal Tetap	166,36	198,47	207,47	232,79
4.	E x p o r	196,69	235,89	262,30	284,91
5.	Impor (-)	185,06	216,20	221,89	258,61
Total Produk Domestik Regional Bruto		168,25	207,49	235,28	258,99

<https://jatim.bps.go.id>

<https://jatim.bps.go.id>

6.3 TABEL-TABEL PERBANDINGAN ANTAR PROPINSI

<https://jatim.bps.go.id>

TABEL 6.3.1. : PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU 1976-1982
(JUTA RUPIAH)

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	234.818	289.552	431.647	913.422
2 Sumatera Utara *)	847.114	1.021.760	1.318.910	1.764.704
3 Sumatera Barat	232.870	277.976	345.297	457.406
4 R i a u *)	1.866.679	1.944.237	1.988.791	3.084.287
5 J a m b i	122.955	158.722	186.796	275.458
6 Sumatera Selatan	705.541	860.715	1.031.799	1.631.053
7 Bengkulu	44.071	55.798	67.974	91.465
8 Lampung	315.663	401.042	466.430	620.981
9 DKI Jakarta	1.390.289	1.703.348	1.984.398	2.884.610
10 Jawa Barat	2.127.110	2.419.744	3.014.989	4.003.612
11 Jawa Tengah	1.458.586	1.801.943	2.237.154	2.845.576
12 DI. Yogyakarta	175.147	201.460	242.023	322.492
13 Jawa Timur	2.275.263	2.734.761	3.186.515	4.286.334
14 Kalimantan Barat	225.239	259.902	298.950	379.312
15 Kalimantan Tengah	88.261	112.198	150.082	233.737
16 Kalimantan Selatan	147.325	202.053	241.253	316.413
17 Kalimantan Timur *)	781.080	1.242.231	1.384.971	1.917.699
18 Sulawesi Utara	172.346	276.209	277.270	383.106
19 Sulawesi Tengah	75.580	103.115	138.810	176.345
20 Sulawesi Selatan	428.463	544.722	666.454	895.028
21 Sulawesi Tenggara	60.022	74.455	80.373	96.704
22 B a l i	202.188	233.394	273.870	354.163
23 Nusa Tenggara Barat	138.500	165.611	204.376	246.572
24 Nusa Tenggara Timur	120.296	142.834	189.102	228.352
25 M a l u k u	137.252	187.652	213.808	313.617
26 Irian Jaya *)	269.154	316.849	403.247	532.587
27 Timor - Timur	-	-	-	-

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.1.

P R O P I N S I	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	1.804.607	—	—
2 Sumatera Utara *)	2.471.268	2.803.636	3.169.111 **)
3 Sumatera Barat	614.020	—	—
4 R i a u *)	5.559.938	6.475.393	4.842.038
5 J a m b i	—	—	—
6 Sumatera Selatan	2.108.208	—	—
7 Bengkulu	128.976	139.102	—
8 Lampung	791.802	927.012	—
9 DKI Jakarta	3.757.036	4.820.569	—
10 Jawa Barat	5.651.547	6.909.823	—
11 Jawa Tengah	3.741.066	—	—
12 DI Yogyakarta	390.883	—	—
13 Jawa Timur Kalimantan Barat	5.958.263	7.496.797	8.407.993
14 Kalimantan Barat	528.325	547.611	—
15 Kalimantan Tengah	319.730	359.037	—
16 Kalimantan Selatan	401.480	515.992	—
17 Kalimantan Timur *)	3.269.969	—	—
18 Sulawesi Utara	522.089	592.750	—
19 Sulawesi Tengah	206.907	—	—
20 Sulawesi Selatan	1.147.410	1.349.659	—
21 Sulawesi Tenggara	149.914	—	—
22 B a l i	485.998	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	299.127	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	281.239	348.153	—
25 M a l u k i	395.777	—	—
26 Irian Jaya *)	706.479	743.702	—
27 Timor — Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

***) Angka sementara

TABEL 6.3.2. : PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI-PROPINSI
DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975
TAHUN 1976 - 1982 (JUTA RUPIAH)

P R O P I N S I	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	224.136	229.585	315.134	508.810
2 Sumatera Utara *)	754.117	810.733	908.193	1.003.790
3 Sumatera Barat	198.381	214.897	230.922	251.115
4 R i a u *)	1.820.016	1.780.481	1.654.068	1.668.915
5 J a m b i	102.851	115.913	122.614	127.850
6 Sumatera Selatan *)	622.397	672.339	738.405	758.734
7 Bengkulu	36.338	41.894	46.603	52.932
8 Lampung	248.576	271.743	304.002	313.159
9 DKI Jakarta	1.152.230	1.260.078	1.344.144	1.526.948
10 Jawa Barat	1.905.814	2.010.827	2.261.219	2.364.548
11 Jawa Tengah	1.253.286	1.330.964	1.480.346	1.519.172
12 DI. Yogyakarta	148.751	155.818	165.486	173.658
13 Jawa Timur	1.984.154	2.188.643	2.385.661	2.547.572
14 Kalimantan Barat	187.151	200.088	215.772	228.289
15 Kalimantan Tengah	74.429	83.895	95.301	105.603
16 Kalimantan Selatan	126.504	144.093	157.575	161.964
17 Kalimantan Timur *)	680.674	991.356	1.021.746	1.041.082
18 Sulawesi Utara	142.674	210.260	187.887	204.090
19 Sulawesi Tengah	61.864	72.414	78.085	82.146
20 Sulawesi Selatan	374.697	435.144	489.235	503.624
21 Sulawesi Tenggara	47.137	55.505	59.025	58.110
22 B a l i	170.266	182.980	199.872	235.422
23 Nusa Tenggara Barat	109.272	117.088	127.539	131.810
24 Nusa Tenggara Timur	99.633	106.484	115.319	127.578
25 M a l u k u	119.836	132.208	126.653	140.388
26 Irian Jaya *)	247.531	266.199	316.632	268.884
27 Timor - Timur	-	-	-	-

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.2.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	668.570	—	—
2 Sumatera Utara *)	1.085.898	1.151.460	1.207.264 (**)
3 Sumatera Barat	279.849	—	—
4 R i a u *)	1.667.399	1.659.264	1.217.279
5 Jambi	—	—	—
6 Sumatera Selatan	847.622	—	—
7 Bengkulu	61.221	68.861	—
8 Lampung	340.309	390.590	—
9 DKI Jakarta	1.686.374	1.949.789	—
10 Jawa Barat	2.633.935	2.962.669	—
11 Jawa Tengah	1.717.119	—	—
12 DI. Yogyakarta	188.721	—	—
13 Jawa Timur	2.871.536	3.186.314	3.246.439
14 Kalimantan Barat	260.949	247.271	—
15 Kalimantan Tengah	129.631	138.253	—
16 Kalimantan Selatan	176.230	197.918	—
17 Kalimantan Timur *)	1.008.814	—	—
18 Sulawesi Utara	241.590	283.503	—
19 Sulawesi Tengah	90.463	—	—
20 Sulawesi Selatan	546.493	603.026	—
21 Sulawesi Tenggara	69.978	—	—
22 B a l i	275.477	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	143.905	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	144.730	159.109	—
25 M a l u k u	168.488	—	—
26 Irian Jaya *)	269.820	262.524	—
27 Timor — Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

**) Angka sementara

TABEL 6.3.3. : INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU
TAHUN 1976 – 1982

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	111,01	136,90	204,09	431,87
2 Sumatera Utara *)	124,01	149,57	193,07	258,33
3 Sumatera Barat	123,67	147,63	183,38	242,92
4 R i a u *)	103,70	108,01	110,48	171,34
5 J a m b i *)	—	—	—	—
6 Sumatera Selatan *)	—	—	—	—
7 Bengkulu	138,96	175,94	195,52	263,09
8 Lampung	136,03	172,82	200,99	267,59
9 DKI Jakarta	134,08	164,27	191,38	278,19
10 Jawa Barat	123,61	140,15	174,63	231,89
11 Jawa Tengah	110,05	135,96	168,80	214,70
12 DI. Yogyakarta	119,79	137,79	165,54	220,57
13 Jawa Timur	120,69	145,06	169,02	227,36
14 Kalimantan Barat	132,31	152,67	175,60	222,81
15 Kalimantan Tengah	135,90	172,76	231,09	359,89
16 Kalimantan Selatan	123,25	169,04	201,84	264,72
17 Kalimantan Timur *)	—	—	—	—
18 Sulawesi Utara	115,31	184,81	185,52	256,33
19 Sulawesi Tengah	132,98	181,43	244,24	310,28
20 Sulawesi Selatan	119,47	151,89	185,84	249,57
21 Sulawesi Tenggara	—	—	—	—
22 B a l i	132,13	152,52	178,97	231,45
23 Nusa Tenggara Barat	—	—	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	128,08	152,08	201,35	243,14
25 M a l u k u	—	—	—	—
26 Irian Jaya *)	—	—	189,59	250,41
27 Timor Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.3.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	853,23	—	—
2 Sumatera Utara *)	361,76	410,41	463,92
3 Sumatera Barat	326,10	—	—
4 Riau *)	308,87	359,73	268,99
5 Jambi *)	—	—	—
6 Sumatera Selatan	—	—	—
7 Bengkulu	370,99	400,11	—
8 Lampung	341,21	399,48	—
9 DKI Jakarta	362,33	464,90	—
10 Jawa Barat	327,34	400,22	—
11 Jawa Tengah	282,27	—	—
12 DI. Yogyakarta	267,35	—	—
13 Jawa Timur	316,05	397,66	445,99
14 Kalimantan Barat	310,34	321,67	—
15 Kalimantan Tengah	492,30	552,82	—
16 Kalimantan Selatan	335,88	431,69	—
17 Kalimantan Timur *)	—	—	—
18 Sulawesi Utara	349,32	396,60	—
19 Sulawesi Tengah	364,05	—	—
20 Sulawesi Selatan	319,95	376,34	—
21 Sulawesi Tenggara	—	—	—
22 Bali	317,60	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	—	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	299,45	370,70	—
25 Maluku	—	—	—
26 Irian Jaya *)	332,16	349,66	—
27 Timor Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

TABEL 6.3.4. : INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75
TAHUN 1976 - 1982

P R O P I N S I	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	105,97	183,13	251,37	405,86
2 Sumatera Utara *)	110,39	118,68	132,95	146,94
3 Sumatera Barat	124,34	134,69	144,74	157,39
4 Riau *)	101,11	98,91	91,89	92,71
5 Jambi *)	-	-	-	-
6 Sumatera Selatan *)	-	-	-	-
7 Bengkulu	114,58	132,10	133,93	152,12
8 Lampung	107,12	117,10	131,00	134,95
9 DKI Jakarta	111,12	121,52	129,63	147,26
10 Jawa Barat	110,75	116,47	130,97	136,96
11 Jawa Tengah	105,77	112,33	124,94	128,22
12 DI. Yogyakarta	101,74	106,57	113,19	118,78
13 Jawa Timur	105,25	116,09	126,54	135,13
14 Kalimantan Barat	106,64	111,31	116,91	119,65
15 Kalimantan Tengah	114,60	129,18	146,74	162,60
16 Kalimantan Selatan	105,84	120,55	131,83	135,50
17 Kalimantan Timur *)	-	-	-	-
18 Sulawesi Utara	95,46	140,68	125,71	136,55
19 Sulawesi Tengah	108,85	127,41	137,39	144,54
20 Sulawesi Selatan	104,48	121,38	136,47	140,48
21 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
22 B a l i	111,27	119,58	130,62	153,85
23 Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
24 Nusa Tenggara Timur	106,08	113,38	122,79	135,84
25 M a l u k u	-	-	-	-
26 Irian Jaya *)	115,76	125,16	148,87	126,42
27 Timor Timur	-	-	-	-

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.4.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	533,29	—	—
2 Sumatera Utara	158,96	168,56	176,73
3 Sumatera Barat	175,40	—	—
4 Riau *)	92,63	92,18	67,62
5 Jambi *)	—	—	—
6 Sumatera Selatan *)	—	—	—
7 Bengkulu	175,95	197,90	—
8 Lampung	146,65	168,32	—
9 DKI Jakarta	162,63	188,04	—
10 Jawa Barat	152,56	171,60	—
11 Jawa Tengah	144,92	—	—
12 DI. Yogyakarta	129,08	—	—
13 Jawa Timur	152,32	169,01	172,20
14 Kalimantan Barat	133,41	123,72	—
15 Kalimantan Tengah	199,60	212,87	—
16 Kalimantan Selatan	147,44	165,58	—
17 Kalimantan Timur	—	—	—
18 Sulawesi Utara	161,64	189,69	—
19 Sulawesi Tengah	159,17	—	—
20 Sulawesi Selatan	152,44	168,20	—
21 Sulawesi Tenggara	—	—	—
22 B a l i	180,02	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	—	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	154,10	169,41	—
25 M a l u k u	—	—	—
26 Irian Jaya *)	126,86	123,43	—
27 Timor Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

TABEL 6.3.5. : INDEKS BERANTAI DARI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1976 - 1982 (TAHUN SEBELUMNYA 100,00)

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	111,01	123,31	149,07	211,61
2 Sumatera Utara *)	124,01	120,62	129,08	133,80
3 Sumatera Barat	123,67	119,37	124,22	132,47
4 R i a u *)	103,70	104,15	102,29	155,08
5 Jambi *)	—	129,09	117,69	147,46
6 Sumatera Selatan	—	121,99	119,88	158,08
7 Bengkulu	138,96	126,61	121,82	134,56
8 Lampung	136,03	127,05	115,30	133,13
9 DKI Jakarta	134,08	122,52	116,50	145,36
10 Jawa Barat	123,61	113,30	124,60	132,79
11 Jawa Tengah	110,05	123,54	124,15	127,20
12 DI. Yogyakarta	119,79	115,02	120,13	133,25
13 Jawa Timur	120,69	120,20	116,52	134,51
14 Kalimantan Barat	132,31	115,39	115,02	126,88
15 Kalimantan Tengah	135,90	127,12	133,77	155,74
16 Kalimantan Selatan	123,25	137,15	119,40	131,15
17 Kalimantan Timur *)	—	159,04	111,49	138,46
18 Sulawesi Utara	115,31	160,26	100,38	138,17
19 Sulawesi Tengah	132,98	136,43	134,62	127,04
20 Sulawesi Selatan	119,47	127,13	122,35	134,30
21 Sulawesi Tenggara	—	124,05	107,95	120,32
22 B a l i	132,13	115,43	117,34	129,32
23 Nusa Tenggara Barat	—	119,57	123,41	120,65
24 Nusa Tenggara Timur	128,08	118,73	132,39	120,76
25 M a l u k u	—	136,72	113,94	146,68
26 Irian Jaya *)	—	—	127,27	132,07
27 Timor Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.5.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	197,57	—	—
2 Sumatera Utara *)	140,04	113,45	113,04
3 Sumatera Barat	134,24	—	—
4 Riau *)	180,27	116,47	74,78
5 Jambi *)	—	—	—
6 Sumatera Selatan	129,25	—	—
7 Bengkulu	141,01	107,85	—
8 Lampung	127,51	117,08	—
9 DKI Jakarta	130,24	128,31	—
10 Jawa Barat	141,16	122,26	—
11 Jawa Tengah	131,47	—	—
12 DI. Yogyakarta	121,21	—	—
13 Jawa Timur	139,01	125,82	112,15
14 Kalimantan Barat	139,29	103,65	—
15 Kalimantan Tengah	136,79	112,29	—
16 Kalimantan Selatan	126,88	128,52	—
17 Kalimantan Timur *)	170,52	—	—
18 Sulawesi Utara	136,28	113,53	—
19 Sulawesi Tengah	117,33	—	—
20 Sulawesi Selatan	128,20	117,63	—
21 Sulawesi Tenggara	155,02	—	—
22 B a l i	137,22	117,83	—
23 Nusa Tenggara Barat	121,31	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	123,16	123,79	—
25 M a l u k u	126,20	—	—
26 Irian Jaya *)	132,65	105,27	—
27 Timor Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

TABEL 6.3.6. : INDEKS BERANTAI DARI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975
 TAHUN 1976 – 1982 (TAHUN SEBELUMNYA = 100,00)

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	105,97	102,43	137,26	161,46
2 Sumatera Utara *)	110,39	107,51	112,02	110,53
3 Sumatera Barat	124,34	108,33	107,46	108,74
4 Riau *)	101,11	97,83	92,90	100,90
5 Jambi *)	—	112,70	105,78	104,27
6 Sumatera Selatan *)	—	108,02	109,83	102,75
7 Bengkulu	114,58	115,29	111,24	113,58
8 Lampung	107,12	109,33	111,87	103,01
9 DKI Jakarta	111,12	109,36	106,67	113,60
10 Jawa Barat	110,75	105,11	112,45	104,57
11 Jawa Tengah	105,77	106,20	111,22	102,62
12 DI. Yogyakarta	101,74	104,75	106,20	104,94
13 Jawa Timur	105,25	110,31	109,00	106,79
14 Kalimantan Barat	106,64	104,37	105,03	102,34
15 Kalimantan Tengah	114,60	112,72	113,60	110,81
16 Kalimantan Selatan	105,84	113,90	109,36	102,79
17 Kalimantan Timur *)	—	145,64	103,07	101,89
18 Sulawesi Utara	95,46	147,37	89,36	108,62
19 Sulawesi Tengah	108,85	117,05	107,83	105,20
20 Sulawesi Selatan	104,48	116,13	112,43	102,94
21 Sulawesi Tenggara	—	117,75	106,34	98,45
22 Bali	111,27	107,47	109,23	117,79
23 Nusa Tenggara Barat	—	107,15	108,93	103,35
24 Nusa Tenggara Timur	106,08	106,88	108,30	110,63
25 Maluku	—	110,32	95,80	110,84
26 Irian Jaya *)	115,76	108,12	118,94	84,92
27 Timor Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.6.

PROPINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	131,40	—	—
2 Sumatera Utara *)	108,18	106,04	104,85
3 Sumatera Barat	111,44	—	—
4 Riau *)	99,91	99,51	73,36
5 Jambi *)	—	—	—
6 Sumatera Selatan *)	111,72	—	—
7 Bengkulu	115,66	112,48	—
8 Lampung	108,67	114,78	—
9 DKI Jakarta	110,22	116,87	—
10 Jawa Barat	111,39	112,48	—
11 Jawa Tengah	113,03	—	—
12 DI. Yogyakarta	108,67	—	—
13 Jawa Timur	112,72	110,96	101,89
14 Kalimantan Barat	111,49	92,74	—
15 Kalimantan Tengah	122,75	106,65	—
16 Kalimantan Selatan	108,81	112,31	—
17 Kalimantan Timur *)	96,90	—	—
18 Sulawesi Utara	118,37	117,35	—
19 Sulawesi Tengah	110,12	—	—
20 Sulawesi Selatan	108,57	110,34	—
21 Sulawesi Tenggara	120,42	—	—
22 B a l i	117,01	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	109,18	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	113,44	109,94	—
25 M a l u k u	120,02	—	—
26 Irian Jaya *)	100,35	97,30	—
27 Timor Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

TABEL 6.3.7. : PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
1976-1982 (RUPIAH)

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	103.444	123.740	179.107	368.315
2 Sumatera Utara *)	113.060	132.918	167.276	218.270
3 Sumatera Barat	74.752	87.305	106.108	137.527
4 Riau *)	988.359	1.000.345	994.164	1.497.575
5 Jambi	102.292	129.094	146.392	212.381
6 Sumatera Selatan *)	159.018	185.055	211.726	368.169
7 Bengkulu	74.515	85.584	97.604	125.811
8 Lampung	91.835	109.076	123.922	160.855
9 DKI Jakarta	250.380	293.004	330.529	462.307
10 Jawa Barat	85.791	95.295	115.932	150.299
11 Jawa Tengah	61.851	75.460	92.827	116.001
12 DI. Yogyakarta	56.660	75.790	89.880	118.070
13 Jawa Timur ²	83.110	98.427	113.001	149.769
14 Kalimantan Barat	100.026	112.862	126.833	157.293
15 Kalimantan Tengah	107.003	130.594	170.014	258.781
16 Kalimantan Selatan	76.950	102.842	119.646	156.624
17 Kalimantan Timur *)	884.480	1.261.654	1.351.043	1.801.945
18 Sulawesi Utara	88.706	140.364	140.364	191.571
19 Sulawesi Tengah	70.399	93.037	121.777	150.657
20 Sulawesi Selatan	77.229	95.826	116.567	155.440
21 Sulawesi Tenggara	75.325	89.884	96.041	113.024
22 Bali	88.351	100.273	115.684	147.086
23 Nusa Tenggara Barat	55.595	64.871	78.127	91.984
24 Nusa Tenggara Timur	48.927	57.358	73.502	86.938
25 Maluku	109.344	152.474	161.289	228.348
26 Irian Jaya *)	254.482	293.382	363.256	466.601
27 Timor - Timur	-	-	-	-

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.7.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	691.420	—	—
2 Sumatera Utara	298.078	330.038	364.240 **)
3 Sumatera Barat	180.269	—	—
4 Riau *)	2.621.599	2.916.819	2.109.350
5 Jambi	—	—	—
6 Sumatera Selatan	440.935	—	—
7 Bengkulu	169.947	175.582	—
8 Lampung	191.044	197.069	—
9 DKI Jakarta	580.533	739.579	—
10 Jawa Barat	207.724	247.315	—
11 Jawa Tengah	150.518	—	—
12 DI. Yogyakarta	141.480	—	—
13 Jawa Timur	205.128	254.302	281.020
14 Kalimantan Barat	214.140	216.945	—
15 Kalimantan Tengah	345.501	364.869	—
16 Kalimantan Selatan	194.454	247.025	—
17 Kalimantan Timur	2.846.288	—	—
18 Sulawesi Utara	257.878	274.873	—
19 Sulawesi Tengah	168.735	—	—
20 Sulawesi Selatan	193.603	221.198	—
21 Sulawesi Tenggara	169.528	—	—
22 Bali	198.464	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	108.884	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	104.248	125.842	—
25 Maluku	278.719	—	—
26 Irian Jaya *)	601.843	617.078	—
27 Timor — Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

***) Angka Sementara

TABEL 6.3.8. PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75
TAHUN 1976 – 1982 (RUPIAH)

P R O P I N S I	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	98.738	98.113	130.761	205.165
2 Sumatera Utara *)	100.648	105.466	115.185	124.155
3 Sumatera Barat	63.681	67.494	70.961	75.500
4 R i a u *)	963.652	916.089	826.841	810.341
5 J a m b i	85.567	93.103	96.092	98.574
6 Sumatera Selatan *)	139.779	144.209	150.279	171.220
7 Bengkulu	62.395	62.797	66.917	72.809
8 Lampung	72.317	73.909	80.768	81.119
9 DKI Jakarta	207.508	216.754	223.886	244.719
10 Jawa Barat	76.865	79.191	86.948	88.767
11 Jawa Tengah	53.145	55.737	61.424	61.929
12 DI. Yogyakarta	56.610	58.590	61.460	63.580
13 Jawa Timur	72.477	78.772	84.600	89.015
14 Kalimantan Barat	83.111	86.888	91.544	94.667
15 Kalimantan Tengah	90.233	97.650	107.958	116.918
16 Kalimantan Selatan	66.074	73.341	78.147	80.172
17 Kalimantan Timur *)	735.924	1.006.857	996.716	978.242
18 Sulawesi Utara	73.434	106.837	95.115	102.055
19 Sulawesi Tengah	57.623	65.336	68.503	70.180
20 Sulawesi Selatan	67.537	76.549	85.570	87.465
21 Sulawesi Tenggara	59.155	67.007	70.531	67.919
22 B a l i	74.402	78.614	84.427	97.772
23 Nusa Tenggara Barat	43.863	45.864	48.775	49.172
24 Nusa Tenggara Timur	40.523	42.761	44.823	48.571
25 M a l u k u	94.716	102.101	94.768	101.565
26 Irian Jaya *)	234.309	246.483	285.231	235.570
27 Timor – Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.8.

PROPINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	256.157	—	—
2 Sumatera Utara *)	130.979	135.547	138.756 **)
3 Sumatera Barat	82.160	—	—
4 Riau *)	786.205	747.410	530.286
5 Jambi	—	—	—
6 Sumatera Selatan	185.187	—	—
7 Bengkulu	80.669	86.376	—
8 Lampung	82.109	83.034	—
9 DKI Jakarta	264.616	299.139	—
10 Jawa Barat	96.811	106.039	—
11 Jawa Tengah	69.087	—	—
12 DI. Yogyakarta	68.210	—	—
13 Jawa Timur	98.860	108.085	108.506
14 Kalimantan Barat	105.767	97.961	—
15 Kalimantan Tengah	140.080	140.499	—
16 Kalimantan Selatan	85.356	94.751	—
17 Kalimantan Timur *)	878.105	—	—
18 Sulawesi Utara	119.330	131.467	—
19 Sulawesi Tengah	73.774	—	—
20 Sulawesi Selatan	92.211	98.831	—
21 Sulawesi Tenggara	79.141	—	—
22 Bali	112.494	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	52.382	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	53.648	57.511	—
25 Maluku	118.924	—	—
26 Irian Jaya *)	229.857	217.826	—
27 Timor Timur	—	—	—

*) Termasuk minyak bumi

TABEL 6.3.9. : INDEKS IMPLISIT DARI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA

PROPINSI	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	104,77	126,12	136,97	179,52
2 Sumatera Utara *)	112,79	126,89	143,13	172,00
3 Sumatera Barat	117,39	129,35	149,53	182,15
4 R i a u *)	102,56	109,20	120,24	184,81
5 Jambi *)	119,55	136,93	152,34	215,45
6 Sumatera Selatan	113,36	128,02	139,73	214,97
7 Bengkulu	121,28	133,19	145,86	172,80
8 Lampung	126,99	147,58	153,43	198,30
9 DKI Jakarta	120,66	135,18	147,63	188,91
10 Jawa Barat	111,61	120,33	133,33	169,32
11 Jawa Tengah	116,38	135,39	151,12	187,31
12 DI. Yogyakarta	117,75	129,29	146,25	185,71
13 Jawa Timur	114,67	124,95	133,57	168,25
14 Kalimantan Barat	120,35	129,89	138,55	166,15
15 Kalimantan Tengah	118,59	133,74	157,48	221,34
16 Kalimantan Selatan	116,46	177,09	153,10	195,36
17 Kalimantan Timur *)	114,75	125,31	135,55	184,20
18 Sulawesi Utara	120,80	131,37	147,57	187,71
19 Sulawesi Tengah	122,17	142,40	177,77	214,67
20 Sulawesi Selatan	114,35	125,18	136,22	177,72
21 Sulawesi Tenggara	127,34	134,14	136,17	166,42
22 B a l i	118,75	127,55	137,02	150,44
23 Nusa Tenggara Barat	126,75	141,44	160,25	187,07
24 Nusa Tenggara Timur	120,74	134,14	163,98	178,99
25 M a l u k u	114,53	141,94	168,81	223,39
26 Irian Jaya *)	108,74	119,03	127,35	198,07
27 Timor Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.9.

PROVINSI	1980	1981	1982
1	6	7	8
1 Daerah Istimewa Aceh	269,92	—	—
2 Sumatera Utara *)	210,00	227,76	247,74
3 Sumatera Barat	219,41	—	—
4 R i a u *)	333,45	390,26	397,78
5 Jambi *)	—	—	—
6 Sumatera Selatan	248,72	—	—
7 Bengkulu	210,67	202,00	—
8 Lampung	232,67	237,34	—
9 DKI Jakarta	222,79	247,24	—
10 Jawa Barat	214,57	233,23	—
11 Jawa Tengah	217,87	—	—
12 DI. Yogyakarta	207,12	—	—
13 Jawa Timur	207,49	235,28	258,99
14 Kalimantan Barat	202,46	221,47	—
15 Kalimantan Tengah	246,65	259,70	—
16 Kalimantan Selatan	227,82	260,71	—
17 Kalimantan Timur *)	324,14	—	—
18 Sulawesi Utara	216,11	209,08	—
19 Sulawesi Tengah	228,72	—	—
20 Sulawesi Selatan	209,96	223,81	—
21 Sulawesi Tenggara	214,23	—	—
22 B a l i	176,42	—	—
23 Nusa Tenggara Barat	207,86	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	194,32	218,81	—
25 M a l u k u	234,90	—	—
26 Irian Jaya *)	261,83	283,29	—
27 Timor - Timur	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

TABEL 6.3.10 : RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS
DASAR HARGA KONSTAN 1975, 1975-1982 (%)

P R O P I N S I	Tingkat Pertumbuhan Tahunan (%)			
	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1 Daerah Istimewa Aceh	5,97	2,43	37,26	61,46
2 Sumatera Utara *)	10,39	7,51	12,02	10,53
3 Sumatera Barat	24,34	8,33	7,46	8,74
4 Riau *)	1,11	-2,17	-7,10	0,10
5 Jambi *)	-	12,70	5,78	4,27
6 Sumatera Selatan *)	-	8,02	9,83	2,75
7 Bengkulu	14,58	15,29	11,24	13,58
8 Lampung	7,12	9,33	11,87	3,01
9 DKI Jakarta	11,12	9,36	6,67	13,60
10 Jawa Barat	10,75	5,11	12,45	4,57
11 Jawa Tengah	5,77	6,20	11,22	2,62
12 DI. Yogyakarta	1,74	4,75	6,20	4,94
13 Jawa Timur	5,25	10,31	9,00	6,79
14 Kalimantan Barat	6,64	4,37	5,03	2,34
15 Kalimantan Tengah	14,60	12,72	13,60	10,81
16 Kalimantan Selatan	5,84	13,90	9,36	2,79
17 Kalimantan Timur *)	-	45,64	3,07	1,89
18 Sulawesi Utara	-4,54	47,37	-10,64	8,62
19 Sulawesi Tengah	8,85	17,05	7,83	5,20
20 Sulawesi Selatan	4,48	16,13	12,43	2,94
21 Sulawesi Tenggara	-	17,75	6,34	-1,55
22 B a l i	11,27	7,47	9,23	17,79
23 Nusa Tenggara Barat	-	7,15	8,93	3,35
24 Nusa Tenggara Timur	6,08	6,88	8,30	10,63
25 M a l u k u	-	10,32	-4,20	10,84
26 Irian Jaya *)	15,76	8,12	18,94	-15,08
27 Timor Timur	-	-	-	-

*) Termasuk Minyak Bumi

Lanjutan Tabel 6.3.10

P R O P I N S I	Tingkat Pertumbuhan Tahunan (%)			Rata-rata tingkat per- pertumbuhan (%)
	1980	1981	1982	1976 — 1982
1	6	7	8	9
1 Daerah Istimewa Aceh	31,40	—	—	27,70
2 Sumatera Utara *)	8,18	6,04	4,85	8,50
3 Sumatera Barat	11,44	—	—	12,06
4 Riau *)	-0,19	-0,49	-26,64	-5,05
5 Jambi *)	—	—	—	—
6 Sumatera Selatan *)	11,72	—	—	—
7 Bengkulu	15,66	12,48	—	13,81
8 Lampung	8,67	14,78	—	9,13
9 DKI Jakarta	10,22	16,87	—	11,31
10 Jawa Barat	11,39	12,48	—	9,46
11 Jawa Tengah	13,03	—	—	7,77
12 DI. Yogyakarta	8,67	—	—	5,26
13 Jawa Timur	12,72	10,96	1,89	8,13
14 Kalimantan Barat	11,49	-7,26	—	3,77
15 Kalimantan Tengah	22,75	6,65	—	13,52
16 Kalimantan Selatan	8,81	12,31	—	8,84
17 Kalimantan Timur	-3,10	—	—	—
18 Sulawesi Utara	18,37	17,35	—	12,76
19 Sulawesi Tengah	10,12	—	—	9,81
20 Sulawesi Selatan	8,57	10,34	—	9,15
21 Sulawesi Tenggara	20,42	—	—	—
22 B a l i	17,01	—	—	12,55
23 Nusa Tenggara Barat	9,18	—	—	—
24 Nusa Tenggara Timur	13,44	9,94	—	9,21
25 M a l u k u	20,02	—	—	—
26 Irian Jaya *)	0,35	-2,70	—	4,23
27 Timor Timur	—	—	—	—

*) Termasuk Minyak Bumi

<https://jatim.bps.go.id>